# WATAK POLITIK GERAKAN SERIKAT BURUH INDONESIA

Iskandar Tedjasukmana

alih bahasa:

Oey Hay Djoen

(April, 2008)

Seri Monograf
Modern Indonersia Project
Southeast Asia Program
Department of Far Eastern Studies
Cornell University
Ithaca, New York
1958

edi cahyono's LIBRARY

edi cahyono's LIBRARY

# PRAKATA

Hanya di sedikit negeri Asia tenaga kerja terorganisasi merupakan suatu faktor ekonomi dan politik yang sepenting di Indonesia masa kini, dan hanya di beberapa negeri di dunia ia telah begitu dipolitisasikan. Namun begitu, sejauh ini sangat sedikit riset dan penulisan serius telah dilakukan mengenai serikat-serikat buruh Indonesia. Maka dari itu Proyek Indonesia Modern Universitas Cornell bergembira dengan penerbitan studi perintisan oleh Iskandar Tedjasukmana ini. Sulit sekali mendapatkan seseorang yang lebih memenuhi syarat untuk melakukan studi seperti itu daripada Iskandar Tedjasukmana, karena ia telah menjadi Menteri Perburuhan dalam tiga kabinet Indonesia berbeda-beda: Kabinet Sukiman (27 April, 1951 – 2 April, 1952); Kabinet Wilopo (3 April, 1952 – 31 Juli, 1953); dan Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus, 1955 – 27 Maret, 1956). Tambahan pula, dari tahun 1951 hingga 1956 ia adalah Ketua Biro Politik dari Partai Buruh. Dari tahun 1946 hingga 1956, kecuali sebagai Menteri Kabinet, ia adalah seorang anggota Parlemen Indonesia, bertindak dari Maret, 1947, hingga Agustus, 1949, sebagai Wakil Ketua Badan Pekerja Parlemen Indonesia.

Kini, Tedjasukmana terdaftar sebagai seorang kandidat untuk gelar PhD. pada *School of Industrial and Labor Relations* di Universitas Cornell.

Ithaca, New York
31 Oktober 1958

George McT. Kahin
Direktur

# I S I


| Bab | | hlm. |
|---|---|---|
| | PENDAHULUAN | 1 |
| | Masalah dan arti-pentingnya | 1 |
| I. | SEJARAH SINGKAT GERAKAN SERIKAT BURUH INDONESIA | 5 |
| | Periode kolonial | 6 |
| | Periode Republik | 26 |
| II. | KEADAAN GERAKAN SERIKAT BURUH INDONESIA SEKARANG, | 34 |
| III | DAMPAK IDEOLOGI POLITIIK | 52 |
| | Dampak Nasionalisme dan Revolousi Nasional | 52 |
| | Pengaruh Islam | 57 |
| | Pengaruh Sosialisme | 59 |
| | Kesadaran kelas dan Teori Perjuangan Kelas. | |
| | Serikat Buruh sebagai Organisasi Kelas | 72 |
| | Serikat-Serikat Buruh sebagai Sekolah Sosialisme | 79 |
| | Konsepsi Serikat Buruh sebagai Organisasi Massa | 93 |
| | Konsep Sentralisme Demokratik | 103 |
| IV | HUBUNGAN SERIKAT BURUH DENGAN PARTAI POLITIK | 114 |
| V | KEGIATAN POLITIK SERIKAT BURUH | 134 |
| | Akitivitas Serikat Buruh dalam hubungan dengan Kebijakan Perburuhan Pemerintah dan perundang-undangan Perburuhan | 135 |
| | Kegiatan Politik di Luar Bidang Perburuhan | 147 |
| VI | KESIMPULAN | 159 |

edi cahyono's LIBRARY

# PENDAHULUAN

## Masalah dan Arti-pentingnya

Di Indonesia, gerakan serikat buruh senantiasa menjadi sasaran pengaruh ideologi, teristimewa pengaruh-pengaruh komunis dan sosialis. Pada waktu bersamaan, nasionalisme dan revolusi nasional Indonesia telah membangkitkan imajinasi semua serikat buruh. Hasilnya ialah bahwa perserikatan yang bersifat non-politik tidak dikenal oleh kaum pekerja Indonesia. Administrasi serikat-serikat buruh tidak selalu lugas dan seringkali ditentukan atau dipengaruhi oleh situasi bahwa serikat-serikat buruh itu adalah sejenis asosiasi politik dan organisasi perjuangan, sekali pun mereka juga sangat sibuk dalam mengajukan tuntutan-tuntutan ekonomi kepada para majikan, dalam melakukan perundingan tawar-menawar kolektif, dan dalam menangani perselisihan perburuhan. Namun begitu, di dalam pendekatan mereka pada perselisihan perburuhan, banyak pemimpin serikat buruh seringkali lebih bersemangat dan dipandu oleh sentimen-sentimen politik, daripada oleh perhitungan-perhitungan ekonomi yang dingin. Cara-cara yang dipakai dan kalimat-kalimat yang dipakai selama perselisihan perburuhan mengingatkan kita lebih pada suatu arena politik daripada suatu ruangan konferensi bisnis.

Banyak serikat buruh seringkali terlibat dalam kegiatan politik semurninya dan menginginkan tujuan-tujuan politik. Perhatian utama yang mendasari keprihatinan mereka juga dipusatkan di bidang ekonomi politik. Pembangunan ekonomi negeri menurut garis-garis sosialis merupakan suatu subyek tetap bagi studi, diskusi dan agitasi di kalangan serikat buruh.

Selama bulan-bulan menyusul Proklamasi Republik Indonesia pada 17 Agustus, 1945, adalah kaum pekerja yang merebut kantor-kantor, bangunan-bangunan, pabrik-pabrik, tanah-tanah perkebunan, dan kantor-kantor perdagangan dari pelaksana militer Jepang. Dan

pada bulan Desember 1957, adalah lagi-lagi kaum pekerja, yang dipimpin oleh serikat-serikat buruh, yang merebut perusahaan-perusahaan Belanda untuk memaksa Pemerintah mengambil alih kekuasaan atas obyek-obyek ekonomi vital ini.

Jalan pikiran di antara serikat-serikat buruh ini berasal dari permulaan paling dini dari gerakan di Indonesia lima puluh tahun yang lalu. Ia merupakan akibat dari situasi bahwa kelahiran, perkembangan, dan pengalaman gerakan serikat-serikat buruh bertepatan dan berjalan bergandengan tangan dengan perubahan-perubahan gerakan politik nasionalis untuk kemerdekaan. Sesungguhnya, gerakan serikat buruh Indonesia selalu merupakan suatu bagian, suatu bagian penting, dari gerakan nasional Indonesia.

Proses perkembangan itu adalah sebagai berikut:

Serikat buruh murni Indonesia yang pertama –sebuah serikat buruh di bawah kepemimpinan orang-orang Indonesia diorganisasi pada tahun 1908, pada tahun pembentukan asosiasi politik Indonesia yang pertama.[1] Sebelum 1908 sudah terdapat organisasi-organisasi kaum pekerja upahan, tetapi ini merupakan asosiasi-asosiasi orang-orang Belanda yang bekerja di Indonesia, atau dari orang-orang Belanda dan Indonesia, namun dengan hanya orang belanda sebagai pemimpin.

Selama seluruh periode perjuangan nasional terhadap rezim kolonial Belanda, hingga tahun 1942, gerakan serikat buruh terus menerus dalam hubungan erat dengan gerakan politik. Banyak tokoh serikat buruh adalah anggota partai politik, dan banyak fungsionaris partai politik memegang kedudukan dalam serikat buruh.

Selama pendudukan Jepang serikat-serikat buruh ditindas bersama dengan unsur-unsur politik yang berkeyakinan komunis, sosialis, dan nasionalis.

[1] *Budi Utomo*, didirikan pada tahun 1908, merupakan sebuah asosias nasionalis yang kemudian menjadi sebuah partai politik resmi.

Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan, serikat-serikat buruh melanjutkan kegiatan-kegiatan mereka, kebanyakan dari mereka dengan nama-nama baru, struktur-struktur baru, dan program baru, sedangkan pada waktu bersamaan, serikat-serikat buruh yang seluruhnya baru telah dibentuk.

Manakala, segera setelah didirikannya Republik, orang Belanda kembali ke Indonesia di bawah perlindungan Tentara Sekutu, kaum buruh, disemangati oleh para pemimpin serikat buruh, melawan pasukan kolonial Belanda, berdampingan dengan tentara tetap Republik dan sejumlah organisasi militer tidak resmi lainnya.[2]

Permusuhan dengan Belanda berakhir –sekurang-kurangnya secara resmi– pada akhir tahun 1949. Pada 27 Desember, 1949, Kerajaan Belanda menyerahkan pengakuan kedaulatan pada Republik.

Serikat-serikat buruh kini menghadap suatu situasi baru dan masalah-masalah baru. Pertama-tama sekali mereka berkeras bahwa mereka mesti ambil bagian dalam tanggung-jawab atas hari-depan Republik. Karena mereka telah mempunyai satu peranan aktif di dalam perjuangan kemerdekaan dan di dalam membela Republik, serikat-serikat buruh berpendapat bahwa mereka juga bertanggung-jawab bagi perjalanan peristiwa-peristiwa masa depan dalam Republik dan bagi perwujudan tujuan-tujuan dan cita-cita yang berkaitan dengan kemerdekaan.

Maksud studi ini ialah menjejaki dan mengidentifikasikan pengaruh-pengaruh ideologi yang telah menjadikan serikat-serikat buruh Indonesia organisasi-organiasasi perjuangan yang mengejar tujuan-tujuan politik sebagai tambahan pada keuntungan ekonomi langsung. Perhatian khusus akan diberikan pada pengaruh-pengaruh Marxis dan Leninis. Untuk mengidentifikasinya, kita mesti merujuk pada indoktrinasi serikat-serikat buruh di tanah-air (negeri-induk) komunisme –Uni Sovyet. Rujukan pada gerakan serikat buruh

[2] Kesatuan-kesatuan kaum buruh yang dilatih secara khusus juga diberi tugas dalam melaksanakan yang disebut politik bumi hangus, yaitu pengrusakan dan penghancuran gedung, pabrik, jembatan, dan bangunan lainnya.

Tiongkok komunis akan menunjukkan arti penting kemenangan komunis di Tiongkok daratan bagi negeri-negeri Asia lainnya, termasuk Indonesia.

Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai gerakan serikat buruh Indonesia, perlu dipahami watak politiknya, sebagaimana itu dinyatakan oleh hubungan serikat-serikat buruh dengan partai politik dan kecenderungannya akan aksi politik. Pemahaman ini diperlukan untuk menjelaskan sikap-sikap tenaga kerja terorganisasi Indonesia dewasa ini. Suatu pemahaman mengenai sikap-siakp gerakan serikat buruh akan berguna untuk mengurai kerumitan hubungan-hubungan perburuhan dalam negeri sekarang yang membingungkan, dan untuk menjelaskan kebijakan perburuhan dari Pemerintah Indonesia.

Membongkar kekusutan itu tidak saja berguna bagi pemahaman tetapi juga merupakan langkah pertama:

a. dalam meratakan jalan bagi suatu perkembangan yang lebih sehat dari gerakan serikat buruh Indonesia dan bagi perlindungan demokrasi di dalam gerakan dan di dalam komunitas yang bebas;
b. menuju perbaikan hubungan-hubungan buruh-pelaksana dan mengurangi perselisihan industri.
c. Penyederhanaan pengelompokan dalam gerakan serikat buruh; dalam pemulihan dan adaptasi hubungan-hubungan gerakan perburuhan dengan partai-partai politik dalam proporsi-proporsi yang lebih masuk akal dan sehat; dan, dengan melalukan itu, meredahkan persaingan pemihakan/dukungan di antara berbagai faksi politik yang memecah belah negeri, dan dengan demikian membantu memajukan persatuan, keserasian dan stabilitas nasional.
d. Menuju penghapusan paternalisme dan pelembagaan suatu kebijakan perburuhan yang lebih liberal berdasarkan kesukarelaan.

edi cahyono's LIBRARY

# BAB I

# SEJARAH SINGKAT GERAKAN SERIKAT BURUH INDONESIA

Sejarah gerakan serikat buruh Indonesia dapat dibagi dalam dua periode, yaitu periode selama Rezim Kolonial Belanda, dan periode setelah proklamasi Republik Indonesia, pada 17 Agustus, 1945. Tiga setengah tahun pendudukan militer Jepang, dari Febrarui, 1942 hingga Agustus, 1945, dapat digabungkan pada Periode Kolonial.

Baru tercatat pada tahun 1905, gerakan serikat buruh Indonesia dapat dianggap sangat muda. Namun begitu, ia lebih tua dari rekan-rekan imbangannya di negeri-negeri Asia Tengara lainnya.[1] Selama Periode Kolonial, jika diperhitungkan besaran kependudukan dan jumlah orang yang dipekerjakan dengan berpenghasilan, maka gerakan itu agak kecil. Sesungguhnya, gerakan serikat buruh pra-Kemerdekaan secara keseluruhan tidaklah sangat kuat. Namun, permunculannya pada periode tenang

[1] a) "Gerakan serikat buruh pertama Malaya muncul pada akhir Perang Dunia II..." J. Norman Parmer, *Trade Unions in Malaya*, hlm. 142.

b) "Tak lama setelah gangguan-gangguan ini (setelah 1932), Pemerintah mengijinkan pengorgan isasian serikat buruh pertama." Internationl Coopration Administration, *Summary of the Labor Situation in Thailand*, hlm. 5.

c) "Baru setelah 1938, manakala Partai Thakin mulai mengorganisasi tenaga kera sebagai satu bagian dari kampanye anti-Inggris..." International Cooperation Administration, *Summary of the Labor Situation in Burma*, hlm. 10.

d)."Organisasi-organisasi kaum pekerja Vietnam telah ada sejak tahun 1930...." International Cooperation Administration, *Summary of the Labor Situation in the Republic of Vietnam*, hlm. 6.

suatu lingkungan kolonial dan di bawah suatu kekuasan yang puas dengan dirinya sendiri namun kaku, dan kemudian segera menjadi terlibat dalam serangkaian pengalaman menakjubkan, gerakan yang masih muda itu menimbulkan suatu kehebohan besar.

## Periode Kolonial[2]

Ruang waktu ini, dari 1905 hingga Februari, 1942, dan disusul oleh tiga setengah tahun masa peralihan pemerintahan Jepang, dapat dibagi lagi menjadi tiga periode lebih-pendek, yaitu: waktu dari 1905 hingga 1926-1927, kemudian dari 1927 hingga 1942, dan akhirnya, periode Jepang itu.

### Periode dari 1905 hingga 1926-1927

Ini merupakan periode organisasi dini, dikarakterisasi oleh kehati-hatian, beberapa keragu-raguan dan kesabaran. Namun, setelah beberapa tahun, gerakan yang baru lahir ini menjadi sadar akan kekuatan dan kemampuan-kemampuannya; kehati-hatian dan kesabarannya digantikan oleh kenekadan dan radikalisme. Perubahan itu terutama merupakan hasil dari propaganda sosialis dan komunis, tetapi ia juga ditimbulkan oleh sikap kaku di satu pihak dari para majikan Belanda yang menjalankan seluruh

[2] Untuk bagian sejarah gerakan serikat buruh Indonesia ini, pengarang telah menggunakan informasi yang diberikan dalam karya-karya berikut ini:

1. J.T. Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie*, 1931, hlm. 129-50 dan hlm. 360-374.
2. J. W. Pluvier, *Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesie in de Jaren 1930 tot 1942*, 1953, hlm. 155-161.
3. A.K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, 1950, hlm.27-29, 98-106 dan 172-183.
4. D.N. Aidit, *Sedjarah Gerakan Buru Indonesia*, 1952, hlm. 36-64.
5. Tulisan-tulisan oleh Chronos dalam *Tindjauan Masalah Perburuhan* bulan Juli 1948, No. 4, hlm. 56-60; dan oleh Sandra dalam nomor-nomor Juli 1954, hlm. 7-13, dan Agustus 1954, hlm. 3-10.

Mukadimah Konstitusi SOBSI, SARBUPRI, SBG, PERBUM, SBPP dan SEBDA.

perekonomian negeri itu, dan di pihak lain, dari Pemerintah Kolonial yang tidak siap untuk menghadapi suatu gerakan seperti itu.

Kerja upahan telah diberlakukan di Indonesia sedini tahun 1870[3] Baru pada awal abad ke duapuluh kaum buruh Indonesia mencapai kedudukan dimana mereka dapat melahirkan suatu gerakan terorganisasi, yang bertujuan memajukan standar hidup mereka, dan, -pada umumnya, pada emansipasi kelas pekerja Indonesia yang bebas.

Ini tampaknya disebabkan oleh tersebar luasnya buta-huruf dan tingkat pendidikan yang rendah di kalangan kaum buruh, kelangkaan para tukang ahli dan kaum buruh trampil lainnya, dan kekurangan para pemimpin serikat buruh yang berkemampuan. Namun, tibanya gerakan yang terlambat secara pasti juga dikarenakan sikap bermusuhan dari kebijakan kolonial ketika itu terhadap semua jenis kegiatan bersama yang mungkin dimulai oleh penduduk

[3] Hingga pertengahan abad ke sembilanbelas, eksploitasi sumber-sumber alam Indonesia merupakan monopoli Pemerintah Belanda. Menurut yang disebut *Culturstelsel (Sistem Bumi Daya*), penduduk Indonesia dipaksa membudidayakan kopi, teh, tembako dan tanaman-tanaman lain di atas tanah mereka atau di atas tanah-tanah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan kemudian menyerahkan seluruh panen kepada Pemerintah. Pada paruh kedua abad itu, karena hasil-hasil yang tidak memuaskan di dalam produksi, karena meningkatnya kritik terhadap sistem itu, dan karena tekanan dari dunia bisnis di Holland, Pemerintah Belanda beralih pada penghapusan berangsur-angsur Culturstelsel itu. Pada tashun 1870, yang disebut Undang-undang Agraria telah disahkan, disusul oileh undang-undang lain yang membuka pintu Hindia Belanda bagi para investor. Zaman *politik pintu terbuka* dimulai, dan kapital swasta Belanda, Inggris, Belgia, Amerika dan swasta asing lainnya mengalir ke negeri ini. "Setelah seluruh wilayah ... dibuka bagi kapital Barat pada tahun 1870 ... jumlah perusahaan Barat meningkat dengan sangat mengejutkan ..." (A.D.A, de Kat Angelino, *Colonial Policy*, jilid II, hlm. 498). Perkebunan-perkebunan, perkebunan tebu, pabrik gula, penyulingan minyak bumi, pertambangan, pabrik-pabrik, jalanan kereta api, dsb. mulai beroperasi, dengan mempekerjakan ratusan ribu kaum buruh pribumi. Demikian, untuk pertama kalinya, suatu jumlah besar orang Indonesia ditarik dari kehidupan pedesaan untuk menjadi berkenalan/terbiasa dengan keuntungan dan kesukaran suatu pengalaman baru sebagai orang yang diupah, dan "masalah perburuhan menjadi sesuatu keadaan yang mendesak." (De Kat Anglino, *Ibid*.).

pribumi. Sebagai kenyataan, baru pada permulaan abad sekarang undang-undang yang melarang kebebasan untuk berhimpun dan berkumpul telah dibatalkan.[4]

Organisasi kaum pekerja upahan pertama yang dikenal di Indonesia telah dibentuk pada tahun 1894 oleh para guru sekolah dasar dan menengah Belanda. Asosiasi para guru ini –nama Belandanya ialah *Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap*, disingkat NIOG – mempertahankan sifat khusus Belandanya, dan karena itu, tidak pernah memainkan suatu peranan penting di dalam gerakan kaum buruh di Indonesia. Dengan dikeluarkannya para guru Belanda dari sekolah-sekolah publik setelah berdirinya Republik, NIOG menjadi suatu serikat para guru yang kecil di sejumlah sekolah swasta Belanda. Ia masih ada hingga sekarang. Pada tahun 1956 ia terdaftar pada Kementerian Perburuhan sebagai mempunyai 6 cabang dan suatu jumlah keanggotaan dari 320 individu.[5]

Pada tahun 1905, pegawai Keret-api Negara mendirikan *SS Bond*, yang berarti: Serikat Personel Keret-api Negara.[6] Serikat itu mencakup pengawai Belanda maupun Indonesia di antara anggotanya, tetapi para pemimpinnya kesemuanya orang Belanda. Serikat itu kuat dan terorganisasi baik; ia mempunyai suatu pandangan yang agak konservatif, sekali pun kadang kala ia terjerumus dalam kesulitan dengan pelaksana yang bahkan lebih konservastif dari Perkereta-apian Negara.[7] *SS Bond* tidak pernah

[4] Pasal III dari *Regeeringsreglement* (Undang-undang Pengaturan Pemerintah Hindia Belanda) tahun 1854 melarang perhimpunan dan rapat-rapat yang mempunyai suatu sifat politik dan yang dianggap sebagai berbahaya bagi ketertiban umum. Pada tahun 1915 ketentuan itu dibuat lebih luwes, tetapi baru pada tahun 1919 undang-undang memberikan kebebasan pada penduduk Indonesia untuk mendirikan asosiasi-asosiasi tanpa memerlukan suatu ijin istimewa di muka, *vide Indische Staatsregeling* (Reglement of the Government of the Netherlands Indies) Pasal 165 *juncto Staatsblad* (Kitab Perundang-undangan) 1919 No. 27.

[5] Djawatan Hubungan Perburuhan, Kementerian Perburuhan, *Serikat Buruh Jang Terakhir*, hlm. 67.

[6] SS merupakan singkatan dari *Staatsspoorwegen* (Perkereta-apian Negara).

[7] Hubungan asli yang sangat baik sekali antara *SS Bond* dan Pelaksana Perkereta-apian Negara berubah setelah 1908. Pada tahun 1909 manajemen itu memutuskan sebuah

edi cahyono's LIBRARY

berkembang menjadi suatu organisasi kaum buruh yang militan, dan mengakhiri karirnya yang tidak menghebohkan pada tahun 1919 tanpa mampu mempertahankan persaingan dengan serikat kaum buruh kereta api lain yang lebih baru.

Situasinya ialah bahwa banyak pegawai kereta api memandang dengan pengabaian atau bahkan penyesalan pada *SS Bond*, karena keterbatasannya pada Perkereta-apian Negara dan kenyataan bahwa kebanyakan dari anggotanya terdiri dari personel lebih tinggi dan kepemimpinannya adalah sepenuhnya Belanda. Pada tahun 1908, wakil-wakil kaum buruh yang bekerja di Perkereta-apian Negara maupun di berbagai perusahaan kereta-api dan tram yang dimiliki swasta, berkumpul di Semarang (Jawa Tengah) dan memproklamasikan kelahiran sebuah perserikatan baru, *Vereeniging van Spoor- en Tramweg Personeel in Nederlandsch-Indie* (VSTP). Perserikatan baru itu dibangun atas suatu landasan yang lebih luas; tidak saja karena ia terdiri dari perkereta-apian yang dimiliki oleh negara dan yang dioperasikan oleh swasta, namun juga karena ia bertekad untuk mengorganisasi semua buruh kereta-api tanpa perbedaan ras, jenis pekerjaan, kedudukan di dalam dinas Negara atau di dalam perusahaan. Tampaknya menjadi maksud para perancang organisasi itu untuk meletakkan tekanan dan pusat kekuatan lebih pada *sang pelaku* (operatif), pekerja tangan dan teknik daripada pada *non-pelaku* (non-ops), para pegawai krah putih dan yang lebih tinggi. Demikianlah, jalannya telah diratakan bagi sebuah organisasi massa yang militan.

VSTP memang menjadi sebuah serikat buruh yang militan dan agresif; teristimwa setelah tahun 1913, manakala kaum sosialis menjadi lebih unggul di dalam kepemimpinan. Sifat militan serikat buruh itu tidak muncul dari Anggaran Dasarnya (Konstitusi). Konstitusi ini[8] yang hanya terdiri atas tujuh pasal, menyatakan dalam Pasal 2 tujuan dari VSTP sebagai: memajukan kepentingtan

hubungan dengan perserikatan itu.

[8] Anggaran Dasar VSTP dimuat di dalam *Javasche Courant* (Lembaran Negara Pemerintah Hindia Belanda) 19 Februari, 1909, No. 14.

material dan spiritual para anggotanya. Tiada apapun yang dimuat di dalam Konstitusi ini tentang azas-azas, tentang aspirasi-aspirasi politik dan sejenisnya, persoalan-persoalan yang begitu karakteristik dari serikat-serikat buruh Indonesia masa kini. Tetapi, sudah tentu, tidak mungkin bagi para pendiri VSTP untuk merancang sebuah konstitusi *politik* atau sosialistik, karena anggaran dasar itu mesti diajukan kepada Gubernur-Jendral untuk mendapat persetujuan.[9] Bahkan anggaran dasar VSTP yang *murni* ini mesti terlebih dulu dipelajari secara tuntas oleh para pembesar yang semestinya sebelum persetujuan dapat diberikan oleh Gubernur-Jendral.

Pada waktu pembentukannya, Presiden dan Sekretaris VSTP adalah dua orang sosialis Belanda, yaitu *C.J. Huishoff* dan *H.W. Dekker*,[10] sedang beberapa kedudukan lain di dalam komite eksekutif dipegang oleh orang-orang Indonesia. Setelah 1913, kaum sosialis sayap-kiri (komunis) mendominasi kepemimpinan serikat buruh itu. Komunis Belanda *Sneevliet*[11] menjadi Presiden VSTP bersama

[9] Sekali pun hal itu tidak secara ketat dituntut oleh undang-undang, pada waktu itu asosiasi-asosiasi yang baru didirikan lazimnya meminta persetujuan dari Gubernur-Jendral. Akibat persetujuan seperti itu ialah bahwa asosiasi memerlukan status suatu person hukum dengan kelebihan-kelebihan yang terkait pada kedudukan itu. Kekurangannya ialah bahwa anggaran dasar asosiasi itu, sebelum disetujui, menjadi sasaran penelitian cermat para pegawai sipil kolonial yang penuh kecurigaan. Persetujuan oleh Gubernur-Jendral untuk maksud pengaruh hukum yang dimaksudkan tidak ada hubungan apapun dengan *ijin* yang dipersyaratkan bagi pendirian asosiasi-asosiasi (lihat halaman 3-4, catatan kaki 4).

[10] Kedua nama ini dimuat di dalam *Javasche Courant*, 19 Februari, 1909 tersebut, No. 14 (hlm. 5, catatan kaki 5)

[11] H.J.F.M. Sneevliet datang ke Jawa dalam tahun 1913 sebagai sekretaris sebuah asosiasi para saudagar di Semarang.. Sebelum imigrasinya ke Indonesia ia adalah seorang pemimpin dari Partai Sosialis Revolusioner di Holland dan kemudian dari Partai Sosial-Demokrat Belanda (SDAP). Setelah pengusirannya dari Indonesia pada bulan Desember 1918, Sneevliet pergi ke Rusia dan Tiongkok di mana ia terlibat dalam sejumlah kegiatan revolusioner dengan memakai sebuah nama samaran. Belakangan ia kembali ke Holland, menjadi aktif dalam Partai Komunis Belanda dan mewakili Partai ini di dalam Parlemen. Ia juga ketua dari Sekretariat Perburuhan Nasional (Belanda). Karena penyimpangan-penyimpangan kekiriannya Partai Komunis Belanda kemudian memutuskan perhubungannya dengan Sneevliet. Ketika kaum Nazi menyerbu Negeri-

*Semaun*, seorang revolusioner Indonesia muda, sebagai murid dan seorang tangan-kanannya.[12] Kemudian Semaun menjadi Presiden dan Sneevliet Sekretaris dari Kemudian Sermaun menjadi Presiden dan Sneevliet Sekretaris dari Serikat Buruh itu.

Demikian, VSTP, yang didirikan pada 14 November, 1908, merupakan serikat buruh pertama dengan orang-orang Indonesia di dalam kepemimpinannya dan dengan kaum buruh Indonesia sebagai mayoritas keanggotaannya yang besar sekali.

Pegawai Indonesia dari dinas-dinas pemerintahan lainnya dari perusahaan-perusahaan milik-Pemerintah segera mengikuti contoh dari kaum buruh kereta api dalam mengusahakan perbaikan kondisi-kondisi kerja mereka melalui persatuan dan organisasi.

Pada 1 November, 1910, para pegawai Dinas Bea Cukai mengumumkan pembentuk *Bond van Ambtenaren bij de In- en Uitvoerrechten en Accijnzen in Nederlandsch-Indie*, juga dirujuk sebagai *Douanebond*. Pada awalnya, namanya adalah Belanda dan Presidennya seorang Belanda. Tetapi kemudian serikat buruh itu mengadopsi sebuah nama Indonesia: yaitu, *Perhimpunan Bumiputera Pabean*. Menurut Anggaran dasarnya[13] Douane-bond mempunyai sebagai sasarannya: perbaikan kepentingan korps pegawai Jawatan Bea Cukai (Pabean) dan kepentingan Jawatan itu sendiri; pembentukan suatu perhimpunan yang kuat di antara para anggotanya; penyebaran pengetahuan mengenai Kepabeanan di kalangan para anggota.

Pada tahun 1912, para guru Indonesia dari sekolah-sekolah publik

negeri Rendah pada tahun 1940, Sneevliet segera ditangkap dan dieksekusi oleh orang-orang Jerman. Nama Sneevliet akan selamanya terkait dengan sejarah Indonesia sebagai orang yang memperkenalkan sosialisme dan komunisme revolusioner, sebagai orang yang "mulai membawa kesadaran sosialis pada para pemimpin Indonesia" (D.N.Aidit, *Sedjarah Gerakan Buruh Indonesia*, hlm. 38).. D.N. Aidit kini adalah Sekretaris Jendral Partai Komunis Indonesia . Lebih banyak informasi mengenai Sneevliet dapat dijumpai dalam D.M.G Koch, *Verantwoording* (sebuah otobiografi), hlm. 76, 87, 89-90).

[12] Semaun kemudian menjadi Komunis Indonesia yang pertama.

[13] Anggaran Dasar yang diumumkan di dalam *Javasche Courant* 28 April, 1911, No. 34.

membentuk *Perserikatan Guru Hindia Belanda* (PGHB)[14] segera disusul oleh Asosiasi Guru dari Sekolah-sekolah Desa, yaitu *Perhimpunan Guru Bantu* atau PGB.

Pada tahun tahun 1915, *Opiumregiebond* dibentuk oleh para pegawai pabrik Opium di Jakarta (ketika itu Batavia) dan dari kantor-kantor distribusi opium di seluruh negeri.[15]

*Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera* (PPPB), yaitu Perserikatan Pegawai Rumah Pegadaian Indonesia, telah didirikan pada tahun 1916. Dari awalnya perserikatan ini sepenuhnya dalam tangan orang Indonesia. Presiden perserikatan itu ialah *R. Sosrokardono* yang militan.[16]

Juga pada tahun 1916 telah didirikan *Vereeniging Inlandsch Personeel Burgelijke Openbare Werken*, (VIP-BOW), Perhimpunan Pegawai Pekerjaan Umum Sipil Indonesia.[17]

Para pegawai Pemerintah lainnya mendirikan organisasi-organisasi serupa. Jenis perkembangan ini membuktikan kepemimpinan dan panduan yang diberikan oleh para pegawai Pemerintah di dalam pendirian dan pertumbuhan asli gerakan serikat buruh Indonesia. Gejala ini tidak aneh karena di Hindia Belanda nyaris semua kaum intelektual Indonesia dipekerjakan oleh Pemerintah.

Namun segera, para pengawai perusahaan swasta, baik pekerja krah putih maupun pekerja kasar, mengikuti jejak para pegawai Pemerintah.

Pada tahun 1919, para pegawai Indonesia dari pabrik-pabrik gula di wilayah Yogyakarta (Jawa Tengah) mengorganisasi diri mereka dalam *Personeel Fabrieks Bond* (PFB) atau Perserikatan Personel

[14] *Javasche Courant*, 31 Desember, 1912.
[15] *Javasche Courant*, 21 Janurari, 1916. Produksi dan distribusi opium merupakan bisnis dan monopoli Pemerintah Kolonial.
[16] *Javasche Courant*, 17 November, 1916. Rumah-rumah Pegadaian, suatu monopoli dari Pemerintah Hindia Belanda, merupakan lembaga-lembaga untuk memberikan pinjaman-pinjaman kecil kepada penduduk. Rumah-rumah pegadaian dijumpai di setiap kota besar dan kecil di seluruh negeri.
[17] *Javasche Courant*, 23 Februari, 1917.

edi cahyono's
LIBRARY

Pabrik. Di bawah kepemimpinan yang bersemangat dari *R.M. Suryopranoto*, PFB segera berkembang kepada pabrik-pabrik gula lainnya di Jawa. Pada waktu itu terdapat kira-kira seratus pabrik gula di Jawa.

Perserikatan-perserikatan lain, yang segera terbentuk di sektor ekonomi swasta, adalah *Serikat Buruh Onderneming* (SBO), yang merupakan perserikatan pertama dari para pengawai perkebunan, yang didirikan pada tahun 1924,[18] *Serikat Sekerdja Pelabuhan dan Pelajaran* (perserikatan buruh pelabuhan dan pelaut), didirikan pada tahun 1924[19] yang segera menjadi *Serikat Buruh Pelabuhan dan Laut*; dan selanjutnya, serikat-serikat butruh buruh pertambangan, buruh metal, percetakan, buruh listrik, pegawai dalam industri-minyak, sopir, buruh penjahit dan busana, dsb. Menjelang tahun 1920 sudah terdapat kira-kira seratus serikat buruh dengan jumlah keanggotaan hampir 100.000 buruh.

Serikat buruh terbesar, yang paling penting dan paling militan adalah dan tetap VSTP yang, di bawah kepemimpinan Semaun, terus-menerus terlibat di dalam agitasi sosialis dan dalam membela hak-hak dan memajukan kondisi-kondisi kaum buruh kereta-api.

Pengaruh gagasan-gagasan sosialis pada VSTP sudah terbukti dini sekali karena para pendiri dan pemimpin serikat buruh itu selalu sosialis dan komunis (Dekker, Sneevliet, Semaun dan lain-lainnya). Pada tahun 1914, kaum sosialis yang memimpin VSTP, bersama dengan kaum kiri lainnya seperti *A.Baars*, *P. Bergsma*, *R. Darsono*, *Brandsteder* dan juga sejumlah kaum sosialis modern, seperti *P.F. Dahler*, mendirikan partai sosialis pertama di Indonesia, yaitu *Indisch Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV). Sejak awal, kaum sosialis atau komunis sayap-kiri dalam ISDV unggul di dalam partai itu. Demikianlah, dengan Partai ini sebagai *Staf Umum* atau *Barisan Depan*, dan VSTP sebagai organisasi massa atau

[18] *Peraturan Dasar SARBUPRI*, 1956, hlm.. 15. Menuruut. *Ahem Erningpradja*, pemimpin terkenal dari kaum buruh perkebunan, SBO telah didirikan pada tahun 1922 (*Tindjauan Masalah Poerburuhan*, Juni 1950, hlm. 29).

[19] Lihat tulisan Sandra dalam *Tindjauan Masalah Perburuhan*, Juli 1955, hlm., 27.

*tentara besar*, sosialisme dan komunisme revolusioner sudah dipropagandakan di Indonesia sebelum atau pada awal Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1917, kaum sosialis moderat mengundurkan diri dari ISDV dan mendirikan *Indisch Sociaal-Democratische Partij* (ISDP). ISDV kini menjadi monopoli kaum sayap-kiri. Semaun *cum sui* segera setuju menamakan diri mereka sendiri secara resmi *komunis.* Demikianlah, pada 23 Mei, 1920, nama ISDV ditransformasi menjadi *Partai Komunis Indonesia* (PKI), seksi dari *Communist International* (Comintern), dengan Semaun sebagai Presiden. Pemimpin-pemimpin PKI lainnya adalah *Tan Malaka*, *Alimin*, *R. Darsono*, *Musso*, *Ali Archam*, *Dengah* dan *Soegono*.

Baik di bidang politik maupun dalam gerakan serikat buruh kekuasaan kaum sosialis revolusioner dan kaum komunis ditantang oleh sebuah partai politik lain, yaitu *Sarekat Islam* (SI) atau Asosiasi Islam. Di dalam SI, suatu perpaduan ajaran-ajaran Islam, nasionalisme dan ide-ide sosialis merupakan azas-azas dasarnya. Para pimpinan tertinggi dan mayoritas keanggotaannya menentang komunisme. SI, yang didirikan pada tahun 1911, segera berkembang menjadi suatu gerakan politik kerakyatan. Di dalam beberapa tahun keanggotaan SI berjumlah lebih dari satusetengah juta orang, tersebar di kepulauan Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Para pemimpin tertinggi SI adalah *H.O.S. Tjokroaminoto*, *Abdul Muis*, *H.A. Salim*, *R. Sosrokardono* dan lain-lainnya. Semaun, yang kemudian menjadi pemimpin ISDV dan Partai Komunis, pada mulanya juga berafiliasi dengan Sarekat Islam. Ia mempunyai banyak sekali pengikut dalam pangsa-pangsa SI tertentu, menjadi ketua dari cabang SI Semarang, dan kemudian berhasil mengubah kelompok-kelompok penting dari SI ke dalam komunisme.

Dalam gerakan serikat buruh, SI berhasil dalam mendapatkan kepercayaan *Personeels Fabrieks Bond* (PFB), *Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera* (PPPB) dan sejumlah perserikatan lainnya dari para pegawai Pemerintah.

Para pemmpin sosialis (komunis) dan Serikat Islam segera mengakui

edi cahyono's
LIBRARY

pentingnya bersatunya gerakan serikat buruh menjadi satu federasi tunggal. Usaha pertama untuk membentuk sebuah federasi serikat-serikat buruh dilakukan oleh ISDV pada tahun 1916. Platformnya ialah: perjuangan terhadap kaum kapitalis dengan pemogokan sebagai alat utama. Usaha ini tidak membawa hasil. Dalam tahun yang sama, Semaun, sebagai Presiden VSTP, mengirim sebuah pesan kepada semua serikat buruh yang di dalamnya ia mengajukan saranan untuk menjadikan VSTP perwakilan dari semua serikat buruh. Usaha kedua ini juga, tidak berhasil. Pada tahun 1918, VSTP mengorganisasi sebuah konferensi serikat-serikat buruh. Hasilnya ialah terbentuknya sebuah *komite sentral* yang bertindak atas nama serikat-serikat buruh yang diwakili dalam konferensi itu. Namun, sebuah konferensi kedua, yang kemudian berkumpul pada tahun yang sama, hanya dihadiri oleh VSTP dan PPPB (pegawai pegadaian).

Lebih berhasil adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Suryopranoto dan Sosrokardono, dua pemimpin serikat buruh yang tersebut di muka dalam Bab ini, yang juga anggota-anggota yang setia dari Sarekat Islam. Setelah delapan bulan persiapan, kedua pemimpin ini menyelenggarakan sebuah konferensi serikat-serikat buruh dalam bulan Desember 1919. Sarekat Islam dan ISDV juga mengirim delegasi-delegasi ke rapat yang dihadiri oleh para wakil hampir semua serikat buruh yang ada. Demikianlah, federasi pertama didirikan; nama yang disetujui ialah *Persatuan Pergerakan Kaum Buruh* (PPKB) atau Federasi Serikat-serikat Buruh.

Pada bulan Agustus 1920, federasi yang baru lahir itu mengadakan Kongresnya yang Pertama di Semarang, pusat dari gerakan komunis. Selama seluruh konvensi itu kaum komunis dan orang-orang Sarekat Islam terus-menerus berselisih mengenai azas-azas dasar. Kongres itu memilih sebuah komite eksekutif terdiri atas tujuh anggota. Semaun dipilih sebagai Presiden, Suryopranoto dan H.A. Salim sebagai Wakil-Presiden dan Sekretaris. Namun, markas besar Federasi itu mesti dipindahkan dari Semarang yang didominasi-

komunis ke Yogyakarta yang nasionalistik. Sementara itu, melalui Semaun dan VSTP, kaum komunis dapat mengerahkan pengaruh yang semakin besar di dalam Federasi itu.

Selama Kongres Kedua pada bulan Juni 1921, perbedaan pendapat di antrara kaum komunis dan unsur-unsur Sarekat Islam di dalam Federasi itu tidak dapat diredahkan. Sebaliknya, ia berkembang menjadi suatu perpecahan lengkap. Semaun dan para pengikutnya mundur dari komite eksekutif itu dan, sambil menangguhkan konvensi, memproklamasikan pendirian sebuah pusat baru, yang disebut *Revolutionary Trade Union Central* (Pusat Serikat Buruh Revolusioner). Empatbelas serikat buruh, yaitu VSTP dan bagian besar serikat buruh dalam perusahaan-perusahaan swasta, bergabung pada organisasi baru itu, sedangkan *Personeels Pabrieks Bond*, para pegawai rumah pegadaian (PPPB), sejumlah serikat buruh guru, pegawai pekerjaan umum (VIP-BOW), dan bagian besar serikat buruh pegawai Pemerintah lainnya tetap setia pada Federasi lama itu.

Pada bulan September 1922, dua gerakan serikat buruh itu lebur kembali, terutama melalui usaha Semaun sendiri. Nama gerakan yang dipersatukan itu ialah *Persatuan Vakbonden Hindia*, disingkat *PVH*. Nama itu berarti: Federasi Serikat-serikat Buruh Indonesia. Semaun dan para pengikutnya kembali berhasil dalam memperleh pengaruh yang besar di dalam Federasi baru itu.

Mari kita mengikuti beberapa kegiatan serikat-serikat buruh periode ini.

Dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama gerakan serikat-serikat buruh Indonesia ditantang oleh suatu keadaan ekonomi yang kontroversial. Seperti diketahui, Indonesia, seperti Holland di Eropa, tidak secara langsung terlibat di dalam perang itu. Periode segera setelah perang itu ditandai oleh suatu permintaan yang luarbiasa besarnya dari negeri-negeri Eropa akan bahan-bahan yang diproduksi oleh Indonesia. Demikianlah, para pemilik perkebunan, para produsen gula, pengusaha pertambangan, para eksportir, dan pengusaha-pengusaha Belanda lainnya mempunyai

edi cahyono's
LIBRARY

masa yang menguntungkan. Sementara itu, barang-barang konsumsi seperti tekstil, bahan makanan tertentu, kimia, barang mewah, dan juga bahan-bahan bangunan, peralatan, dan komoditi lainnya, yang diperlukan oleh penduduk, yang mesti diimpor dari Holland dan negeri-negeri lain, meningkat dalam harga. Para orang Indonesia yang penghasilannya berupa upah, yang dibayar di bawah harga, bangkit memprotes. Kegoncangan buruh menyusul. Pemogokan dan ancaman pemogokan menandai tahun-tahun dari 1920 hingga 1923.

Pemogokan besar pertama terjadi pada tahun 1920 di dalam industri gula yang aksinya ditindas sejak paling awal oleh Pemerintah. Pada bulan Maret 1920, *Personeels Pabrieks Bond* mengajukan tuntutan-tuntutan bagi suatu kenaikan upah yang berarti kepada Sindikat Gula, organisasi para produsen gula. Para majikan/pengusaha, sambil meraup keuntungan-keuntungan yang luar biasa besarnya, menolak memenuhi tuntutan-tuntutan itu. Pada bulan Agustus 1920 PFB mengumumkan bahwa mereka siap melancarkan pemogokan di semua perkebunan tebu dan pabrik gula. Para pengusaha (Belanda) meminta bantuan Pemerintah berdasarkan motif-motif politik, yang tujuan akhirnya ialah penumbangan Pemerintah Hindia Belanda! Sementara itu, sepenuhnya bertentangan dengan penalaran yang dinyatakan oleh perintah itu, Pemerintah menasehati para pengusaha/majikan agar melakukan sesuatu untuk meringankan kesukaran-kesukaran para buruh gula. Demikian aksi-pemogokan merupakan satu kegagalan, dan konsesi-konsesi yang diberikan oleh para produsen gula menjadi tidak berarti.

Sektor-sektor lain dari industri kaum buruh juga menuntut upah yang lebih tinggi. Di mana para pengusaha tidak menjawab secara memuaskan, serikat-serikat buruh mengancam akan melakukan pemogokan. Dalam banyak kejadian, pemogokan-pemogokan telah terjadi. Misalnya, pada bulan Agustus 1921 pekerjaan di pelabuhan besar Surabaya (Jawa Timur) dilumpuhkan, dengan demikian menimbulkan kerusakan besar pada industri-industri milik-Belanda

di bagian penting negeri.

Suatu konflik besar lainnya terjadi pada bulan Januari 1922 di rumah-rumah pegadaian Pemerintah, sekali pun pemogokan ini tidak secara langsung berkaitan dengan tuntutan-tuntutan upah. Aksi perserikatan para pegawai rumah-rumah pegadaian merupakan akibat sikap congkak seorang Belanda pelaksana sebuah rumah pegadaian terhadap pegawai Indonesia. Lebih dari seribu pegawai melakukan aksi *walk out* sebagai protes. Pemerintah menjawab dengan memecat semua pemogok. VSTP dan Pusat Merah mengorganisasi suatu kampanye untuk mendukung para pemogok secara finansial. Tetapi Pemerintah bertekad untuk menghancurkan seluruh aksi itu. Kedua pemimpin komunis, *Tan Malaka* dan *P. Bergsma*, yang aktif dalam mendukung para pemogok, ditangkap dan dibuang dari negeri itu. Demikianlah, pemogokan para pegawai rumah pegadaian hancur.

Pada tahun 1923 kegoncangan perburuhan baru dan yang meluas mengganggu negeri. Sebabnya adalah sebuah keputusan dari Pemerintah Hindia Belanda untuk memotong gajih para pegawai sivil dan dari pegawai perusahaan-perusahaan milik-Pemerintah. Tahun 1922 telah menjadi awal dari suatu periode depresi ekonomi, dan Pemerintah telah berusaha menghadapi krisis ini dengan, antara lain, memangkas pengeluaran-pengeluarannya.

Berbagai perserikatan pegawai Pemerintah digelisahkan oleh maksud-maksud Pemerintah. Rapat-rapat anggota dan konferensi-konferensi antar-perserikatan diselenggarakan untuk mendiskusikan persoalan itu. Banyak pemimpin perserikatan menganjurkan penggunaan senjata mogok.

Selama Kongres *Persatuan Vakbonden Hindia* (Federasi itu) pada bulan Desember 1922 kemungkinan akan suatu pemogokan umum telah menjadi topik utama. Semangat melambung-lambung tinggi. Pada bulan Januari 1923, VSTP mengirimkan sebuah sirkuler kepada semua perserikatan di mana mereka didesak untuk menjawab tindakan-tindakan Pemerintah dengan satu pemogokan umum. Namun, reaksi serikat-serikat buruh terlalu lamban bagi

edi cahyono's
LIBRARY

Semaun. Demiukianlah ia memutuskan untuk bertindak atas kewenangan dirinya sendiri, dengan bersandar pada kekuatan serikat buruh kereta api. Ia mengeluarkan sebuah peringatan kepada manajemen perusahaan kereta-api agar mereka *jangan bermain dengan api.* Pada bulan April, Semaun meminta diadakannya suatu konferensi dengan manajemen Kerta Api Negara. Pada pertemuan itu Semaun memberikan penjelasan mengenai keberatan-keberatan VSTP dan dari serikat-serikat buruh lainnya terhadap tindakan-tindakan yang diumumkan itu. Namun, manajemen Kereta Api Negara tidak menemukan alasan untuk memenuhi harapan atau keluhan perserikatan-perserikatan itu. Dalam kenyataan, Pemerintah berketetapan untuk mengakhiri kegiatan-kegiatan perserikatan-perserikatan itu dan, untuk maksud itu, memancing suatu bentrokan. Bahkan suatu saran dari Semaun yang menyerukan disusunnya suatu prosedur keluhan dengan suatu sistem arbitrase tidak dapat diterima oleh Direktur Kereta Api Negara.

Semaun *cum sui* tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyerahkan kasus itu kepada para anggota biasa yang berarti bahwa suatu pemogokan sedang mendekat.

Dalam sebuah rapat VSTP pada 6 Mei 1923, Semaun menyarankan bahwa pemogokan itu mesti dimulai segera setelah salah seorang dari para pemimpin VSTP ditangkap oleh polisi, suatu aksi dari pihak Pemerintah yang telah diantisipasikan perserikatan. Pemerintah tampaknya mengetahui tentang rencana-rencana ini. Dua hari kemudian Semaun sendiri ditangkap. Seketika komite eksekutif VSTP mulai beraksi dan mengumumkan pemogokan itu. Beribu pegawai dari Kereta Api Negara dan semua perusahaan kereta api lainnya di Jawa tidak masuk bekerja, melumpuhkan seluruh sistem transportasi. Namun Pemerintah melakukan tindakan-tindakan drastik. Para pemimpin pemogokan segera ditangkap dan para pemogok sendiri diancam dengan pemecatan. Selanjutnya, perserikatan dilarang mengadakan rapat-rapat. Tambahan pula, setiap propaganda yang berpihak pada pemogokan

dinyatakan sebagai suatu tindakan kriminal. Tindakan-tindakan lain telah diambil untuk mencegah berkembangnya pemogokan itu ke jawatan-jawatan dan perusahaan-perusahaan lain, seperti pembatasan-pembatasan hak untuk mengadakan rapat-rapat di daerah-daerah tertentu yang tidak hanya berlaku pada kaum buruh kereta api.

Akibatnya tindakan-tindakan drastik ini ialah bahwa pemogokan itu hancur di dalam satu bulan.

Semaun sendiri, tanpa diadili, diberitahu bahwa ia mempunyai pilihan untuk dibuang ke sebuah kamp konsentrasi di sesuatu pulau yang jauh, atau seketika meninggalkan negeri. Demikian, Semaun meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Eropa. Ia bermukim di Holland untuk beberapa waktu lamanya, namun kemudian pergi ke Moskow.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah sehubungan dengan kebebasan berbicara dan hak untuk berkumpul dihadapi oleh kaum komunis dan rakyat pada umumnya dengan kekesalan yang semakin besar, segera berakibat kegiatan-kegiatan permusuhan. Partai Komunis, berkumpul dalam kongres pada bulan Desember 1924, menyusun sebuah rencana untuk konsolidasi dan memperkuat pengaruh-pengaruh komunis dalam serikat-serikat buru melalui pendirian inti dan sel-sel partai. Akibatnya ialah serangkaian pemogokan lokal di perusahaan-perusahaan vital sepanjang seluruh tahun 1925, dan agitasi terus-menerus di kalangan kaum buruh dan petani pada umumnya. Penciptaan sebuah sekretariat Serikat-serikat Buruh Merah Indonesisa, anggota *Profintern* di Moskow, dan disusun sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang disetujui pada konferensi Profintern di Kanton, Tiongkok, pada bulan Juni 1924. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kaum komunis Indonesia dengan gerakan revolusioner internasional.

Pemerintah Hindia Belanda siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Kegiatan-kegiatan serikat-serikat buruh itu dikenakan pembatasan-pembatasan ketat. Demikianlah PVH yang non-komunis secara sepenuhnya dilumpuhkan.

edi cahyono's
LIBRARY

Pada tahun 1926 keadaan sampai pada suatu bentrokan. Di seluruh Jawa dan di Sumatera Tengah Pemerintah secara tiba-tiba digelisahkan oleh tanda-tanda suatu perlawanan bersenjata. Pada bulan November 1926, sejumlah gerombolan orang Indonesia yang bersenjata menyerang bangunan-bangunan Pemerintahan, barak-barak militer dan pos-pos polisi di berbagai bagian Jawa, teristimewa di Jawa Barat; mereka membongkar jalanan kereta api, merusak jembatan-jembatan, memotong kawat telefon dan telegraf, membunuh pegawai sivil, Belanda maupun Indonesia, dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Pada bulan Januari tahun berikutnya gangguan-gangguan serupa terjadi di Sumatera Tengah. Pemerintah Belanda menghadapi situasi itu dengan menggunakan kesatuan-kesatuan besar Tentara Kolonial. Ratusan orang Indonesia telah terbunuh dalam aksi itu; beribu ditangkap dan dipenjara. Mereka yang dapat diadili dijatuhi hukuman dan digantung atau diberi hukuman-hukuman berat lainnya. Tetapi untuk bagian terbesar orang yang ditangkap tiada terdapat cukup bukti untuk diadili. Setelah setahun atau lebih banyak dari mereka dilepaskan, namun kira-kira seribu orang, lagi-lagi tanpa bukti, dibuang ke New Guinea dan dilempar ke dalam kamp konsentrasi yang terkenal buruk di Boven Digul di suau daerah rawa-rawa pulau yang sangat tidak bersahabat.

Pemerintah merujuk pada pemberontakan itu sebagai dipimpin atau diilhami oleh kaum komunis. Namun, dari ribuan yang dipenjarakan atau dibuang ke Boven Digul hanya satu bagian saja adalah orang-orang komunis. Banyak dari mereka adalah anggota organisasi-organisasi biasa atau orang-orang yang sepenuhnya tidak terlibat atau tidak terikat.

Untuk mencegah gangguan-gangguan serupa di masa depan, Pemerintah menyatakan dilarangnya Partai Komunis Indonesia dan semua organisasi lainnya yang dipengaruhi-komunis. Ini berarti bahwa tidak hanya Partai Komunis yang dilarang, melainkan juga serikat-serikat buruh dan organisasi-organisasi lain yang di dalam metode-kerja dan propaganda menggunakan azas-azas seperti

komunis atau semurninya sosialis. Akhirnya, pembatasan-pembatasan yang dipaksakan atas hak berkumpul, berhimpun, atas kebebasan pers dan kebebasan berbicara, menjadikan sulitnya atau nyaris mustahilnya setiap aktivitas revolusioner.

## Periode dari 1927 hingga 1942

Sekali pun ini mula-mula merupakan suatu periode kemunduran dan kesulitan-kesulitan, ia kemudian disusul dengan kemajuan berangsur dalam pengorganisasian. Banyak serikat buruh yakin bahwa, untuk bertahan hidup, mereka mesti menyesuaikan diri mereka dengan keadaan. Mereka mesti menahan diri dari metode-metode dan aksi-aksi yang dapat mengingatkan para pembesar kolonial pada peristiwa-peristiwa sebelum tahun 1927.

Pada bulan Juli 1927, sejumlah pegawa kereta api membentuk sebuah perserikatan baru, *Perhimpunan Beambte Spoor dan Tram* (PBST), Perserikatan Pegawai Kereta Api dan Tram. Organisasi baru ini cukup berhasil. Ia mencapai jumlah anggota yang melebihi lima ribu orang di dalam beberapa bulan.

Secara khusus menarik adalah karya *Dr. R. Sutomo* di Surabaya, Jawa Timur. Nasionalis terkemuka ini, seorang humanis dan pekerja sosial, di samping kegiatan-kegiatannya dalam gerakan politik nasionalis, juga terlibat dalam mengorganisasi berbagai kelompok buruh industri, pegawai dalam perusahaan-perusahaan perdagangan dan pegawai sivil dari Pangkalan Angkatan Laut (Naval Establishment) menjadi serikat-serikat buruh sejati.

Berbagai perserikatan para pegawai Pemerintah yang telah didirikan sebelum tahun 1927, dan telah menderita di bawah tindakan-tindakan Pemerintah sebelum dan setelah pemberontakan 1926-1927 beransgur-angsur pulih dan mendapatkan kembali kekuatan dan prestise mereka. Misalnya, pada tahun 1927 berbagai perserikatan para guru bersatu dalam sebuah federasi.

Sekali pun perserikatan-perserikatan itu kini membatasi diri mereka pada promosi kondisi-kondisi kerja, partai-partai politik

edi cahyono's LIBRARY

tidak berhenti mengerahkan pengaruh mereka atas perserikatan-perserikatan itu. Kali ini itu merupakan suatu pertandingan di antara Sarekat Islam dan kaum nasionalis yang terorganisasi dalam sebuah partai politik baru, *Partai Nasional Indonesia* (PNI), yang didirikan dan dipimpin oleh *Dr. Soekarno* (yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia).

Di samping dua kelompok politik ini terdapat satu faktor politik ketiga, yaitu kaum komunis yang telah lolos dari razia menyusul pemberontakan 1926/1927 dan kini aktif dalam suatu gerakan bawah tanah (*PKI ilegal*, sebagaimana itu diungkapkan setelah Perang) atau dalam berbagai organisasi dengan label-label nasionalis. Dari waktu ke waktu Pemerintah Kolonial menggerebek organisasi-organisasi tertentu, menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai orang komunis, dan mengirim mereka ke Boven Digul di New Guinea. Misalnya, *Politieke Inlichtingendienst* (PID), yaitu badan intelijens politik Pemerintah Kolonial, telah untuk sekian lamanya curiga terhadap kegiatan-kegiatan *Sarekat Kaum Buruh Indonesia* (SKBI), yang didirikan pada bulan Juli 1928 di Surabaya sebagai sebuah federasi serikat-serikat buruh lokal. Organisasi itu menggunakan slogan-slogan nasionalistik dan melakukan propaganda nasionalistik. Namun, PID menerima laporan-laporan bahwa SKBI dalam kenyataan didirikan oleh kaum komunis dan bahwa ia mempertahankan hubungan-hubungan dengan Moskow. Organisasi itu segera berkembang ke daerah-daerah lain. Di Medan, Sumatera, sebua cabang dari SKBI didirikan dan dipimpin oleh *Iwa Kusuma Sumantri*, seorang pengacara yang baru saja kembali dari studinya di Holland. Pemerintah mengetahui bahwa, Iwa Kusuma Sumantri adalah seorang kiri dan bahwa ia juga telah belajar pada Eastern University di Moskow. Demikian, pada tahun 1928 Pemerintah menggerebek markas besar dan cabang-cabang lokal dari organisasi itu dan menangkap para pemimpinnya. Iwa Kusuma Sumantri dan sejumlah orang lain seketika dikirim/dibuang ke Boven Digul atau kamp-kamp konsentrasi lain, lagi-lagi tanpa diadili.

Pada bulan April 1930, sejumlah perserikatan pegawai Pemerintah

memutuskan untuk bekerja sama dalam sebuah federasi. Hasilnya ialah pembentukan *Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri* atau Federasi Perserikatan Pegawai Negeri, disingkat *PSPN*. Presidennya adalah *R.P. Soeroso*. Namun, *Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputera* (PPBB), perhimpunan para Pegawai Sivil yang tersohor, tetap berada di luar federasi ini.

Bulan berikutnya, perserikatan kaum buruh dalam perusahaan-perusahaan swasta di Jawa Timur bersambut pada seruan *Dr. Sutomo* dari Surabaya untuk berorganisasi dalam sebuah federasi perserikatan pegawai dalam sektor industri swasta. Demikian *Persatuan Sarekat Sekerdja Indonesia* (PSSI) telah dibentuk.

Setelah huruhara tahun 1926/1927, tiada yang terdengar lagi mengenai *Persatuan Vakbonden Hindia* (PVH), Federasi yang didirikan pada bulan September 1922. Karenanya, kedua federasi baru itu, PVPN dan PSSI, kini mengambil alih kepemimpinan gerakan serikat buruh dari tahun-tahun 1930-an.

Pada umumnya, periode ini merupakan suatu periode kegiatan yang tenang dan kemajuan yang stabil. Sikap Pemerintah Hindia Belanda terhadap *trade unionisme* (perserikatburuhan) adalah suatu sikap kewaspadaan dan bahkan permusuhan. Polisi, selalu siap sedia, dari waktu ke waktu melakukan penggerebekan-penggerebekan. Orang-orang yang dicurigai sebagai komunis atau orang revolusioner pada umumnya, ditangkap dan dibuang ke Boven Digul, tanpa diadili.

PVPN membatasi kegiatan-kegiatannya di dalam batas-batas trade unionisme semurninya dan menahan diri dari politik. Dalam kenyataan, federasi itu tidak menginginkan tujuan-tujuan politik.[20]

Pada bulan Juni 1931, PVPN bergabung pada International Federation of Trade Unions.

PSSI, federasi serikat-serikat buruh dalam perusahaan-perusahaan swasta, juga terorganisasi dengan baik. Tetapi ia hanya merupakan sebuah organisasi kecil karena mayoritas kaum buruh tetap tidak

[20] A.K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, hlm. 172.

edi cahyono's
LIBRARY

terorganisasi, dan hanya satu bagian dari serikat-serikat buruh yang ada berafiliasi dengan federasi itu.

Seperti itu situasi saat Jepang menyerbu negeri itu dalam bulan Februari 1942.

## Periode Jepang

Segera setelah kedatangan mereka di Indonesia, para pembesar militer Jepang membubarkan semua jenis organisasi rakyat Indonesia. Hanya organisasi-organisasi untuk mendukung usaha perang Jepang yang diperkenankan dan didorong. Partai-partai politik dan serikat-serikat buruh sepenuhnya bertentangan dengan kebijakan Jepang. Demikianlah, selama seluruh periode Jepang gerakan serikat buruh ditindas.

Banyak pemimpin serikat buruh, yang yakin bahwa, pada akhirnya, Sekutu akan memenangkan perang, tentara Jepang akan meninggalkan negeri ini dan Indonesia akan merdeka, mulai menyusun rencana-rencana untuk masa depan. Banyak dari mereka bergabung pada gerakan di bawah tanah yang dipimpin oleh kaum sosialis, komunis dan sekelompok nasionalis. Orang-orang Indonesia ini menolak bekerja sama dengan Jepang. Sebaliknya, mereka terlibat dalam suatu kampanye propaganda ilegal, memberitahukan kepada rakyat bahwa usaha perang Jepang adalah sesuatu yang tiada berpengharapan dan bahwa demokrasi pasti menang, dalam jangka panjang. Tokoh-tokoh serikat buruh lainnya berpartisipasi dengan kaum nasionalis di dalam persiapan-persiapan untuk pendirian suatu Indonesia merdeka menurut pola Jepang, tetapi yang disusun oleh Dr. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta dengan cara mereka sendiri.

Demikian, selama periode Jepang dan dalam persiapan untuk pendirian Republik banyak pemimpin serikat buruh berada dalam hubungan erat dengan para pemimpin politik.

Seksi ini hanya akan membahas munculnya serikat-serikat buruh dan federasi-federasi dari masa segera setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus, 1945, hingga akhir tahun 1949. Perkembangan dari tahun 1950 dan seterusnya akan didiskusikan dalam bab berikutnya mengenai situasi gerakan serikat buruh sekarang.

Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan oleh Dr. Soekarno dan Dr.Hatta, para pegawai kantor-kantor Pemerintah, jawatan-jawatan dan perusahaan-perusahaan, dan pabrik-pabrik milik swasta yang dioperasikan oleh para pembesxar Jepang, membentuk organisasi-organisasi perjuangan dengan maksud mengambil alih dinas-dinas dan perusahaan-perusahaan ini dari Jepang dan menyatakannya sebagai milik Republik. Usaha ini ternyata berhasil, sekali pun dalam banyak kejadian kaum buruh harus berjuang melawan para pengawal Jepang.

Para pemimpin kaum buruh memahami bahwa perjuangan untuk realisasi Proklamasi Kemerdekaan oleh kaum buruh mesti dikoordinasikan dan dilakukan sesuai dengqan azas-azas gerakan buruh. Karenanya, pada 19 September, 1945, sejumlah perwakilan kaum buruh berkumpul di Jakarta untuk mendiskusikan peranan kaum buruh dalam perjuangan pendirian Republik dan menentukan azas-azas bagi gerakan buruh sesuai dengan tuntutan-tuntutan zaman baru itu. Pada konferensi ini para pemimpin serikat buruh setuju menciptakan sebuah organisasi yang dapat mempersatukan dan mewakili serikat-serikat buruh yang ada dan lain-lain organisasi kaum buruh. Untuk menghadapi situasi yang gawat itu, organisasi mesti diberi bentuk dan sifat sebuah organisasi perjuangan, suatu front kaum buruh. Demikian, organisasi itu diberi nama *Barisan Buruh Indonesia* (Front Kaum Buruh Indonesia), disingkat *BBI*. Konferensi juga mengeluarkan resolusi yang terdiri atas hal-hal berikut:[21]

[21] *Berita Indonesia*, Tahun I, No. 3, seperti dikutip dalam Koesnodiprodjo, *Himpunan*

edi cahyono's LIBRARY

1. *Komite Nasional*[22] mesti mengakui *Barisan Buruh Indonesia* sebagai satu-satunya perwakilan gerakan buruh.
2. *Komite Nasional* mesti hanya mengakui wakil-wakil yang diangkat oleh BBI.
3. Resolusi ini mesti diberitahukan oleh *Komite Nasional* kepada Pemerintah dan Rakyat Republik melalui Menteri Urusan Sosial.[23]

*Barisan Buruh Indonesia* segera memulai suatu gerakan pengorganisasian di seluruh Jawa. Dengan pulau-pulau lainnya kontak tidak dapat dilakukan karena sulitnya komunikasi dan situasi yang berbahaya (bentrokan-bentrokan di antara kesatuan-kesatuan bersenjata Indonesia dan tentara Jepang di mana-mana dan hubungan tegang dengan Tentara Sekutu). Namun, tidak bergantung pada gerakan buruh di Jawa, kaum buruh di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, juga membentuk serikat-serikat buruh dan organisasi-organisasi perjuangan. Di Bukit Tinggi, ibukota Sumatera, misalnya, para pegawai sivil dan pegawai semua dikantor Pemerintahan dan jawatan-jawatan diorganisasikan dalam satu asosiasi besar para Pegawai Publik, *Persatuan Pegawai Negara Republik Indonesia* (PPNRI) sudah sedini bulan Oktober 1945.

*Komite Nasional* juga mengeluarkan sebuah instruksi kepada Komite-komite Nasional di berbagai provinsi, residensi, kabupaten dan kota-kota untuk mempromosikan pembentukan serikat-serikat buruh dan organisasi-organisasi petani *agar memperkuat Republik*.[24]

Gerakan buruh pada umumnya dan *Barisan Buruh Indonesia* khususnya mendapatkan dukungan sepenuhnya dan dukungan aktif dari Menteri Urusan Sosial. Menteri Urusan Sosial dalam

*Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia*, 1945, hlm. 288. Menurut Saril *Tindjauan Masalah Perburuhan*, 1 Juni, 1950, hlm. 24), BBI didirikan pada 15 Oktober, 1945.

[22] *Komite Nasional* adalah Parlemen Sementara Republik.

[23] Menteri Urusan Sosial dalam kenyataan ialah Menteri Perburuhan.

[24] Koesnodiprodjo, *Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia*, 1945, hlm. 131.

Pemerintahan pertama (Kabinet) Republik adalah . *Iwa Kusuma Sumantri*, yang diinternir oleh Belanda pada tahun 1930 setelah penangkapan atas dirinya dalam bulan Juni 1929. Manakala Perang Pasifik pecah, Kusuma Sumantri dibebaskan dan dikembalikan ke Jawa. Pada pembentukan Pemerintah Republik, ia diangkat menjadi Menteri Urusan Sosial. Salah satu hal pertama yang ia lakukan ialah menghubungi para pemimpin buruh. Demikianlah, adalah dengan restu Menteri Urusan Sosial bahwa *Barisan Buruh Indonesia* melakukan persiapan-persiapan bagi suatu kongres buruh pada bulan November 1945. Gagasannya ialah mengorganisasi sebuah Kongres Umum Kaum buruh Industri dan Pertanian dan dari semua buruh upahan dan gajian, yang meliputi semua cabang BBI yang ada, semua serikat buruh, organisasi buruh dan petani lainnya di seluruh nusantara.

Pada 7 November, 1945, Kongres besar itu dibuka oleh Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Urusan Sosial. Yang menghadiri konvensi itu tidak saja para delegasi cabang-cabang BBI dan serikat-serikat buruh di Jawa, melainkan juga para wakil serikat-serikat buruh di Sumatra dan dari beberapa pulau lainnya, yang telah datang ke Surakarta, di Jawa Tengah, di mana Kongres itu dilangsungkan.

Selama Kongres itiu para pemimpin Komite Sentral *Barisan Buruh Indonesia* (*Sjamsu Harya Udaya cum sui*) mengajukan sebuah saranan untuk mengubah BBI menjadi sebuah partai politik dari kelas pekerja. Suatu perdebatan sengit berkembang. Banyak delegasi menghendaki dilanjutkannya BBI dan melestarikan suatu gerakan serikat buruh yang berdiri sendiri. Hasilnya ialah sebuah kompromi. Partai politik itu dibentuk, tetapi BBI dan serikat-serikat buruh itu tetap ada/dipertahankan.

Partai politik yang diciptakan pada Kongres itu diberi nama *Partai Buruh Indonesia* (PBI). Sjamsu Harya Udaya telah dipilih sebagai Presiden sementara. Kongres pertama PBI dijadwalkan pada 28 November di Yogyakarta.[25]

[25] *Soeara Boeroeh*, 17 November, 1945.

edi cahyono's
LIBRARY

Mereka yang menentang ide likuidasi BBI dan mereka yang berketetapan untuk menciptakan suatu gerakan serikat buruh yang besar segera memulai suatu usaha pengorganisasian baru. Berbagai cabang BBI diperkuat, misalnya cabang-Jakarta dengan. *Njono* sebagai pemimpin (Sekretaris Jendral SOBSI sekarang).

Selama tahun 1946 dan 1947 banyak sekali serikat buruh yang dibentuk. Banyak dari mereka itu adalah organisasi-organisasi lokal yang kecil. Tetapi serikat-serikat buruh yang lebih besar dan nasional segera menyusul. Misalnya, *Serikat Buruh Gula* (SBG) atau serikat buruh industri gula, telah dibentuk pada 3 Maret, 1946; *Serikat Buruh Kereta Api* (SBKA) atau serikat pegawai kereta api, pada 13 Maret, 1946; *Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia* (SARBUPRI) atau serikat buruh perkebunan, pada 17 Februari, 1947; *Serikat Buruh Kementerian Perburuhan* (SB KEMPERBU) atau serikat pegawai Kementerian Perburuhan, pada pertengahan tahun 1947; *Serikat Buruh Daerah Autonoom* (SEBDA) atau serikat pegawai daerah otonom, pada bulan Juni 1947. Di berbagai pelabuhan, serikat-serikat buruh pelabuhan dan pelayaran dibentuk. Pada tahun 1950, serikat-serikat buruh ini dilebur dan membentuk *Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran* atau SBPP; *Serikat Buruh Percetakan* (SBPI.), pada 22 Mei, 1946; *Serikat Sekerdja Kementerian Dalam Negeri* (SSKDN) atau asosiasi pegawai negeri dan pegawai Kementerian Dalam Negeri, pada bulan April 1947; dan *Serikat Buruh Kementerian Penerangan* (SB KEMPEN), pada 6 Juni, 1947.[26]

Banyak dari serikat-serikat buruh ini dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai pengalaman di masa lalu sebagai pemimpin serikat buruh. Banyak dari mereka telah mengalami sepuluh tahun atau lebih dalam kamp-kamp konsentrasi dan telah dikembalikan ke Jawa setelah berakhirnya perang.

[26] Data mengenai tanggal pembentukan serikat-serikat buruh dapat diperoleh dalam *Serikat Buruh Jang Terdaftar* diterbitkan oleh Kementerian Perburuhan, Jakarta, pada tahun 1956. Anggaran Dasar dari banyak serikat buruh juga memberi informasi mengenai hal ini.

Segera, serikat-serikat buruh itu mengakui lebih disukainya sebuah organisasi sentral. Pada mulanya, terdapat beberapa perselisihan mengenai bagaimana melakukan pekerjaan ini. Beberapa pemimpin hanya menginginkan sebuah federasi dari serikat-serikat buruh yang ada, baik yang lokal maupun yang nasional. Yang lainnya lebih memilih pendirian serikat-serikat buruh nasional lebih dulu –yang mereka sebut serikat-serikat buruh *vertikal*— dan kemudian menyarankan sebuah federasi dari serikat-serikat buruh nasional ini. Hasilnya ialah bahwa dibentuk dua federasi; satu ialah *Gabungan Serikat Serikat Buruh Indonesia* atau GASBI (dibentuk pada 21 Mei, 1946); yang kedua ialah *Gabungan Serikat Buruh Vertikal* (GSBV) (Juli 1946). Namun, setelah beberapa bulan, mereka yang berkeras pada keharusan sebuah gerakan serikat buruh tunggal saja, menang. Pada 29 November, 1945, sejumlah pemimpin dari berbagai serikat buruh, menyelenggarakan sebuah konferensi persiapan. Diskusi-diskusi membawa pada proklamasi sebuah federasi baru yang akan menggantikan GASBI dan GSBB. Nama organisasi baru itu ialah *Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia* (SOBSI).[27] Para pemimpin federasi ini ialah *Harjono*, *Asraruddin*, *Njono*, dan *Surjono*.[28]

Bagian besar pendiri dan pemimpin SOBSI adalah kaum sosialis dan komunis yang mempertahankan hubungan-hubungan erat dengan Pemerintah Republik. Pemerintahan ini dipimpin oleh Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis dan mendapatkan dukungan dari Partai Sosialis ini (yang pada waktu itu mencakup kaum sosialis demokratik maupun sayap-kiri), Partai Komunis, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Sosialis, Front Petani dan SOBSI. Para tokoh serikat buruh yang menentang kebijakan kabinet Sjahrir dan yang karena alasan itu, marah terhadap SOBSI, berusaha untuk

[27] Sabarmin, "Perkembangan Gerakan Buruh di Indonesia." *Tindjauan Masalah Perburuhan*, No. 6, Oktober 1950, hlm. 33-36.

[28] Harjono terlibat di dalam pemberontakan Komunis bulan September 1948, ditangkap dan dieksekusi bulan Januari 1949. Asrarruddin sekarang Sekretaris Jendral Partai Buruh; Njono sekarang Sekretaris Jendral SOBSI dan seorang anggota terkemuka dari Partai Komunis. Surjono sekarang seorang anggota aktif dari Partai Sosialis Indonesia

edi cahyono's
LIBRARY

mendirikan sebuah federasi lain. Pada akhirnya mereka berhasil dalam menciptakan sebuah pusat lain, tetapi itu hanya sebuah organisasi kecil yang menyebut dirinya *Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia* (GASBRI).

Pada bulan September 1948, SOBSI terlibat di dalam apa yang disebut Affair Madiun, yaitu pemberontakan yang dilancarkan oleh kaum komunis. Pemberontakan itu dihancurkan oleh pasukan Pemerintah di dalam dua bulan. Para pemimpin pemberontakan itu ditangkap, diadili oleh mahkamah militer dan dieksekusi pada bulan Januari 1949. Di antara mereka ialah Amir Sjarifuddin, seorang mantan Perdana Menteri dan Menteri Peretahanan, Harjono, Presiden SOBSI dan Oey Gee Hoat, seorang pimpinan tertinggi SOBSI lainnya. Pada waktu pecahnya pemerontakan bulan September 1948 itu, kaum komunis dan simpatisan-komunis di seluruh Republik ditangkap. Demikian, bagian besar pemimpin SOBSI dipenjarakan, atau bergerak di bawah tanah, sedangkan kantor-kantor Federasi itu ditutup.

Pemberontakan komunis itu disusul oleh suatu serangan berskala besar oleh Belanda terhadap Republik pada 19 Desember, 1948. Kedua peristiwa itu untuk sementara mengakiri kegiatan-kegiatan SOBSI dan semua organisasi buruh lainnya, kecuali organisasi-organisasi perjuangan atau batalyon-batalyon buruh.

Segera setelah pecahnya pemberontakan dan sebelum aksi militer Belanda, enambelas serikat buruh, yang sebelumnya berafiliasi dengan SOBSI, mengutuk kebijakan pimpinan puncak SOBSI dan mengundurkan diri dari Federasi itu. Kelompok ini terdiri artas hampir 50% dari keanggotaan SOBSI pada waktu itu. Setelah kembalinya Pemerintah Republik di Yogyakarta dan evakuasi daerah ini oleh pasukan-pasukan Belanda pada bulan Juli 1949, serikat-serikat buruh yang berserakan itu, para anggota dan bekas anggota SOBSI mencari jalan untuk memulihkan persatuan. Banyak dari mereka sepakat untuk membentuk *Himpunan Serikat Serikat Buruh Indonesia* atau HISSBI (jangan dikacaukan dengan sebuah HISSBI lain, yang diorganisasi pada tahun 1953). Tetapi banyak

serikat buruh lainnya, yang dipimpin oleh orang-orang yang lebih anti-komunis dan anti-SOBSI, memutuskan untuk mendirikan *Gabungan Serikat Buruh Indonesia* (GSBI). HISSBI tidak panjang usianya, disebabkan dihidupkannya kembali SOBSI pada akhir tahun 1949.

Kecuali serikat-serikat buruh dan federasi-federasi yang telah disebutkan itu, mesti diberi catatan mengenai *Serikat Buruh Islam Indonesia* (SBII) yang didirikan pada 27 November, 1948. SBII melanjutkan hidupnya yang berdiri sendiri di samping federasi-federasi lainnya.

Demikian, manakala Republik memasuki tahun baru 1950, tahun dimulainya suatu era baru bagi Nasion Indonesia, gerakan serikat buruh Indonesia diwakili oleh SOBSI, GSBI dan SBII.

Dalam tahun-tahun setelah 1950, tidak saja ratusan serikat buruh baru dibentuk oleh kaum buruh, tetapi juga berbagai federasi baru.

## Kesimpulan

Sepanjang seluruh sejarahnya, gerakan serikat buruh Indonesia mengungkapkan watak politiknya. Serikat-serikat buruh menginginkan cita-cita politik, terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik dan memelihara hubungan-hubungan erat dengan partai-partai politik. Gerakan itu juga selalu tunduk pada perlakuan politik oleh lain-lainnya. Para pemimpin politik dan partai politik melibatkan serikat-serikat buruh itu di dalam bisnis mereka; dan Pemerintah-pemerintah, baik Rezim Kolonial maupun Pemerintah Republik, memperlakukan mereka sebagai badan-badan politik, sekalipun dengan cara-cara yang berbeda-beda. Pemerintah Belanda menganggap gerakan serikat buruh sebagai secara politik berbahaya dan tidak dapat disetujui; para pemimpin serikat buruh diperlakukan sebagai lawan-lawan politik. Diperlakukan dan dikejar-kejar dengan cara ini, gerakan serikat buruh selama periode Belanda menjadi lebih dan semakin berorientasi politik,

edi cahyono's
LIBRARY

melihat dalam penumbangan rezim kolonial satu-satunya pemecahan bagi masalah kemiskinan, kesengsaraan dan penindasan kelas pekerja Indonesia.

Di lain pihak, Pemerintah Republik selalu memandang gerakan serikat buruh sebagai secara politik diperlukan dan diinginkan. Sebagai misal dari pandangan ini selama masa dini Republik ialah *Maklumat Presiden* No. 1 tahun 1947 bagi implementasi *Peraturan Presiden* No. 6 tahun 1946 mengenai Komposisi *Komite Nasional Indonesia*.[29] Menurut Dekret Presiden ini, empatpuluh pemimpin serikat buruh diangkat sebagai anggota Parlemen Sementara. Sejak itu, gerakan serikat buruh Indonesia, teristimwa SOBSI, selalu sangat erat hubungannya dengan pengelolaan urusan-urusan Pemerintah.

[29] Koesnodiprodjo, *Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan, Pemerintah Republik Indonesia*, 1946, hlm. 249-250, dan Koesnodiprodjo, *Ibid.*, 1947, hlm. 380-388.

# BAB II

# KEADAAN GERAKAN SERIKAT BURUH INDONESIA SEKARANG

Untuk tahun 1958, seluruh penduduk Indonesia diperkirakan oleh Biro Perancang Negara berada di antara 86,2 dan 87,5 juta orang.[1] Jumlah pekerja yang digaji dan diupah adalah di antara lima dan enam juta. Ini merupakan jumlah orang yang memenuhi syarat untuk keanggotaan serikat buruh. Angka ini mencakup para pegawai negeri dan lain-lain pegawai Pemerintah, para buruh kerah-putih dalam perusahaan dagang dan bisnis perbankan. Para buruh dalam usaha-usaha kecil yang dimiliki orang Indonesia dan Tionghoa, lazimnya tidak membentuk asosiasi-asosiasi, dan karenanya tidak terhitung dalam jumlah lima hingga enam juta yang tersebut di atas. Dari lima hingga enam juta orang, sekurang-kurangnya tiga juta adalah terorganisasi. Jika kita menambahkan keanggotaan yang diklaim dari semua serikat buruh, keseluruhan kekuatan perburuhan terorganisasi bahkan akan melampaui empat juta.

Tidak mudah untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan dan pasti mengenai keanggotaan serikat-serikat buruh di Indonesia. Karena pembayaran uang iuran masih dalam proses perkembangan, metode identifikasi para anggora serikat buruh tidak dapat secara memuaskan diberlakukan dan tidak akan memenuhi kebutuhan untuk mengukur kekuatan gerakan serikat buruh Indonesia. Karenanya, jelas bijaksana untuk memperhatikan klaim-klaim dari

[1] Badan Perancang Negara, *Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960*, hlm. 13.

edi cahyono's LIBRARY

serikat-serikat buruh itu sendiri, pendaftaran keanggotaan mereka, pernyataan-pernyataan serikat-serikat buruh pesaing, dan kekuatan mereka yang sesungguhnya sebagai dibuktikan dalam rapat-rapat anggota dan selama aksi-aksi massa, seperti pemogokan, demonstrasi dan rapat-rapat umum.[2] Tiga hingga empat juta kaum buruh terorganisasi ini dikelompokkan setidak-tidaknya dalam 150 serikat buruh nasional dan berbagai ratusan serikat buruh lokal, yang tidak berafiliasi dengan serikat-serikat buruh nasional. Serikat-serikat buruh nasional mencakup dari yang sangat besar, seperti Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia yang mengklaim suatu keanggotaan dari 600.000, dan Serikat Buruh Gula dengan 305.000 buruh, hingga serikat-buruh yang sangat kecil dengan hanya beberapa ratus anggota, seperti Perhimpunan Ahli Gula Indonesia (asosiasi pegawai tinggi dalam industri gula yang menyebut diri mereka sendiri ahli-ahli) dengan 680 anggota. Dalam kenyataan separuh dari 150 serikat buruh nasional sebenarnya kecil dan hanya mempunyai cabang-cabang di bagian-bagian tertentu negeri, sekali pun mengklaim label nasional. Tidak lebih dari enampuluh serikat buruh nasional yang sungguh-sungguh tersebar di semua provinsi. Kira-kira delapan puluh dari seratus limapuluh serikat buruh nasional berafiliasi dengan federasi-federasi. Kira-kira tujuhpuluh, termasuk serikat-serikat buruh yang lebih kecil dan terkecil, berdiri sendiri.

Keadaan sekarang menunjukkan keberadaan empat federasi nasional yang besar, tiga federasi kecil, dan sejumlah organisasi, yang baru-baru ini dibentuk dan sangat kecil dalam ukuran dan keanggotaannya, namun juga mengklaim sebagai sejenis federasi regional dan lokal. Jawatan Gabungan Perburuhan dari Kementerian Perburuhan di Jakarta telah menyusun direktori-direktori mengenai serikat-serikat buruh dan federasi-federasi sejak taun 1950, dan serikat-serikat buruh yang terdaftar sejak tahun 1955. Direktori yang paling baru yang tersedia bagi pengarang tulisan ini ialah direktori bulan Sepgtember 1957.

[2] Harry Goldberg, "Membership Status of Indonesian Unions," *Internationl Free Trade Unions News*, Jilid 7, No. 6, Juni 1952.

**Empat Federasi Terpenting**

Empat federasi nasional besar itu adalah:

1. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, disingkat SOBSI, dengan keanggotaan 2.661.970 yang diumumkan pada tahun 1956. SOBSI dibentuk pada 29 November, 1946;
2. Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) dengan keanggotaan 725.100 yang diumumkan pada tahun 1955. Federasi itu dibentuk pada 12 Mei, 1953,
3. Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dengan keanggotaan 275.000 yang diumumkan pada tahun 1956. SBII merupakan sebuah persatuan sentral dan dibentuk pada 27 November, 1948. SBII merupakan sebuah organisasi Muslim.
4. Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI), dibentuk pada 12 Desember, 1952. Direktori tahun 1956 masih menunjukkan angka 94.477 bai keanggotaan federasi ini. Sekarang, -arfa pemimpin KBKI mengklaim bahwa mereka mengontrol lebih dari setengah juta pekerja.

**Federasi-federasi yang lebih kecil**

Tiga federasi kecil adalah:

1. Himpunan Serikat Serikatr Buruh Indonesia (HISSBI). HJISSBI dibentuk pada trahun 1952. Pada tahun 1952 dan 1953 federasi ini masih mengklaim suatu keanggotaan lebih dari 400.000. Namun, selama empat tahun terakhir HISSBI telah kehilangan sangat banyak anggotaya, sehingga keanggotaannya kini diperkirakan kurang dari 50.000.
2. Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI). Seperti HISSBI, SOBRI lebih bersar dan lebih penting di tahun 1953 daripada sekarang. Keanggotaannya kini diperkirakan kurang dari 100.000. SOBRI didirikan pada bulan Februari 1951.
3. Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dengan suatu keanggotaan yang diumumkan sebesar 36.382 pada tahun 1955. GSBI didirikan pada bulan Desember 1949.

edi cahyono's
LIBRARY

Baru-baru ini tiga organisasi perburuhan Muslim telah diciptakan sebagai akibat perbedaan pendapat dalam gerakan politik Islam. Organisasi-organisasi ini sangat kecil, hanya beroperasi di beberapa daerah dan nyaris tak layak untuk disebut federasi atau organisasi sentral. Mereka itu adalah Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) yang mengklaim suatu keanggotaan dari 11.000 pada tahun 1956, Gabungan Organisasi Buruh Sjarekat Islam Indonesia (GOBSI-IND) dengan beberapa ribu anggota, dan Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), dibentuk pada tahun 1957 oleh beberapa anggota SBII yang berbeda pendapat.

Sejumlah buruh Kristiani juga dilaporkan mempertimbangkan pendirian sebuah gerakan perburuhannya sendiri. Kaum buruh Katolik-Romawi sudah membentiuk sebuah organisasi yang mereka sebut Pantjasila menurut ke-Lima Azas Republik Indonesia.

Federasi-federasi regional dijumpai di berbagai provinsi dan bagian provinsi, misalnya di Sumatra Utara, di Daerah Istimewa Yogyakarta, di Sulawesi Selatan, di pulau Biliton, di pulau Bali, dsb. Organisasi-organisasi regional ini terdiri atas serikat-serikat buruh dalam industri yang sama yang diorganisasi secara sendiri-sendiri menurut berbagai perusahaan di daerah yang sama. Di beberapa kota, seperti Jakarta, Surabaya, Cirebon, Medan, dsb., terdapat juga federasi-federasi serikat-serikat buruh lokal yang beroperasi di dalam industri yang sama, lazimnya di bidang perdagangan, impor dan ekspor, atau di dalam usaha-usaha industri kecil. Serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan federasi-federasi regional atau lokal tidak merupakan bagian dari serikat-serikat buruh nasional.

Nyaris semua serikat buruh Indonesia diorganisasi atas suatu dasar industri, mencakup seluruh industri atau perusahaan-perusahaan perseorangan. Di antara beberapa serikat buruh ahli, yang berikut ini adalah yang penting: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); Ikatan Penerbang Sipil Indonesia (IPSINDO), Persatuan Ahli Gula Indonesia (PAGI); Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI), asosiasi perwira polisi yang terhormat.

edi cahyono's
LIBRARY

Pengarang buku ini khawatir bahwa orang-orang asing ini terlalu mengandalkan pada sumber-sumber informasi yang ingin meliat SOBSI itu lebih kecil dan kurang berkuasas karena dominasinya oleh Partai Komunis.[3] SOBSI adalah sebuah federasi dari serikat-serikat buruh. Tetapi Pasal 3 dari Konstitusinya memandang kaum buruh individual yang anggota dari serikat-serikat buruh yang berafiliasi sebagai anggota langsung dari SOBSI. Para anggota ini lalu dianggap yakin pada dan menyetujui azas-azas dan tujuan-tujuan sentralisme demokratik. Pasal 13 dari Konstitusi itu menyatakan bahwa semua kaum buruh yang dipekerjakan dalam pabrik-pabrik, pertambangan, perkebunan, jawatan Pemerintah, kantor-kantor swasta, dsb., akan diorganisasi menurut bidang pekerjaan mereka. Pasal 14 menentukan bahwa, untuk pengaturan soal-soal internal, serikat-serikat buruh yang berafiliasi, masing-masing akan mendapat suatu konstitusi yang akan ditentukan secara demokratik dan yang tidak akan memuat ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan Konsitusi SOBSI. Kongres Nasional SOBSI, yang diselenggarakan empat tahun sekali, merupakan kekuasaan tertinggi dalam seluruh organisasi SOBSI dan bagi serikat-serikat buruh yang berafiliasi. Kongres mempunyai kekuasaan untuk mendiskusikan dan menyetujui laporan-laporan yang diserahkan oleh Dewan Nasional, mengubah Konstitusi, menyusun program perjuangan dan kebijakan/politik bagi seluruh SOBSI, termasuk serikat-serikat buruh yang berafiliasi, dan memilih anggota Dewan Nasional. Dewan Nasional yang merupakan kekuasaan tertinggi di antara dua Kongres, bersidang sekali dalam setahun, dan mempunyai kekuasaan-kekuasaan berikut (Pasal 21 dari Konstitusi SOBSI):

a. untuk mendiskusikan dan menyetujui laporan-laporan yang diajukan oleh Biro Sentral SOBSI;
b. untuk mendiskusikan dan menyetujui resolusi-resolusi Konferensi Nasional;
c. menetapkan aturan-aturan umum bagi suatu program-kerja yang

[3] International Cooperation Administration, Kantor Urusan Perburuhan, *Summary of the Labor Situation in Indonesia*, hlm. 4.

menyangkut soal-soal organisasi, sosial-ekonomi, politik, informasi dan edukasi, kebudayaan dan olah-raga; mengatur hubungan-hubungan dengan World Federation of Trade Unions dan hubungan-hubungan internasional lainnya;

d. menyetujui budget yang dirancang oleh Biro Sentral;
e. Menyederhanakan struktur serikat-serikat buruh yang berafiliasi, memperhitungkan pendapat serikat-serikat buruh bersangkutan;
f. Membantu dan mengkoordinasikan badan-badan sentral serikat-serikat buruh yang berafiliasi, dan mengarahkan badan-badan regional dari SOBSI dalam mengimplementasikan Resolusi-resolusi Kongres;
g. dalam hal sesuatu jabatan seorang anggota Dewan Nasional menjadi lowong, untuk mengisi jabatan itu dengan mengangkat seorang anggota baru.;
h. untuk memilih Biro Sentral dan Sekretariat Dewan Nasional; Sekretariat ini terdiri dari seorang Sekretaris Jendral, dua waktil Sekretaris Jendral, dan dua Sekretaris; para anggota Sekretariat Dewan Nasional adalah anggota *ex officio* dari Biro Sentral.

Biro Sentral mewakili Dewan Nasional untuk periode antara dua sidang Dewan, dan bersidang sekurang-kurangnya sekali setiap bulan. Sekretaris Jendral berfungsi sebagai Ketua Biro Sentral.

Di antara Kongres-Kongres suatu Konferensi Nasional, sering disingkat sebagai Konfernas mesti bersidang sekurang-kurangnya sekali, dihadiri oleh para wakil komite-komite eksekutif dari serikat-serikat buruh yang berafilias dan SOBSI-SOBSI daerah. Konferensi Nasional adalah suatu badan kontrol untuk memperbaiki berfungsinya organisasi.

SOBSI Daerah, yang didirikan di setiap provinsi dan di daerah penting lainnya, bertugas mengarahkan perjuangan kaum buruh di daerah-daerah. Juga terdapat organisasi-organisasi lokal dari SOBSI yang mengarahkan kegiatan-kegiatan kaum buruh melalui serikat-serikat buruh mereka masing-masing.

edi cahyono's
LIBRARY

Kongres Nasional kedua dari SOBSI, yang diselenggarakan dari 9 Januari hingga 20 Januari, 1955 di Jakarta, memilih sebuah Dewan Nasional, yang terdiri atas enampuluhsatu anggota. Sidang pertama Dewan ini, yang diselenggtarakan pada hari terakhir Kongres, mengangkat tigabelas dari enampuluhsatu orang itu sebagai anggotra Biro Sentral. Dewan kemudian mengangkat seorang Sekretaris Jendral, dua Wakil Sekretaris Jendral, dan dua Sekretaris, yaitu: Njono[4] Muhammad Munir, Ruslan Wijayasastra, Tjugito, dan F. Runturambi.

Tigapuluh sembilan serikat buruh nasional dan delapanratus serikat buruh lokal berafiliasi dengan SOBSI pada tahun 1957. Di antara mereka adalah serikat-serikat buruh berikut ini yang paling penting.

1. *Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia*, disingkat sebagai SARBUPRI, serikat buruh terbesar di negeri ini.
   Keanggotaan yang diumumkan pada tahun 1957: 600.000
   Sekretaris Jendral: Suhaimi Rahman (pada tahun 1956).
2. *Serikat Buruh Gula* (SBG).
   Keanggotaan yang diumumkan: 305.000 (1957), dtermasuk kaum buruh musiman dan non-aktif.
   Sekretaris Jendral: Sukendar Hadisiswoyo (1956).
3. *Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia* atau SARBUKSI.
   Keanggotaan Yang diumumkan: lebih dari 200.000 (1955)
   Sekretaris Jendral: Casim (1955).
4. *Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran* atau SBPP.
   Keanggotaan yang diumumkian: 50.000 (1956)
   Sekretaris Jendral: Tuk Subianto (1956)
5. *Serikat Buruh Kereta* atau SBKA.
   Keanggotaan yang diumumkan: 68.000 (1957)
   Sekretaris Jendral: Singgih (1957).
6. *Serikat Buruh Kendaraan Bermotor* atau SBKB
   Keanggotaan yang diumumkan: 50.000 (1956)

[4] Banyak orang Indonesia mempunyai hanya satu nama.

Sekretaris Jendral: Sukiman (1955).

7. *Serikat Buruh Angkutan Udara*. Bagian besar dari anggota adalah ahli teknik dan buruh kasar yang terhitung personel daratan.
   Namanya disingkat SERBAUD.
   Keanggotaan yang diumumkan: 2.500 (1956).
   Sekretaris Jendral: Hanafi (1957)
8. *Serikat Buruh Pos, Telegraf dan Telefon*, disingkat SB POSTEL.
   Keanggotaan yang diumumkan: 30.000 pada tahun 1955. Sekarang keanggotaannya ditaksir kurang dari 20.000 dikarenakan suatu perpecahan pada tahun 1956.
   Sekretaris Jendral: Aswani (1957)
9. *Persatuan Buruh Minyak* atau PERBUM.
   Keanggotaan yang diumumkan: 36.000 (1957)
   Sekretaris Jendral: R.P.Situmeang.
10. *Serikat Buruh Tambang Indonesia* atau SBTI
    Keanggotaan yang diumumkan: 19.570 (1956)
    Sekretaris Jendral: Mardjoko (1956)
11. *Serikat Buruh Industri Metal* atau SBIM
    Keanggotaan yang diumumkan: 8.685 (Februari 1957)
    Sekretaris Jendral: Ishadi (1955)
12. *Serikat Buruh Tekstil dan Pakaian*. Tidak disingkat.
    Keanggotaan yang diumumkan: 60.000 (1957)
    Sekretaris Jendral: Musirin Sosrosubroto (1956)
13. *Serikat Buruh Rokok Indonesia* atau SBRI
    Keanggotaan yang diumumkan: 51.000 (1957)
    Sekretaris Jendral: Ridwan Hariadi (1956)
14. *Serikat Buruh Film dan Senidrama* disingkat SARBUFIS
    Keanggotaan yang diumumkan: 5.320 (1956)
    Sekretaris Jendral: Kastari (1955).
15. *Serikat Buruh Kementerian Pertahanan* atau SBKP
    Keanggotaan yang diumumkan: 60.000 (1957)
    Sekrtaris Jendral: Soerodjo (1955).

edi cahyono's
LIBRARY

16. *Serikat Buruh Kementerian Perburuhan* atau SB KEMPERBU
    Keanggotaan yang diumumkan: 2.000 (1956)
    Sekretaris Jendral: Dr.Soeprapto (1957)
17. *Serikat Buruh Pekerjaan Umum* disingkat SBPU.
    Keanggotaan yang diumumkan: 48.000 (1957)
    Sekretaris Jendral: F. Runturambi (1956)
18. *Serikat Buruh Daerah Autonomi* disingkat SEBDA
    Keanggotaan yang diumumkan: 73.000 (1957)
    Sekretaris Jendral: S. Haryawisastra (1956)
19. *Serikat Buruh Pertjetakan Indonesia* atau SBPI
    Keanggotaan yang diumumkan: tiada tersedia angkanya
    Sekretaris Jendral: Soenadi (1956).

SOBSI berafiliasi dengan World Federation of Trade Unions (WFTU). Nyono, Sekretaris Jendral SOBSI adalah seorang wakil-presiden dari WFTU. Sejumlah pemimpin SOBSI lainnya juga menduduki pos-pos penting di dalam Dewan Umum dan di dalam berbagai badan WFTU.

**KBSI**

KBSI didirikan pada 12 Mei, 1953, sebagai suatu penggabungan dari berbagai federasi nasional dan regional kecil yang telah bekerjasama selama beberapa tahun di dalam Dewan Serikat Serikat Buruh Indonesia (DBSI). Pada waktu pendiriannya, KBSI merupakan sebuah organisasi besar, mencakup sejumlah besar serikat-serikat buruh penting. Tampaknya seakan-akan Indonesia akan mempunyai sebuah gerakan serikat buruh tunggal yang besar di samping SOBSI dan SBII. Namun, di dalam satu tahun suatu perpecahan terjadi di kalangan para pemimpin federasi muda itu sebagai akibat bentrokan di antara kaum nasionalis dan kaum sosialis setelah pembentukanm Kabinet Pertama Dr. Ali Sastroamidjojo yang dipimpin oleh Partai Nasionalis, tetapi ditentang oleh Partai Sosialis Indonesia dan Parti Muslim Masyumi.

Pada bulan Desember 1953, Rh. Koesnan, Presiden terpilih Federasi

itu, mengundurkan diri. Dilaporkan bahwa, Koesnan mengambil langkah itu atas permintaan partai politiknya, Partai Nasional Indonesia.[5] Namun, bagaimana pun, itu mengherankan, karena adalah Koesnan yang melakukan bagian terbesar usaha untuk menciptakan KBSI itu sebagai Presiden DSBI dan GSBI. Pengunduran diri . Koesnan dari federasi itu segera disusul oleh pengunduran diri sejumlah serikat-serikat buruh yang berafiliasi, teristimwa yang telah menjadi anggota GSBI. Setelah meninggalkan KBSI serikat-serikat buruh yang berbeda pendapat menghidupkan kembali GSBI, kecuali PGRI yang lebih memilih menjadi berdiri sendiri setelah sejarah buruk kontroversi-kontroversi politik. Demikianlah, KBSI menderita kerugian-kerugian sangat besar dalam keanggotaan dan dalam pengaruh. Jumlah anggotanya jelas jatuh menjadi separuhnya (400.000) dari seluruh angka pada pelantikannya di bulan Mei 1953. Namun, di bawah kemimpinan yang bersemangat dari presidennya yang baru, Kusna Puradiredja, seorang pengacara dan tokoh serikat buruh yang setia (Presiden dari PBKA, serikat buruh kedua dari para pegawai kereta api) KBSI berangsur-angsur memperoleh kembali sebagian besar kekuatan dan pengaruh. Pada waktu sekarang Federasi itu memadukan kekuatan duabelas serikat buruh nasional dan sejumlah besar serikat-serikat buruh lokal, dengan suatu total keanggotaan dari tigaperempat juta orang.

KBSI merupakan sebuah federasi murni, yang hanya berurusan dengan serikat-serikat buruh yang berafiliasi dan tidak menjalankan kontrol langsung atas para anggota biasa. Yang memenuhi syarat untuk keanggotaan di dalam Federasi ialah: serikat-serikat buruh nasional, federasi serikat-serikat buruh di bidang yang sama, serikat-serikat buruh lokal dengan sedikitnya 2.000 anggota, dan federasi-federasi lokal dengan sekurang-kurangnya 5.000 anggota.

KBSI didasarkan pada azas keadilan sosial dan menginginkan sebagai tujuan-akhirnya pembentukan suatu masyarakat baru yang berdasarkan keadilan sosial. KBSI membela demokrasi, bebas,

[5] *Pedoman*, 4 Desember 1953.

edi cahyono's
LIBRARY

dan tidak terikat pada sesuatu afiliasi politik.

Badan-badan pimpinan KBSI adalah:

1. Kongres Persatuan,
2. Dewan Pimpinan Pleno,
3. Dewan Pimpinan Harian,
4. Sekretariat.

Dewan Pimpinan Harian yang menjalankan bisnis sehari-hari, terdiri atas seorang Ketua Umum, seorang Ketua I, seorang Ketua II, seorang Sekretaris Jendral, dua orang Sekretaris, dan seorang Sekretaris Organisasi. Ketua Umum yang sekarang ialah, Kusna Putradiredja, sedangkan A.H. Siregar, dan Andi Zaenal Abidin (juga seorang pengacara seperti Puradiredja) berturut-turut adalah Ketua I dan Sekretaris Jendral. Mereka dipilih pada jabatan-jabatan itu oleh Kongres Kedua KBSI yang diselenggarakan pada bulan Juni 1956 di Bandung, Jawa. Pengurus lainnya ialah: Kuswari, pembantu Abidin, dan Afnan, yang bertanggung jawab atas keuangan.

Serikat-serikat buruh berikut ini merupakan tulang-punggung Federasi itu:

1. *Persatuan Buruh Perkebunan Republik Indonesia*, disingkat PERBUPRI.
   Keanggotaan yang diumumkan: 165.000 (1956).
   Ketua: Humala Silitonga (1955).
2. *Serikat Kaum Buruh Kereta Api*, atau PBKA
   Keanggotaan ang diumumkan: 20.000 (1956)
   Ketua: Kusna Puradiredja (1957).
3. *Persatuan Kaum Buruh Minyak* atau SKBM.
   Keanggotaan yang diumumkan: 5.000 (1955)
   Ketua: J.A. Datuk Radja Bangun (1956).
4. *Serikat Buruh Penerbangan*, SBP.
   Keanggotaan yang diumumkan:2.500 (1957).
   Ketua: A.H. Siregar (1957).
5. *Serikat Buruh Koninklijke Paketvaart Maatschappij*, atau

SBKPM
Keanggotaan: tiada tersedia angkanhya
Ketua: W. Marpaung (1956).

6. *Organisasi Buruh Perniagaan Seluruh Indonesia*, atau OBPSI.
Keanggotaan: tgiada tersediagkanya.
Ketua: R.A.Sab oer (1956).

KBSI tidak berafiliasi dengan sesuatu federasi Internasional.

**SBII**

Serikat Buruh Islam Indonesia didirikan pada 27 November, 1948, oleh para anggota Partai Muslim Masyumi yang menyadari pentingnya sebuah gerakan serikat buruh di dalam bidang pengaruh partai. SBII berafiliasi dengan Masyumi sebagai yang dinamakan anggota istimewa.

Keanggotaan partai politik ini terdiri atas orang-perseorangan dan organisasi-organisasi Islam. Program yang luar biasa yang dibuat oleh SOBSI sejak 1954 menimbulkan suatu percepatan juga dalam usaha pengorganisasian dan kegiatan-kegiatan SBII. SBII tampaknya berketetapan untuk mengejar SOBSI yang didominasi kaum komunis.

SBII merupakan yang disebut Sentral yang mempersatukan, dengan rakyat jelata sebagai anggota langsung, dan mengarahkan mereka menurut suatu kebijakan persatuan dan taktik-taktik yang seragam. Semua cabang SBII di berbagai pabrik, perkebunan, tambang, kantor, dsb., menggunakan nama SBII. SBII Sentral mempunyai departemen-departemen khusus untuk berurusan dengan berbagai industri dan satuan-satuan ekonomi.

SBII mengklaim suatu keanggotaan sebanyaki 275.000 pada tahun 1956.

SBII mendapatkan gagasan-gagasan dan cita-citanya dari ajaran-ajaran Qur'an Suci yang menyerukan kepada semua orang Muslim untuk hidup dalam perdamaian dan mengejar penegakan keadilan

edi cahyono's
LIBRARY

sosial. Konferensi para Ulama dan tokoh-tokoh serikat buruh, yang diselenggarakan pada tahun 1948 menjelang pendirian SBII menyimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan apapun di dalam Qur'an Suci yang membahas masalah-masalah perburuhan, tetapi bahwa terdapat beberapa indikasi dalam ayat-ayat dan tradisi Nabi Muhammad yang menunjukkan jalan untuk memecahkan masalah-masalah kaum pekerja. Kesimpulan konferensi itu ialah bahwa kebutuhan dan masalah-masalah kaum buruh Muslim mesti dibereskan dengan suatu pendekatan manusiawi.

Ketua SBII Sentral ialah Jusuf Wibisono, seorang pengacara yang juga seorang anggota Presidium Partai Masyumi, dan seorang bekas Menteri Keuangan. Wakil Ketua ialah Muhammad Daljono, juga seorang pengacara, seorang anggota terkemuka dari Masyumi dan seorang anggota Parlemen. Sekretaris Jendral adalah S. Narto, seorang tokoh muda serikat buruh yang bersemangat yang telah mempelajari hubungan-hubungan perburuhan di Inggris. Narto juga seorang anggota dari Partai Masyumi sebagaimana juga semua pemimpin SBII lainnya.

Pada tahun 1957 SBII menjadi berafiliasi dengan International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU). SBII juga aktif dalam mengadakan hubungan-hubungan dengan gerakan-gerakan serikat buruh di negeri-negeri Muslim lainnya.

**KBKI**

Kesartuan Buruh Kerakyatan Indonesia, yang aslinya adalah Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia didirikan pada bulan Desember 1952 oleh tokoh-tokoh serikat buruh yang mempunyai hubungan-hubungan erat denan Partai Nasionalis Indonesia. Di dalam pernyataan azas-azasnya KBKI menyatakan bahwa ia beroperasi dengan Partai Nasionalis dalam perjuangannya untuk pencapaian tujuan-tujuannya. KBKI didasarkan pada Sosialisme Indonesia yang disebut Marhaenisme, dan meyakini demokrasi.

Teristimewa sejak tahun 1955 KBKI telah sangat maju. Pada tahun

1955 jumlah keanggotaan yang diklaim masih menunjuukkan sekitar 95.000. Seorang Ketua sebuah serikat buruh yang berafiliasi dengan KBKI baru-baru ini memberitahukan kepada pengarang buku ini bahwa KBKI mempunyai lebih dari setengah juta pengikut pada awal 1958.

KBKI mempunyai seorang pemimpin yang sangat berkemampuan dalam person Ketuanya, Ahem Erningpradja, yang bergabung pada Federasi ini beberapa tahun yang lalu. Sebelum itu, Erningpradja adalah Wakil-Ketua SARBUPRI dan anggota Dewan nasional SOBSI. Pemimpin-pemimpin lain dari KBKI adalah A.M.Datuk, (wakil Ketua) dan Iskandar Wahono, (Sekretaris Jendral). Semua pemimpin KBKI adalah anggota Partai Nasional Indonesia. Dalam kenyataan adalah kemajuan yang luar biasa dari Partai ini yang memberikan dorongan pada pencapaian-pencapaian besar KBKI sejak tahun 1955.

Federasi iti lebih menyukai kerjasama dengan gerakan-gerakan serikat buruh negeri-negeri lain dan berpartispasi dalam aktivitas-aktivitas internasional. Namun ia lebih menyukai tinggal di luar World Federation of Trade Unions maupun Internationl Confederation of Free Trade Unions.

**HISSBI**

Himpunan Serikat Serikat Buruh Indonesia telah didirikan pada tahun 1952 oleh tokoh-tokoh serikat buruh yang mempunyai hubungan-hubungan erat dengan Partai Buruh. Selama tiga tahun pertama keberadaannya federasi itu bertumbuh cepat (bersama dengan bertumbuhan Partai Buruh) dan mencapai suatu keanggotaan dari 413.975 pada tahun 1955. Namun, sejak tahun 1956 pengaruh federasi itu telah merosot. Keberhasilan federasi-federasi lain, teristimewa SOBSI dan KBKI, sejak 1955, adalah di antara lain yang merugikan HISSBI. Pada waktu sekarang, keanggotaan HISSBI diperkirakan kurang dari 30.000.

Ketua federasi itu ialah A.M. Fatah, seorang anggota Partai Buruh.

edi cahyono's
LIBRARY

**SOBRI**

Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia adalah gerakan serikat buruh dari Partai Murba, partai kaum komunis anti-Stalinis. Partai Komunis Indonesia yang resmi menyebut mereka kaum Trotskis.

Federasi ini didirikan pada bulan Februari 1951, bertumbuh secara berangsur-angsur, mengklaim jumlah keanggotaan 469.490 pada tahun 1955, tetapi kemudian merosot. Seperti HISSBI, SOBRI menderita dari keberhasilan federasi-federasi lainnya. Keanggotaannya sekarang ditaksir tidak lebih dari 100.000.

Para pemimpin SOBRI adalah: S. Budhiarto, seorang pengacara, Sjamsu Harya Udaya, dan Slamat Djoyosumitro, semuanya anggota Partai Murba. SOBRI berarfiliasi dengan World Federation of Trade Unions.

**GSBI**

Gabungan Serikat Buruh Indonesia didirikan pada bulan Desember 1948 oleh sembilanbelas serikat buruh, di antaranya serikat buruh penting seperti PGRI, SEBDA dan SBPU. Ketiga serikat buruh besar ini sekarang tidak berada di dalam GSBI. SEBDA dan SBPU sekarang berafiliasi dengan SOBSI, sedangkan PGRI telah menjadi sebuah serikat buruh bebas. Pendirian dan pertumbuhan GSBI terkait dengan nama Rh. Koesnan, sesepuh gerakan serikat buruh Indonesia pasca perang. Adalah .Koesnan yang membuat GSBI berpartisipasi dalam Dewan Serikat Serikat Buruh (DSBI), sebuah Dewan dari Federasi Serikat-serikat Buruh, yang didirikan pada tahun 1952. Pada bulan Mei 1953 DSBI, dengan GSBI di dalamnya, ditransformasi menjadi KBSI. Kurang dari setahun kemudian, Koesnan mengundurkan diri dari KBSI, diikuti oleh sejumlah serikat-buruh yang berafiliasi yang sebelumnya adalah anggota dari GSBI, di anraranyua PGRI. GSBI tidak lama kemudian dihidupkan kembali, namun, tanpa PGRI dan beberapa serikat bnuruh lain yang sebeluymnya adalah anggota dari GSBI. Pada waktu sekarang GSBI merupakan sebuah federasi kecil dari sejumlah serikat buruh,

kebanyakan dari pegawai Pemerintahm yang terdiri atas sekitar 36.000 anggota.

Koesnan sendiri tidak berpartisipasi di dalam kepemimpinan GSBI baru. Kedudukan sebagai Ketua jatuh pada Agus Sutadi.

**Federasi-federasi Regional**

Federasi-federasi regional yang penting adalah:

1. *Gabungan Serikat Sekerja Pemerintah Daerah Istimewa Djogjakarta* (GSSPDIJ), yaitu sebuah federasi dari tujuhbelas perserikatan pegawai negeri dari berbagai Departemen Daerah Istimewa Yogyakarta.[6] Berbagai pemimpin federasi ini adalah anggota Partai Nasionalis.
2. *Gabungan Organisasi Buruh Indonesia* (GOBI) di Sulawesi Selatan dengan tigapuluhtiga perserikatan yang berafiliasi. Ketua GBI, H.Pijo, dan beberapa pemimpin lainnya federasi ini adalah anggota Partai Buruh.
3. *Gabungan Buruh Indonesia* (GBI) di pulau Bali dengan tujuh perserikatan yang berafiliasi. Sejumlah orang Sosialis aktif di dalam organisasi ini.

**Serikat-serikat buruh Bebas**

Pada tahun 1955, Kementerian Perburuhan mendaftar enampuluh-tujuh serikat buruh yang tidak berafiliasi dengan salah satu federasi yang ada. Yang terpenting dari serikat-serikat buruh nasional bebas ini ialah:

1. *Persatuan Guru Republik Indonesia* (PGRI), dengan 84.000 anggota.
   Ketua Umum: M.E. Subiadinata.
   Ketua I: Soedjono
2. *Persatruan Pegawai Polisi Republik Indonesia* (P3RI).

[6] Jogjakarta disebut Daerah Istimewa karena tidak dikepalai oleh seorang Gubernur, melainkan oleh seorang Sultan, Sultan Jogjakarta.

edi cahyono's LIBRARY

Keanggotaan: tiada tersedia angkanya
Ketua: Memet Tanuwidjaja, seorang perwira polisi senior dan anggota Parlemen.

3. *Organisasi Buruh Perkebunan Indonesia* (OBPI), sebuah serikat buruh perkebunan di Sumatra Utara.
   Keanggotaan yang diumumkan: 100.000.
   Ketua: Dr.Maas, seorang mantan Menteri Perburuhan.
4. *Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia* (SBLGI).
   Keanggotaan yang diumumkan: 8.855 (1956).
   Ketua: Kobarsjih
5. *Serikat Buruh Basnk Seluruh Indonesia* (SBBSI).
   Keanggotaan yang diumumkan: 6.000
   Ketua: R. B. Sitohang.
6. *Serikat Sekerja Pos, Telegraf dan Telefon* (SSPTT), serikat buruh kedua dari para pegawai pos, telegraf dan telefon dan dari Departemen pos, telegraf dan telefon.
   Keanggotaan yang diumumkan: 20.000.
   Ketua: R. Asraruddin, seorang anggota Parlemen, seorang mantan Menteri Komunikasi, dan Sekretaris Jendral Partai Buruh.
7. *Serikat Buruh Kementerian Penerangan* (SB KEMPEN).
   Keanggotaan: 9.577 (1956).
   Ketua: Soetedjo Dirdjosoebroto.
8. *Serikat Pelayar Seluruh Indonesia* (SPSI).
   Tidak tersedia angka keanggotaannya.
   Ketua: A.R. Jans.

# BAB III
# DAMPAK IDEOLOGI POLITIK

Dari sejak awal, serikat-serikat buruh Indonesia selalu menjadi sasaran pengaruh ideologi-ideologi politik, yaitu nasionalisme, ide-ide politik Islam, dan, terutama, sosialisme. Bab ini akan membahas dampak ideologi-ideologi ini atas sifat, azas, tujuan, dan struktur serikat-serikat buruh ini.

## Dampak Nasionalisme dan Revolusi Nasional

Pengaruh nasionalis pada gerakan serikat buruh Indonesia dapat dengan mudah dipahami manakala kita mengamati kenyataan bahwa gerakan itu lahir pada waktu bersamaan dengan gerakan politik nasionalis. Keduanya merupakan produk imperialisme Belanda yang menundukkan rakyat Indonesia pada suatu rezim asing dan eksploitasi kapitalis asing. Kedua gerakan itu ditimbulkan oleh Kebangkitan Nasional, kebangkitan kesadaran nasionalis modern pada awal abad ini. Serikat buruh murni Indonesia pertama, yaitu sebuah serikat buruh dengan orang-orang Indonesia sebagai pemimpin maupun anggota,[1] didirikan pada tahun 1908, tahun yang sama didirikannya asosiasi nasionalis pertama.[2]

Para pelajar mengenai sejarah modern Indonesia, manakala membahas berbagai gerakan yang aktif di Indonesia Kolonial, seperti partai-partai politik, organisasi-organisasi pemuda, gerakan perempuan, asosiasi-asosiasi sosial dan ekonomi, dan serikat-serikat buruh, selalu berpikir tentang itu semua sebagai termasuk gerakan nasional yang lebih besar. Gerakan nasional merupakan gerakan politik yang menjalankan perjuangan politik terhadap

[1] *Vereeniging van Spoor- en Tramweg Personeel* (VSTP)

[2] *Budi Oetomo,* yang kemudian menjadi sebuah partai politik.

edi cahyono's
LIBRARY

imperialisme Belanda.

Di Indonesia kolonial seluruh ekonomi dikontrol oleh Belanda: perkebunan, ladang minyak, tambang, pabrik, jalanan kereta api, perkapalan, impor, ekspor, perbankan, jasa-jasa umum, dsb., dimiliki atau dijalankan oleh Belanda. Dan merupakan pengalaman sehari-hari dari kaum buruh bahwa Belands, dalam mengeksploitasi kaum buruh, dalam menolak tuntutan-tuntutan mereka yang masuk akal akan upah yang lebih baik, dan dalam menindaas hak-hak absah mereka, selalu dapat mengandalkan kekuasaan Pemerintah Kolonial. Apakah, oleh karenanya, aneh bahwa kaum buruh memandang rezim Belanda itu sebagai sumber segala kejahatan, sebagai sumber segala ketidak-adilan yang dilakukan terhadap mereka? Memang, sungguh wajar sekali bahwa serikat-serikat buruh menginginkan tujuan-tujuan politik, yang bentuk akhirnya ialah ditumbangkannya imperialisme Belanda dan didirikannya suatu negeri berdaulat.

Dalam mengejar tujuan-tujuan politik itu, serikat-serikat buruh merasa butuh akan teori-teori dan taktik-taktik politik. Demikianlah, serikat-serikat buruh menjadi sadar-politik dari sejak paling awal keberadaan mereka. Dan prosedur yang diterima ialah mengetuk pintu para pemimpin politik nasionalis untuk panduan. Karenanya, integrasi gerakan serikat buruh dalam gerakan politik nasionalis segera terlaksana. Para pemimpin politik menjadi pemimpin serikat-serikat buruh. Para tokoh serikat buruh berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh partai-partai nasionalis. Sepanjang seluruh periode pra-kemerdekaan, serikat-serikat buruh, di samping kegiatan mereka di dalam bidang ekonomi, mempertahankan posisi mereka di dalam gerakan nasionalis; dan ketika Indonesia memproklamasikasn Kemerdekaannya pada 17 Agustus, 1945, dan Era Revolusi Nasional dimulai, para tokoh serikat buruh, yang ditindas oleh kaum militer Jepang selama tiga-setengah tahun, terbukti merupakan putera-putera sejati negeri mereka. Mereka mendirikan perhimpunan-perhimpunan dalam bentuk organisasi-organisasi perjuangan, memobilisasi batalyon-batalyon kaum buruh, dan memelihara

kesatuan-kesatuan yang mempunyai tugas untuk menghancurkan obyek-obyek vital di dalam kasus suatu invasi Belanda.

Revolusi berkanjang bahkan setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember, 1949. Yang menonjol pada tahap baru Revolusi ini ialah: ditinggalkannnya struktur federal negara (yang, dalam kenyataan, buatan Holland) dan didirikannya Republik Indonesia Serikat pada 6 Agustus, 1950, pembatalan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (RTC) pada bulan Februari 1956, perjuangan pembebasan Irian Barat, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan rakyat secara terus-menerus dan dengan kesengitan yang meningkat selama tahun-tahun sejak 1950, dan likuidasi kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda pada Desember 1957.

Pengakuan resmi atas Kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember, 1949, jelas merupakan suatu tonggak sejarah di dalam Revolusi Indonesia; namun, ia hanya merupakan akhir dari suatu tahapan dan awal dari suatu tahapan baru dan lebih tinggi di dalam Revolusi itu.[3]

Transformasi perekonomian kolonial menjadi suatu perekonomian nasional dan penghancuran sisa-sisa kolonialisme dan bentuk-bentuk dominasi asing lainnya adalah di antara sasaran-sasaran tahapan Revolusi ini. Praktik juga menyaksikan perjuangan tak mengenal ampun akan kekuasaan di antara kelompok-kelompok politik ke dalam mana bangsa ini telah terbagi.

Salah jika diasumsikan bahwa Revolusi Indonesia telah disudahi dengan penyerahan resmi kedaulatan dari orang Belanda kepada orang Indonesia. Anggapan-anggapan seperti itu akan membuahkan suatu ketidak pahaman, atau bahkan salah-pengertian mengenai masalah-masalah masa kini Indonesia dan mengenai seluruh proses

[3] Penyerahan kedaulatan tidak pernah diperingati oleh orang Indonesia. Dalam kenyataan, ia telah nyaris dilupakan. Tentang tahap baru Revolusi ini, kaum radikal suka merujuk padanya sebagai tahapan Revolusi Sosial.

Tidak, kata Presiden Soekarno, ia masih tetap revolusi Nasional, tetapi dalam suatu tahap baru dan maju.

edi cahyono's
LIBRARY

kejadian di Indonesia selama delapan tahun terakhir.

Suatu poemahaman mengenai tahapan sekareang dari Revolusi Nasional Indoinesia juga diperlukan untuk memahami sifat, struktur dan perilaku serikat-serikat buruh Indonesia.

Dalam banyak hal gerakan serikat buruh Indonesia merupakan suatu citra dari Revolusi itu. Struktrur dari serikat-serikat buruh dirancang sedemikian rupa sehingga mereka dapat dengan mudah berfungsi sebagai alat atau wahana Revolusi itu. Struktur ini memuat tanda-tanda kesederhanaan, keluwesan, mobilitas, dan persyaratan-persyaratan lainnya dari suatu organisasi perjuangan. Administrasi serikat-serikat buruh itu dinamik, tidak lugas, dan kadangkala tidak masuk akal. Perilaku serikat-serikat buruh itu, yang mengungkapkan watak politik mereka, tunduk pada spontanitas, emosi, dorongan hati, dan ledakan-ledakan antusiasme atau kemarahan, dan suatu semangat perjuangan.

Dibandingkan dengan konstitusi-konstitusi serikat-serikat buruh di Amerika Serikat, konstitusi-konstitusi bagian besar serikat buruh Indonesia singkat sekali, ringkas dan sederhana. Ketentuan-ketentuan yang menentukan persoalan-persoalan yurisdiksi, pembagian administratif, fungsi-fungsi dan tanggung-jawab ringkas dan terbatas pada yang paling perlu. Di lain pihak, pernyataan-pernyataan yang berkepanjangan disisipkan dalam mukadimah konstitusi-konstitusi yang membahas masalah-masalah dan tujuan-tujuan politik

Semua serikat buruh menghendaki likuidasi total dari sisa-sisa kolonialisme dan transformasi dari perekonomian kolonial itu menjadi suatu perekonomian nasional, sebagai suatu tahapan di dalam perwujudan suatu struktur sosialis. Lebih lanjut, semua serikat buruh menginginkan pembebasan segera dari Irian Barat dan siap berjuang untuk itu.

Lebih jauh, banyak serikat buruh dan federasi mempunyai dalam konstitusi mereka pasal-pasal yang merujuk pada tugas dan kesediaan organisasi-organisasi ini untuk menegakkan dan

membela integritas, kemerdekaan dan kedaulatan Republik. Bahkan terdapat serikat-serikat buruh dan federasi-federasi yang tidak menyebutkan apa pun di dalam konstitusi mereka tentang tujuan-tujuan ekonomi langsung, seperti peningkatan upah dan perbaikan kondisi-kondisi kerja lainnya, namun memberikan ruang pada penjelasan mengenai cita-cita dan tujuan-tujuan politik.

Di bawah ini menyusul beberapa contoh mengenai bagaimana Nasionalisme dan Revolusi Nasional menemukan ungkapan di dalam konstitusi serikat-serikat buruh dan federasi-federasi.

Di dalam Mukadimah konstitusi-konstitusi mereka, SOBSI dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan federasi ini mengatakan bahwa perjuangan kaum buruh Indonesia untuk perbaikan kondisi-kondisi kehidupan dan di dalam bidang politik selama periode kolonialisme Belanda adalah suatu bagian penting dari perjuangan nasional rakyat Indonesia. Sebelum pembatalan Perjanjian Konferensi Meja Bundar Indonesia sudah di dalam aktualitas sebuah Pemerintahan yang dijalankan oleh orang Indonesia, tetapi negeri dalam kenyataan masih sebuah setengah-koloni karena Perjanjian Konferensi Meja Bundar itu. Karenanya, menjadi tugas kaum buruh Indonesia untuk berjuang bagi pencapaian Kemerdekaan penuh bagi negeri ini.

KBKI menyatakan dalam Pasal 4 konstitusinya bahwa adalah tugas gerakan itu untuk membela dan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia.

SOBRI mengatakan dalam Pasal VIII konstitusinya bahwa program federasi mencakup perjuangan untuk membela Kemerdekaan Indonesia.

Dan banyak serikat-serikat buruh individual, baik yang berafiliasi dengan federasi-federasi dan yang bebas, mempunyai pasal-pasal di dalam konstitusi mereka yang menyatakan bahwa merupakan bagian dari organisasi-organisasi itu untuk membela negeri ini. Demikianlah dinyatakan, misalnya, dalam konstitusi-konstitusi PBKA, PGRI, dan SSPTT.

edi cahyono's LIBRARY

## Pengaruh Islam

Sejak pendirian Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) pada tahun 1948, menyusul sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh Partai Masyumi pada tahun 1947, seseorang dapat berbicara mengenai suatu pengaruh tertentu dan maksud tertentu dari ajaran-ajaran Muslim atas gerakan perburuhan di Indonesia. Selama konferensi itu, Masyumi mendiskusikan masalah-masalah gerakan perburuhan, dan memutuskan bahwa suau konferensi khusus mesti diselenggtarakan dari para Ulama (sarjana agama) dan para tokoh serikat buruh untuk mempelajari persoalannya secara cermat dan mendalam. Konferensi kedua ini, yang diselenggarakan pada tahun 1948, membahas persoalan apakah perlu untuk mendirikan suatu serikat buruh khusus berdasarkan Islam, dan, jika memang begitu, apa yang menjadi dasar religius bagi gerakan itu. Konferensi itu menyimpulkan:[4]

a. Tidak ada masalah perburuhan khusus dalam Islam, setiap masalah yang berhubungan dengan perburuhan oleh karenanya mesti diselesaikan sebagai suatu masalah yang bersifat manusiawi.
b. Menurut Islam terdapat beberapa masalah yang sangat erat mempengaruhi kaum buruh, dan terdapat tanda-tanda di dalam ajaran dan tradisi Nabi Muhammad yang menunjukkan bagaimana persoalan perburuhan mesti diselesaikan.
c. Pada umumnya, Islam tidak berbicara tentang kepentingan-kepentingan istimewa dari kelompok-kelompok rakyat khusus; tetapi Islam melihat lebih jauh pada perkembangan sosial rakyat dalam suatu periode waktu khusus, dan dalam kasus-kasus seperti itu bagi Islam tersedia sekumpulan petunjuk yang dapat diterapkan. Demikianlah tidak akan merupakan kesalahan jika sebuah serikat buruh khusus didirikan berdasarkan Islam.

Demikian, SBII diciptakan, di bawah pengawasan Masyumi dan

[4]. M. Dalyono, "A Short Biography of SBII," *Voice of SBII*, April 1957, hlm. 3.

sebagai suatu anggota khusus dari partai politik ini. Demikian sesuai dengan Pasal XIV Konstitusi Masyumi yang menyatakan bahwa, untuk melaksanakan tugas-tugas khusus partai, badan-badan mesti didirikan yang akan mempunyai suatu status otonom. Hubungan badan-badan khusus pada Masyumi ini mesti diatur dalam persetujuan-persetujuan khusus. Di bawah suatu persetujuan seperti itu hubungan SBII menjadi hubungan keanggotaan khusus dari Masyumi. Pasal V dari Konstitusi Masyumi menentukan bahwa keanggotaan partai ini akan terdiri dari para anggota (individual) dan anggota khusus (organisasi-organisasi Muslim non-politik). Selanjutnya, Pasal 3 paragraf (3)(b) dari Peraturan Tetap dari Masyumi menyatakan bahwa setiap anggota khusus partai mesti mengakui Masyumi sebagai satu-satunya organisasi bagi perjuangan politik.

Sebagai konsekuensi status SBII ini, dalam persoalan-persoalan politik, serikat buruh ini mesti bersandar pada Masyumi, dan menerima panduan ideologi dan politik dari partai ini. Yang penting bagi Masyumi dalam bidang ideologi juga penting bagi SBII. Pasal III Konstitusi Masyumi yang menyatakan bahwa menjadi tujuan terakhir partai ini untuk mengimplementasikan ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang-seorang, dalam masyarakat dan di Republik Indonesia, juga berlaku bagi SBII.

Salah satu pencerminan cita-cita ini dalam gerakan serikat buruh SBII ialah bahwa SBII menolak teori perjuangan kelas dan berpihak pada kerjasama dengan manajemen dalam mencari jalan-jalan untuk memperbaiki upah dan kondisi kerja. Baik manajemen maupun kaum buruh serikat untuk bekerja menuju realisasi keserasian antara manajemen dan kaum buruh, melalui cara-cara seperti penetapan upah layak dan kondisi-kondisi pekerjaan yang adil. Manajemen, kaum buruh, dan seluruh komunitas, demikian diyakini, akan diuntungkan oleh hubungan-hubungan industri yang baik seperti itu.

Konsepsi mengenai hubungan buruh-manajemen ini sangat kedengaran seperti yang dinamakan azas solidaritas yang dianjurkan

edi cahyono's LIBRARY

oleh gerakan serikat buruh religius di Eropa Barat.

Dalam membahas pengaruh Islam, pengarang hanya ingin mendiskusikan kedudukan SBII dan telah meninggalkan SARBUMUSI, GOBSI-INDONESIA dan KBMI di luar pembahasan, karena dua alasan; pertama, bahwa dua gerakan ini baru didirikan belakangan ini sehingga sikap-sikap ideologi dan perilaku mereka masih harus dipelajari, dan kedua, bahwa mereka jelas akan mempunyai konsepsi Islam yang sama mengenai masalah-masalah sosial, dengan satu-satunya pengecualian bahwa SARBUMUSI menerima petunjuk-petunjuk politiknya dari Partai Nahdatul Ulama dan GOBSI-IND dari Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII), sedangkan KBMI bebas/ berdiri sendiri.

## Pengaruh Sosialisme

Sosialisme telah memainkan suatu peranan penting dalam gerakan serikat buruh di semua negeri. Di Indonesia, pengaruh sosialisme telah menentukan dalam membentuk gerakan itu dan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan taktik-taktik serikat-serikat buruh. Ide-ide sosialis, tujuan-tujuan sosialis, dan agitasi sosialis telah menjadi kekuatan dominan di dalam perkembangan gerakan serikat buruh Indonesia.

Serikat-serikat buruh Islam, juga, sekalipun menolak Marxisme, seringkali dipandu oleh ide-ide sosialis dan mengejar cita-cita sosialis, sejauh ide-ide dan tujuan-tujuan ini juga berasal dari Qur'an. Kalimat-kalimat yang digunakan oleh banyak tokoh serikat buruh Islam di dalam kegiatan sehari-hari mereka adalah, betapa pun, seringkali identik dengan terminologi sosialis yang umum. Dan banyak tokoh serikat buruh Islam dan para anggota Masyumi suka menyebut diri mereka sendiri kaum sosialis religius.

Seperti di tempat-tempat lain mana pun, di Indonesia sini, juga, sosialisme muncul dalam berbagai manifestasi dan dengan berbagai nama. Faksi-faksi dari dan aliranp-aliran di dalam sosialisme yang dikenal di Eropa, telah menemukan jalan mereka ke Indonesia.

Selama rezim Belanda, propaganda sosialis militan telah menguasai pikiran dan membangkitkan imajinasi ribuan orang Indonesia. Adalah teristimewa ajaran-ajran Marx dan Engels yang dengan bersemangat diterima dan dipandang sebagai landasan terbaik bagi keyakinan dan petunjuk yang diperlukan oleh orang Indonesia di dalam perjuangan mereka terhadap imperialisme dan eksploitasi Belanda. Seperti dikatakan seorang penulis mengenai politik Indonesia: bagi bagian terbesar kaum nasionalis Indonesia, Marxisme merupakan bacaan wajib.[5]

Kaum sosialis Marxis di Indonesia dapat dibagi ke dalam mereka yang yakin bahwa sosialisme dan demokrasi itu adalah satu, karena kediktatoran menjadikan sosialisme itu suatu ejekan, dan mereka yang menerima interpretasi dan uraian mengenai sosialisme oleh Lenin., Kategori pertama menyebut diri mereka sendiri murid-murid sosialisme demokratik, dan kelompok kedua adalah, sudah tentu, kaum komunis.

Kaum sosialis demokratik bagian besar diorganisasi di dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan di dalam Partai Buruh. Namun, terdapat juga kaum sosialis demokratik yang anggota dari partai-partai lain, dan yang lainnya lagi yang tidak berafiliasi pada sesuatu partai politiik.

Konsepsi yang dipunyai Partai Sosialis Indonesia mengenai sosialisme demokratik Marxis dikarakterisasi dalam Pernyataan Azas-azas dan Kebijakan PSI:[6]

> Pada umumnya, rakyat di negeri kita lebih sadar mengenai ide-ide demokrasi dan humanisme daripada mereka di negeri-negeri di mana suasana di mana kehidupan menempuh jalannya sebelum perubahan fungsi-fungsi ekonomi masyarakat mereka telah terjadi, masih semurninya feodal. Di negeri kita rakyat secara positif menolak perbudakan dan feodalisme dan karena sebab ini mereka

[5] Peggy Durdin, "Indonesia's Communists," dalam William W. Wade, *US Policy in Asia*, hlm. 87

[6] *Pendjelasan Azas dan Garis Politik Partai Sosialis Indonesia*, hlm. 32-34.

Terjemahan bhs. Inggris yang dipakai di sini diambil dari *Socialism,* yang diterbitkan oleh Komite Luar Negeri dari Partai Sosialis Burma. Ketepatan terjemahan ini telah diperiksa oleh pengarang buku ini.

edi cahyono's LIBRARY

juga menentang otokrasi dan sistem totaliter. Sekali pun begitu, kita di Indonesia juga tidak melalui tradisi liberalisme, kita tidak mengalami perkembangan masyarakat industri dan kapitalis seperti di dunia Barat. Pada hakikatnya, masalah yang kita hadapi ialah sama dengan negeri-negeri Asia lainnya, tetapi cara hidup kita dan mentalitas kita mempunyai karakteristik-karakteristiknya sendiri. Menghadapi situasi dan realitas ini, rakyat Indonesia mesti menentukan kemajuan mereka dengan berusaha mengubah kondisi-kondisi hidup mereka agar memperoleh suatu kecerdasan yang lebih besar dalam menjamin keberadaan mereka.

Partai Sosialis Indonesia memahami sosialisme yang dibelanya dalam arti ini. Ia masih berusaha untuk melahirkan kemajuan dan perubahan sosial. Ia ingin mengubah tipe dan tingkat hidup yang rendah dan pedesaan di Indonesia menjadi suatu masyarakat yang mampu memberi hidup bagi puluhan juta rakyat dengan memanfaatkan kekayaan ilmu pengetahuan dan teknik yang tersedia bagi umat manusia.

Untuk maksud ini ia menggunakan metode analisis dan konsepsi-konsepsi yang dipakai oleh sosialisme modern berkaitan dengan dunia kapitalis. Ia menggunakan analisis yang digunakan oleh Marx-Engels berkenaan dengan perkembangan dan organisasi masyarakat kapitalis.

Kemudian serangkaian azas dan pandangan disebutkan yang darinya hal-hal berikut ini tipikal sekali:

1. Perubahan dan kemajuan masyarakat dan kehidupan di Indonesia hanya dapat dilahirkan dengan panduan sosialisme.
2. Jika di tempat kelahiran kapitalis di dunia Barat kapitalisme kini menghadapi kemacetan/jalan buntu, di satu bagian besar di Asia di mana ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berkembang di dunia Barat, ia tidak mampu lagi untuk berkembang karena ruang yang dibutuhkannya bagi pertumbuhan sudah diisi oleh kapital Barat. Di Asia (kecuali Jepang) kapitalisme akan selalu lemah dan kecil dalam ukuran, dan oleh karenanya akan tidak mempunyai kesempatan untuk mengulangi sejarah kapitalisme di Eropa, sebagai dorongan bagi kemajuan sosial dan sebagai kekuatan ekspansi aparat produktif. Ia tidak mampu menjadi suatu kekuatan progresif bagi kemajuan masyarakat di Asia.
3. Di Asia, dan khsusnya di Indonesia, di mana kemiskinan terbagi secara merata dan di mana kelas yang berada/mapan hanya

merupakan suatu kelompok yang sangat kecil, cita-cita sosialisme tidak saja merupakan cita-cita dari satu kelompok saja melainkan mereka merupakan harapan dari seluruh rakyat dan masyarakat yang menghasratkan suatu perbaikan kondisi-kondisi kehidupan mereka dan suatu tingkat keberadaan yang lebih layak bagi makhluk manusia.

4. Sosialisme di Asia, khususnya di negeri kita, menghadapi tugas untuk meningkatkan alat produksi melalui usaha bersama. Ini lebih penting di Asia daripada perpindahan hak-hak kepemilikan atas alat-alat poroduksi yang ada dari tangan seseorang individu atau suatu kelompok kecil kepada kontrol oleh komunitas. Sosialisme di Asia menghadapi suatu kekurangan dalam alat-alat produksi.
5. Sosialisme sebagaimana kita melihatnya, adalah suatu sosialisme berdasarkan demokrasi, dalam kata-kata lain, suatu sosialisme yang membela nilai-nilai manusia dan mengakui dan menghormati kesetaraan manusia. Penghargaan bagi individu dinyatakan di dalam penghormatan dan perlakuan individu di dalam teori dan praktik sosialisme. Adalah dalam hal ini bagi individu manusia dan pandangan ini yang dalam kenyataan merupakan hakikat semua arsitek besar sosialisme seperti Marx-Engels, dsb. Sosialisme di dalam kenyataan tidak lain dan tidak bukan adalah penggenapan semua cita-cita demokratik, yaitu, kebebasan manusia dan emansipasi dalam arti sesungguhnya kata itu. Setiap makhluk manusia mesti benar-benar bebas untuk mengembangkan hidupnya dan semua potensialitasnya dengan sepenuh-penuhnya. Sosialisme akan berhasil menciptakan kondisi-kondisi di mana kondisi-kondisi ekonomi material tidak akan lagi merupakan suatu rintangan bagi kemajuan dan perkembangan semua potensialitas setiap mahkluk manusia ke arah kebaikan dan keindahan.
6. Kaum sosialis Indonesia membedakan diri mereka dari sosialisme sebagai yang diajarkan oleh Moskow atau Kominform. Tidak saja Kominform itu berbeda dengan sosialisme Indonesia karena penghargaannya yang berbeda

edi cahyono's
LIBRARY

mengenai individu manusia yang dianggapnya semata-mata sebagai suatu bagian abstrak dari konsep kelompok, kelas atau kolektivitas, atau bahwa ia memandang sang individu hanya sebagai tenaga-manusia, semata-mata sebagai suatu faktor produksi. Ia juga berbeda dari kaum sosialis dalam jiwa dan mentalitas. Ia tidak saja menolak dalam teori melainkan juga di dalam praktik kesatuan dan kesetaraan manusia. Ia mengenal konsep mengenai solidaritas kelas dalam teori, tetapi di dalam praktik ia hanya bertujuan pada disiplin partai. Di dalam praktik, ia memandang dan memperlakukan semua orang yang tidak mematuhi disiplin dan ajaran partai mereka sebagai musuh yang dapat dibereskan tanpa sesuatu pertimbangan moral. Jiwa dan mentalitas Kominform sepenuh-penuhnya bertentangan dengan sosialisme yang berdasarkan demokrasi sebagaimana kita mengetahuinya.

Partai Buruh dalam Pasal 4 konstitusinya menyatakan bahwa:

> (Partai) berdasarkan pada aas-azas sosialisme ilmu sebagai yang diajarkan oleh Karl Marx dan Frederick Engels, dijelaskan dan diperkaya dengan hasil studi yang dilakukan mengenai kondisi-kondisi khas yang ditemukan di dalam masyarakat Indonesia, dan mengenai perkembangan kapitalisme dan imperialisme, khususnya setelah Perang Dunia Kedua dan konteksnya bagi Indonesia.

Selanjutnya dinyatakan bahwa masyarakat sosialis yang dihasratkan oleh Partai Buruh ialah bahwa masyarakat di mana makhluk manusia orang seorang menerima penghargaan tertinggi dan akan memiliki semua hak azasi manusia.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, cita-cita sosialisme demokratik sebagaimana itu dipahami oleh Partai Sosialis dan Partai Buruh tidak saja milik dari para anggota kedua partai ini melainkan juga mempunyai pengikut di dalam partai-partai politik lain, di antara orang-orang non-partisan, dan di kalangan massa jelata serikat-serikat buruh.

Apa arti sosialisme Marxis bagi kaum komunis sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih jauh. Di dalam Konstitusi Partai

Komunis Indonesia, ditentukan bahwa seluruh kegiatan PKI akan didasarkan pada teori-teori Karl Marx, Engels, Lenin, Stalin, dan pikiran-pikiran Mao Tse-tung. PKI memandang dirinya sebagai barisan depan dan organisasi kelas tertinggi dari proletariat Indonesia. PKI mewakili kepentingan nasional dari rakyat Indonesia. Pada tahap sekarang PKI berjuang untuk materialisasi sistem demokrasi rakyat di Indonesia, sedang tujuan berikutnya ialah pembentukan suatu masyarakat sosialis sebagai fase pertama menuju suatu masyarakat komunis di Indonesia.

Ideologi yang dianut oleh para anggota Partai Murba juga komunisme, sekali pun interpretasi mereka mengenai teori Marxisme dan Leninisme berbeda. Dalam arti bahwa ia memberikan lebih banyak perhatian pada kondisi-kondisi dan cira-cita khusus Indonesia.

Teristimewa Tan Malaka (yang terbunuh pada tahun 1949) yang bertanggung jawab untuk tipe komunisme Indonesia ini. Partai Komunis resmi suka menyebut Tan Malaka seorang Trotskis dan seorang Titois.

Pengaruh Marxisme, teristimewa sebagaimana yang dipropagandakan dan dipraktikkan oleh para aktivis PKI di kalangan kaum buruh Indonesia sangat luar biasa besarnya. Oleh karenanya, di dalam studi ini banyak perhatian akan diberikan pada berbagai postulat mengenai Marxisme-Leninisme sebagaimana mereka telah diterima oleh banyak serikat buruh.

Sosialisme Marxis, termasuk sosialisme demokratik maupun komunisme, mesti dibedakan dari setiap tipe sosialisme lain yang dikenal di Indonesia. Pengarang buku ini teristimewa memperhatikan sosialisme yang telah menjadi ideologi dasar dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Sosialisme ini dikenal sebagai Marhaenisme, sebuah nama yang untuk pertama kalinya digunakan oleh Dr. Soekarno (sekarang Presiden Republik) lebih dari tigapuluh tahun yang lalu. Istilah Marhaenisme berasal dari kata Marhaen yang adalah tipikal Indonesia, seorang buruh biasa, seorang pedagang kecil, seorang tukang/ahli kecil atau seorang pegawai

edi cahyono's LIBRARY

rendah Pemerintah, semua mereka itu hidup dalam kondisi-kondisi sederhana.

Menurut PNI, Marhaenisme adalah suatu tipe sosialisme, tetapi ia adalah suatu sosialisme yang khususnya diadaptasikan pada komunitas dan Jiwa Indonesia. Kaum Marhaenis yakin akan Sosio-Nasionalisme, yaitu nasionalisme berdasarkan perikemanusiaan dan gotong royong, nasionalisme yang menghendaki kerjasama dengan semua bangsa di dunia, Marhaenisme percaya akan Sosio-Demokrasi, yang berarti demokrasi sepenuhnya, tidak saja di bidang politik, tetapi juga demokrasi di dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Kaum Marhaenis menghendaki tanah dan kapital dikontrol oleh negarsa untuk kepentingan seluruh rakyat, agar persaingan yang boros di antara perusahaan-perusahaan akan dihapuskan, kaum buruh dijamin standar hidupnya, lenyapnya pengangguran dan, jika sistem itu menyebar ke selebihnya dunia, krisis-krisis ekonomi akan hilang, krisis-krisis akan lenyap. Perjuangan Marhaen untuk pendirian masyarakat marhaen, yaitu suatu masyarakat sosialisme berdasarkan azas-azas tersebut di atas. Sekali pun kaum Marhaen yakin akan perubahan-perubahan radikal dan revolusioner dalam komiunitas Indonesia, mereka ingin mencapainya melalui suatu partai politik. Partai ini ialah Partai Nasionalis yang bekerja atas azas-azas Marhaenisme dan berharap, melalui cara-cara demokratik, memperoleh kontrol di dalam Pemerintah negeri ini, dan dengan begitu melaksanakan filsafatnya ke dalam praktik. Untuk mencapai keberhasilan, para pemimpian gerakan Marhaenis mesti mampu mempengaruhi dan memimpin semua anggota Marhaen untuk bekerja bagi pendirian masyarakat yang dicita-citakan itu. Untuk mencapai keberhasilan, setiap partai politik yang bekerja berdasarkan azas-azas demokratik mesti mempunyai dukungan massa. Kaum Marhaenis oleh karenanya diharap aktif di dalam gerakan kaum tani, gerakan serikat buruh, gerakan pemuda, dan gerakan perempuan.[7]

[7] *Manifesto Marhaenisme*, diterbitkan oleh Dewan Partai Partai Nasional Indonesia, hlm. 7-14.

**SOBSI**

SOBSI, federasi serikat buruh yang terbesar di negeri ini, adalah gerakan serikat buruh sosialis par excellence. Ia juga dipandang sebagai federasi yang dikontrol oleh Partai Komunis, sekali pun para pemimpin SOBSI berkeras bahwa federasi itu dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi adalah non-partai, bebas, dan tidak didominasi oleh sesuatu partai politik apa pun. Bahwa SOBSI adalah sebuah gerakan serikat buruh sosialis jelas dari segala sesuatu yang telah dikatakan dan dilakukan oleh federasi itu mengenai semua isu penting di bidang politik maupun berkenaan dengan hubungan-hubungan industri. Konstitusi SOBSI yang sekarang, yang diterima pada Konferensi Nasional bulan Oktober 1952 dan disetujui oleh Kongres Nasionalnya yang kedua pada 20 Januari 1955, sama sekali tidak menyebutkan kata sosialisme. Namun banyak bagian konstitusi ini, khususnya mukadimah dan pasal-pasal mengenai azas-azas organisasi memberikan bukti akan suatu jiwa sosialis dan pandangan-pandangan komunis. Uraian mengenai kesengsaraan dan kesedihan proletariat Indonesia dan eksploitasi oleh Belanda dan kapitalisme dan imperialisme asing lainnya mirip dengan konsepsi sosialis klasik mengenai sistem kapitalis seperti penyataan akan hasrat untuk perdamaian dan kebencian terhadap perang. Rujukan kepada Amerika Serikat sebagai penghasut perang terpenting,[8] merupakan suatu tema komunis yang terkenal. Dan akhirnya, deklarasi bahwa SOBSI bergabung pada World Federation of Trade Unions menyempurnakan persyaratan sebagai gerakan serikat buruh di dalam orbit komunis. Sifat sosialis SOBSI juga telah diungkapkan oleh pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan, resolusi-resolusi yang dibuat, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama perjalanan hidupnya. Yang sama dapat dikatakan bagi serikat-serikat buruh yang berafiliasi. Laporan-laporan yang diajukan kepada konferensi-konferensi dan kongres-kongres SOBSI dan serikat-serikat buruhnya, dan diskusi-diskusi mengenai

[8] *Konstitusi SOBSI*, hlm. 13, Cf. *Peraturan Dasar SARBUPRI*, hlm. 13; *Peraturan Dasar PERBUM*, hlm.13, dsb.

edi cahyono's
LIBRARY

persoalan-persoalan ini memberikan suatu laporan lengkap mengenai kepemihakan sosialis mereka. Selanjutnya, konstitusi-konstitusi SOBSI sebelumnya, yaitu konstitusi yang disetujui selama Kongresnya yang Pertama pada bulan Mei 1947, dan yang digantikan oleh konstitusi yang sekarang pada tahun 1952, tidak merahasiakan cita-cita dan tujuan-tujuan sosialis federasi itu. Pasal 2 dari konstitusi 1947 menyatakan bahwa SOBSI berdasarkan sosialisme dan pada azas perjuangan kelas. Pasal 4 menentukan masyarakat sosialis sebagai tujuan akhir, sedangkan Pasal 5 menyerukan kepada kelas pekerja untuk memerangi kapitalisme dan imperialisme. Suatu pernyataan mengenai ideologi, ditambahkan pada konstitusi ini, menggambarkan perkembangan kesejarahan masyarakat menurut konsepsi Marxis mengenai tidak terelakkannya kehancuran sistem kapitalis. Pernyataan ini berakhir dengan pernyataan Leninis bahwa "... tanpa suatu teori revolusioner tidak akan ada gerakan revolusioner."[9]

Orang dapat mengajukan pertanyaan mengapa konstitusi lama SOBSI digantikan oleh suatu konstitusi baru yang sama sekali tidak menggunakan lagi kata sosialisme. Penjelasan resmi mengenai perubahan pada tahun 1952 itu ialah bahwa konstitusi yang sebelumnya itu sudah ketinggalan zaman dan tidak mencukupi lagi. Jelas, ketentuan-ketentuan baru mengenai persoalan struktur dan organisasi merupakan suatu perbaikan besar. Lagi pula, Pasal 3 Konstitusi baru mengenai keanggotaan, Pasal yang menjadikan SOBSI sebuah sentral persatuan dengan keanggotaan perseorangan langsung, menjawab maksud SOBSI menuju integrasi seluruh gerakan, membuat seluruh anggota biasa SOBSI tunduk pada suatu komando tunggal. Pengarang buku ini, namun, tidak mengetahui akan sesuatu penjelasan mengenai alasan dihilangkannya frase sosialisme, masyarakatr sosialis, dsb. ketika konstitusi baru itu disusun, padahal SOBSI jelas-jelas berlanjut sebagai sebuah gerakan serikat buruh sosialis dan Marxis. Peranggapan dapat dibuat bahwa maksud amandemen ialah menyajikan SOBSI sebagai sebuah gerakan serikat buruh yang non-politik, bebas dari asosiasi dengan

[9] Lenin, *What is to be Done*?, dalam *Selected Works*, Jilid II, hlm. 47.

sesuatu partai politik (baca: Partai Komunis).[10]

Kesimpulan bahwa SOBSI adalah sebuah gerakan sosialis juga membawa serikat-serikat buruh yang berafiliasi ke dalam kubu sosialis sebagai suatu konsekuensi sistem yang di bawahnya serikat-serikat buruh dan seluruh barisan anggota biasa (jelata) berjanji menerima dan setia pada konstitusi SOBSI itu.

**KBSI**

Federasi ini di dalam Ps. II konstitusinya menyatakan bahwa ia menganut cita-cita keadilan sosial. Interpretasi umum akan frase ini ialah bahwa yang setepatrnya dimaksud ialah sosialisme Pasal IV menyatakan bahwa yang menjadi tujuan federasi itu ialah menegakkan sebuah masyarakat berdasarkan keadilan sosial. Penulis buku ini berpendapat bahwa ini hanya sebuah nama lain bagi masyarakat sosialis.

Itulah yang disebutkan KBSI di dalam konstitusinya mengenai sosialisme. Sesungguhnya, kepemimpinan KBSI menjaga agar orang-orang lain tidak terdorong untuk memandang gerakan itu sebagai suatu organisasi politik yang terkait dengan suatu partai politik tertentu, PSI (Partai Sosialis Indonesia) misalnya. Namun begitu, dengan identifikasi para pemimpin KBSI, keraguan akan lenyap mengenai pengaruh kaum Sosialis atas Federasi itu. Banyak dari para pemimpin ini adalah anggota PSI.[11] Yang merupakan pengecualian ialah Ketua Kusna Puradiredja, yang bukan seorang anggota dari sesuatu partai politik. Hubungan pribadi pengarang buku ini dengan KBSI dan dengan banyak serikat buruh yang berafiliasi, memperkuat keyakinannya bahwa KBSI adalah suatu gerakan serikat buruh sosialis, dan bahwa kepercayaan sosialis KBSI ialah sosialisme demokratik, seperti digambarkan di muka

[10] Strategi dan taktik-taktik baru didiskusikan dan disetujui selama Konfernas (Konferensi Nasional) SOBSI yang berlangsung dari 27 September hingga 12 Oktober, 1952.

[11] Andi Zaenal Abidin, Sekretaris Jendral KBSI, A. H. Siregar, Wakil Ketua, dan Kuswari, wakil Sekretaris Jendral, adalah anggota-anggota terkemuka PSI.

edi cahyono's LIBRARY

dalam studi ini.

Serikat-serikat buruh KBSI juga jelas pengikut sosialisme demokratik. Persatuan Buruh Kereta Api (PBKA), tulang punggung federasi itu, yang Ketuanya juga seorang Ketua KBSI, menyatakan di dalam konstitusi barunya, yang diterima pada Kongres Keempat PBKA dalam bulan Oktober 1955, bahwa serikat buruh itu berdasarkan cita-cira keadilan sosial, perikemanusiaan, dan demokrasi (Pasal 2). Selanjutnya, serikat buruh itu menghendaki penghapusan eksploitasi terhadap kaum buruh (Pasal 4). Paragraf d dari Pasal 4 menuntut suatu struktur masyarakat dan perekonomian di mana setiap orang dapat hidup secara layak. Oleh karenanya perekonomian mesti diselenggarakan menurut suatu rencana tertentu. Ini sudah tentu adalah suatu konsepsi proses produksi sosialis. Pengaruh sosialisme demokratik di dalam PBKA lebih jauh dititikberatkan pada kenyataan bahwa berbagai pemimpin terkemuka serikat buruh ini adalah anggota Partai Sosialis.[12]

PERBUPRI (kaum buruh perkebunan), juga sebuah serikat buruh penting di dalam KBSI, menunjukkan banyak indikasi dari suatu kecondongan sosialis. Mukadimah konstitusinya memberikan suatu laporan mengenai masyarakat, mengenai struktur ekonomi, mengenai gerakan-gerakan sosial, dan mengenai hak-hak azasi manusia, kesemuanya dalam keserasian sempurna dengan filsafat dan metode sosialis. Mukadimah itu ditutup dengan deklarasi bahwa serikat buruh itu siap untuk berjuang bagi transformasi masyarakat sekarang menjadi sebuah masyarakat baru yang akan berdasarkan keadilan dan kesejahteraan, perdamaian, dan kebahagiaan. Sebagai tambahan, Pasal 2 konstitusinya menerima azas perjuangan kelas, dan menyatakan bahwa serikat buruh itu akan memerangi eksploitasi atas manusia. Di dalam kepemimpinan PERBUPRI, juga, terdapat sejumlah anggota PSI, di antara lain Ketuanya sendiri, Humala Silitonga.

[12] B.K.J. Tambunan, R.A. Santoso, Sudarsono, dan Komite Eksekutif PBKA lainnya adalah anggota Partai Sosialis Indonesia.

**KBKI**

KBKI tegas-tegas menyatakan dalam Pasal 2 konstitusinya bahwa ia berdasarkan Marhaenisme, yaitu, sosialisme Partai Nasional Indonesia (PNI), dan dalam Pasal 3 bahwa ia mengejar pendirian suatu masyarakat Marhaenis, yaitu, sebuah masyarakat sosialisme menurut gambaran yang diberikan oleh PNI. Dalam penyataan politik yang juga mencakup suatu penjelasan mengenai azas-azasnya, Marhaenisme ini digarisbesarkan lebih lanjut, sepenuh-penuhnya sesuai dengan definisi Marhaenisme yang dijumpai dalam konstitusi PNI.

Karena KBKI merupakan sebuah sentral persatuan, dengan cabang-cabang di berbagai perusahaan dan pabrik dengan nama KBKI dan di bawah konstitusi yang sama –sekali pun terdapat juga beberapa serikat buruh berafiliasi yang terpisah– ideologi KBKI Sentral berlaku bagi seluruh gerakan.

**HISSBI**

Federasi ini menyatakan dalam Pasal 3 Konstitusinya bahwa tujuannya ialah pembentukan sebuah masyarakat di mana tiada tempat bagi penindasan, eksploitasi dan kesengsaraan, suatu masyarakat berdasarkan keadilan sosial dan demokrasi. Lebih lanjut, kenyataan bahwa bagian besar pemimpin HISSBI adalah anggota Partai Buruh memajukan penyebar-luasan cita-cita sosialis partai politik ini.

**SOBRI**

Hubungan erat federeasi ini dengan Partai Murba dan kenyataan bahwa bagian besar pemimpin SOBRI adalah anggota partai politik ini, menentukan watak sosialis dari SOBRI. Lebih lanjut, Paal II dari konstitusi SOBRI menyatakan bahwa federasi itu berdasarkan sosialisme. Pernyataan ini disusul dengan penegasan perlawanannya terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, feodalisme, dan

edi cahyono's
LIBRARY

kolonialisme! Pasal 3 menentukan tujuan SOBRI, yaitu penegakan suatu masyarakat sosialis, dan Pasal VIII paragraf 5 menuntut nasionalisasi dan sosialisasi bank-bank, industri dan perusahaan agrikultur.

**GSBI**

Federeasi kecil ini menganut azas-azas sosialisme berdasarkan demokrasi (Pasal 2 konstitusinya). Pasal 3 menyebutkan masyarakat sosialis sebagai tujuan federasi itu, sedangkan pasal-pasal lain juga merujuk pada cita-cita dan metode sosialis

**Serikat-serikat Buruh Merdeka**

Kedudukan serikat-serikat buruh merdeka memperlihatkan beragam pengaruh ideologi.

PGRI (Perserikatan Guru) yang besar dan penting, sambil menyatakan dalam Pasal II konstitusinya bahwa perserikatan itu didasarkan pada azas keadilan sosial dan demokrasi, perserikatan itu melakukan yang sebisa-bisanya untuk membuktikan bahwa ia mempertahankan dirinya jauh dari pengaruh partai-partai politik. Namun kenyataannya ialah bahwa kaum sosialis, komunis dan marhaenis, kesemuanya mempunyai beberapa pengaruh atas perserikatan itu.

SBBSI (pegawai bisnis perbankan) juga menganut cita-cita sosialis dan menuntut keadilan sosial. Ketuanya, R.B. Sihotang, adalah seorang sosialis dan anggotra Partai Buruh. Yang sama ialah kedudukan SSPTT (pegawai pos non-SOBSI); Ketuanya, R. Asraruddin, adalah Sekretaris Jendral Partai Buruh.

SB KEMPEN (pegawai Kementerian Penerangan yang penting) mempunyai banyak anggota PNI (Partai Nasional Indonesia) di antara para pemimpinnya dan anggota biasa sehingga marhaenisme merupakan suatu topik yang sering didiskusikan dalam serikat buruh ini.

Akhirnya, SPSI (serikat buruh pelayaran) mempunyai sejumlah anggota Partai Sosialis di antara para pemimpinnya.

**Ringkasan**

Survei ini menunjukkan bahwa seluruh gerakan serikat buruh Indonesia telah mengikatkan dirinya pada tujuan-tujuan dan cita-cita sosialis, apabila orang sependapat bahwa serikat-serikat buruh Muslim juga sosialistik dalam pandangan mereka. Ini menentukan watak politik dari gerakan serikat buruh Indonesia. Ini berarti bahwa agitasi dan kegiatan serikat-serikat buruh akan melayani perjuangan sosialis di Indonesia.

Persoalan yang menentukan ialah apakah sosialisme demokratik atau komunisme yang mesti berlaku dalam jangka panjangnya, apakah kaum sosialis demokratik (termasuk Partai Nasionalis) atau Partai Komunis yang akan muncul sebagai pemenang dari perjuangan sekarang untuk kekuasaan di atas pentas politik Indonesia.

Dalam halaman-halaman berikutnhya suatu laporan akan diberikan mengenai berbagai cara yang dengannya pengaruh sosialis beroperasi. Suatu usaha juga akan dilakukan untuk menjejaki dan mengidentifikasikan asal usul dan sumber-sumber berbagai konsep sosialis mengenai masalah-masalah serikat-serikat buruh.

## Kesadaran kelas dan Teori Perjuangan Kelas

### Serikat Buruh sebagai Organisasi Kelas

Pengaruh sosialisme atas serikat-serikat buruh Indonesia membawa serta bersamanya penyebarluasan konsep kaum buruh sebagai sebuah kelas dan agitasi bersasarkan teori perjuangan kelas. Sebagaimana sudah diketahui sebelumnya, sosialisme yang dipropagandakan di Indonesia sejak tahun-tahun 1910-an selalu adalah yang didasarkan pada ajaran-ajaran Marx dan Engels. Dan, dalam menafsirkan marxisme, ketentuan-ketentuan dari Lenin

edi cahyono's
LIBRARY

telah diterima, secara sadar dan secara tidak sadar, bahkan para tokoh serikat buruh yang tidak menganggap Marxisme di dalam keseluruhannya sebagai yang cocok bagi kondisi-kondisi Indonesia, dan yang secara tegas menolak Leninisme, bagaimana pun berpikir, berbicara, dan bertindak dalam pengertian kontroversi-kontroversi kelas. Hanya kaum Marhaenis secara terbuka menolak sosialisme Marx, termasuk konsepsi Marxis mengenai perjuangan kelas yang tidak mengenal ampun. Sebagai gantinya itu, kaum Marhaenis menghendaki kerjasama di kalangan semua kelompok nasional bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh serikat buruh Muslim dengan tegas menyatakan perjuangan kelas tidak sahih dan bertentangan dengan ajaran Islam.

**SOBSI**

SOBSI dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi mendasarkan pandangan mereka sepenuhnya pada azas-azas Marxis dan Leninis, termasuk doktrin mengenai perjuangan kelas. Mereka tidak menyebutkan azas-azas ini di dalam konstitusi-konstitusi mereka, karena SOBSI dan yang berafiliasi selama bertahun-tahun secara berhati-hati menjaga ketentuan untuk mengindari setiap penggunaan terminologi Marxis dan Leninis dalam konstitusi-konstitusi mereka. Tetapi di dalam kongres-kongres, konferensi-konferensi dan sidang-sidang pendidikan mereka, laporan-laporan, diskusi-diskusi dan ceramah-ceramah memuat parafrase-parafrase Marxis-Leninis tradisional, dengan banyak kutipan kata-kata sesungguhnya dari Marx, Engels, Lenin dan Stalin, termasuk seringkali rujukan-rujukan pada pengalaman para kawan-kawan di Uni Sovyet yang besar, di Tiongkok, dan di demokrasi-demokrasi rakyat lainnya.

Konstitusi-konstitusi lama SOBSI, yang telah digantikan oleh yang sekarang pada tahun 1952, secara khusus menyebutkan di dalam Pasal 2 bahwa federasi mendasarkan kegiatan-kegiatannya pada perjuangan kelas. Dan Konferensi Nasional pada tahun 1952 yang melahirkan konstitusi yang sekarang, mendiskusikan sebuah laporan

dari Njono, Sekretaris Jendral, di mana diajukan keluhan bahwa SOBSI telah membuat banyak kesalahan di masa lalu. Di antaranya, ditunjukkan bahwa SOBSI telah gagal memahami dan menjelaskan perjuangan kelas dalam arti dan konsekuensi-konsekuensi sepenuhnya, bersama dengan penerapannya pada kondisi-kondisi-khusus Indonesia. Dalam Konferensi yang sama itu, wakil *World Federation of Trade Unions,* M. Henri Turrel, mengulangi pentingnya suatu pelaksanaan sejati garis perjuangan kelas.

Konsep agar kaum buruh membentuk suatu kelas, yang terpisah dari dan antagonistik terhadap kelas-kelas lain, telah memaksa kaum Marxis untuk memandang dan membangun serikat-serikat buruh sebagai organisasi-organisasi kelas. Hal ini berarti, di satu pihak, bahwa semua buruh, tanpa peduli ras, warna kulit, jenis kelamin, religi dan keyakinan politik, mesti bergabung pada serikat-serikat buruh, dan, di lain pihak, agar orang yang bukan berpenghasilan upah tidak diikutsertakan dalam organisasi-organisasi ini. Sebagai suatu kelas, kaum buruh mesti bersandar pada kekuatan mereka sendiri dan mesti mengembangkan suatu kekuasaan melalui persatuan di dalam kelas dengan menjalankan perjuangan kelas secara terus-menerus dan tanpa mengenal ampun. Serikat-serikat buruh, sebagai organisasi-organisasi kelas, berada untuk mempersatukan kaum buruh, membuat mereka lebih dan semakin sadar akan kelas mereka dan nasib mereka, untuk mengembangkan kekuatan dan membudidayakan kekuasaan. Melalui serikat-serikat buruh mereka kaum buruh akan mampu memerangi kaum kapitalis individual tanpa berhenti, dan, dengan melakukan itu, menjadikan memerangi kapitalisme itu suatu kebiasaan.

Sambil mendorong dilaksanakan secara ketat teori mengenai kelas dari perjuangan kelas, SOBSI, namun, berpendirian bahwa tahap sekarang dari Revolusi Indonesia memerlukan persatuan dan tekad seluruh rakyat Indonesia untuk memerangi kapitalisme asing dan untuk menentang bahaya imperialisme yang masih mengancam kedaulatan Republik yang muda ini. Untuk sementara waktu, SOBSI

edi cahyono's
LIBRARY

karenanya menyarankan suatu kerjasama kelas dari semua kelompok nasional, kecuali kaum reaksioner, dan komprador dan kakitangan kapitalisme dan imperialisme asing. Untuk tujuan ini, pembentukan sebuah Front Persatuan merupakan satu bagian penting dari program SOBSI.

**KBSI**

KBSI dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya diam mengenai masalah perjuangan kelas, di dalam konstitusi-konstitusi mereka maupun dalam pernyataan-pernyataan dan resolusi-resolusi resmi mereka. Namun, terdapat alasan untuk percaya bahwa doktrin Marxis ini memainkan satu peranan di dalam pikiran banyak pemimpin dan anggota KBSI dan yang berafiliasi dengannya, karena banyak anggota Partai Sosialis aktif dalam federasi ini, sebagaimana telah didiskusikan lebih dini dalam tesis ini.

**SBII**

Dan apakah kedudukan serikat buruh Muslim ini? Sebagai suatu gerakan Muslim, dan suatu bagian dari Partai Masyumi dan dengan sengit menentang komunisme, SBII menolak semua teori Marxis secara tegas dan sepenuhnya sebagai hal yang bersifat mendasar. Oleh karenanya gerakan serikat buruh tidak mempunyai ruang untuk konsepsi-konsepsi seperti kelas pekerja dan perjuangan kelas. Sebagai gantinya, SBII menganjurkan saling pengertian dan saling bekerjasama antara semua orang, antara kerja dan kapital, antara serikat buruh dan manajemen untuk keuntungan keduanya dan sesuai kepentingan komunitas sebagai satu keseluruhan. Azas panduan ini berasal dari ungkapan Qur'an bahwa "Jangan terdapat permusuhan kecuali terhadap kebatilan (dalam Bahasa Arab: *Fala 'udwana illa 'ala 'diolimien*)."[13]

[13] *Anggaran Dasar SBII*, Ps. II (b).

**KBKI**

KBKI memberikan suatu tinjauan mengenai doktrin-doktrin Marxis dalam pernyataan politiknya, dan menyimpulkan bahwa sosialisme yang dianut gerakan itu sepenuhnya berbeda dari Marxisme. Sebagai kaum Marhaenis dan bekerja menuju pembentukan suatu keluarga besar Indonesia yang hidup dalam persatuan dan kebahagiaan, para anggota KBKI tidak percaya akan suatu peperangan kelas di dalam nasion Indonesia. Semua dendam dan permusuhan mesti ditujukan terhadap eksploitasi dan para penindas asing!

**HISSBI**

Federasi ini lebih definitif dan terbuka di dalam penerimaan teori mengenai perjuangan kelas. HISSBI menyatakan bahwa ia mendasarkan perjuangannya pada kekuatan kelas pekerja dan perjuangan ini mesti dipandang dan dijalankan sebagai suatu perjuangan kelas revolusioner.[14] Marxisme memainkan suatu peranan penting di dalam propaganda dan agitasi HISSBI. Namun, para pemimpin HISSBI berpendapat bahwa Marxisme jangan dipandang sebagai satu dogma, sebagai meliputi-semua (dalam pengertian waktu dan ruang) dan sebagai tidak dapat dilanggar. Sebaliknya, Marxisme merupakan suatu produk dari Eropa yang diindustrialisasi dan dari pertengahan abad ke sembilanbelas.[15] Marxisme ialah teori mengenai masyarakat dalam gerak. Dalam membenarkan penilaian kritikal mengenai Marxisme ini, para ahli teori HISSBI (yang pada waktu bersamaan adalah pemimpin Partai Buruh) memakai kata-kata bersejarah Engels dan Lenin. "Ajaran kita," demikian Engels, dengan merujuk pada dirinya sendiri dan pada Marx, temannya, "bukan sebuah dogma, melainkan sebuah panduan untuk beraksi."[16] Dan Lenin pernah berkata: "Kita tidak

[14] *Anggaran Dasar HISSBI*, Ps. IV.

[15] Diketahui melalui hubungan pribadi pengarang buku ini dengan HISSBI.

[16] Lenin, mengutip F. Engels, dalam "Certain Features of the Historical Development of

edi cahyono's
LIBRARY

memandang teori Marxis sebagai sesuatu yang sermpurna dan tidak bisa dilanggar; sebaliknya, kita yakin bahwa ia hanya meletakkan dasar dari ilmu yang kaum sosialis mesti kembangkan lebih jauh ke semua arah jika mereka hendak mengikuti laju kehidupan."[17]

Karenanya, para pemimpin HISSBI menegaskan bahwa mereka dapat menjadi kaum Marxis yang semurni-murni mungkin, tanpa menjadi komunis atau mesti diidentifikasikan dengan SOBSI. "Perbedaan-perbedaan kami dengan kaum komunis sangat banyak," demikian para pemimpin HISSBI dan Partai Buruh suka mengatakan, "dan perbedaan-perbedaan ini berasal dari kenyataan bahwa kita menafsirkan, memajukan, memperkaya dan menerapkan Marxisme dengan cara kita sendiri, dengan memperhitungkan kondisi-kondisi yang khas Indonesia dan situasi dunia sekarang, dengan kepentingan Indonesia sebagai sasaran pertama."[18] Singkatnya, hasilnya ialah bahwa HISSBI memandang dirinya Marxis sejati, dalam pengertian bahwa ia tidak menyimpang dari sesuatu ajaran Marxis secara sengaja di dalam mencari cara-cara dan pikiran-pikiran baru. Para pemimpin HISSBI berpendapat, sesungguhnya, bahwa beberapa dari kata-kata setepatnya dari doktrin-doktrin Marxis tidak dapat, atau belum dapat, diterapkan di Indonesia; bahwa Marx tidak cukup memberikan petunjuk-petunjuk bagi masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari Revolusi. Suatu kelainan penting dari Marxisme ialah bahwa HISSBI menunjukkan penghormatan terhadap religi, dan bahwa di kalangan para pemimpin HISSBI dan anggota biasa terdapat kaum Muslin dan Kristiani yang baik.

Marxism," *Marx, Engels, Marxism*, hlm. 294.

[17] Lenin, *Our Program, Marx, Engels, Marxis*, hlm.126.

[18] Pengarang buku ini mengenal dengan cita-cita HISSBI dan Partai Buruh melalui hubungan pribadi.

**SOBRI**

Federasi ini, yang terkenal karena frase-frase revolusionernya, yang secara berlimpahan digunakan oleh para pemimpinnya di dalam persidangan maupun di luar persidangan, menyatakan di dalam konstitusinya bahwa perjuangannya didasarkan pada azas perjuangan kelas, bahwa perjuangan kelas merupakan hak yang tidak dapat direnggut dari kelas buruh!

**GSBI**

Federasi ini diam mengenai perjuangan kelas. Sebagai sebuah federasi serikat-serikat buruh, dari bagian besar pegawai Pemerintah, GSBI tidak membutuhkan doktrin-doktrin revolusioner seperti itu. Namun, karena federasi ini juga di dalam orbit sosialis, maka mungkin sekali bahwa konsep kaum buruh sebagai suatu kelas dan teori mengenai perjuangan kelas dikenal di kalangan kepemimpinan GSBI dan anggota biasa.

**Serikat-serikat Buruh Merdeka**

Sebagaimana telah didiskusikan di muka, serikat-serikat buruh merdeka juga sosialistik dalam pandangan dan aspirasi-aspirasi mereka. Hal ini dan kenyataan bahwa kaum sosialis memainkan satu peranan dalam banyak dari serikat buruh itu, berarti bahwa penyebaran teori-teori seperti itu sebagai teori kelas buruh dan perjuangan kelas.

**Ringkasan**

Ini mengakhiri laporan mengenai derajat penerimaan teori kelas buruh dan perjuangan kelas oleh mayoritas perburuhan terorganisasi Indonesia. Dan karena sosialisme telah sangat luas disebarkan selama banyak dasawarsa di seluruh negeri, termasuk banyak dari cita-cita dan slogan-slogan Marxis, istilah-istilah

edi cahyono's
LIBRARY

seperti kelas buruh, kesadaran kelas, dan perjuangan kelas, telah menjadi pengertian-pengertian umum di kalangan pangsa-pangsa besar rakyat Indonesia. Dan orang jangan salah/kurang memperhitungkan arti penting keadaan ini. Sekurang-kurangnya, ia telah menjadikan agitasi dan propaganda di kalangan kaum buruh Indonesia sangat revolusioner. Ia telah menjadikan serikat-serikat buruh Indonesia militan dan agresif. Ia telah menjadikan negeri ini sebuah benteng gerakan-gerakan revolusioner.

**Serikat Buruh sebagai Sekolah Sosialisme**

Kaum sosialis pada umumnya, dan kaum komunis khususnya, memberikan arti penting tertentu pada serikat-serikat buruh sebagai organisasi-organisasi pendidikan. Sudah sangat dini mereka menemukan bahwa serikat-serikat buruh adalah sekolah, sekolah sosialisme, sekolah komunisme. Kaum sosialisme memandang serikat-serikat buruh sebagai sekolah, tidak saja sebagai sekolah dalam arti harfiah kata itu, melainkan sebagai lembaga-lembaga di mana orang mendapatkan pendidikan klasik dalam bentuk makalah-makalah yang dipersiapkan oleh para guru dan instruktur yang ditunjuk secara khusus, tetapi teristimewa sebagai pusat-pusat pelatihan praktik di mana kaum buruh menarik pelajaran dari pengalaman mereka di dalam organisasi, belajar dari perjuangan terhadap kaum kapitalis, menangkap manfaat persatuan dan bahaya perbedaan pendapat dan menjadi mengenal taktik-taktik, kekuatan, dan kelemahan musuh, yaitu kaum kapitalis.

Serikat-serikat buruh mengumpulkan dan mengerahkan massa-kaum buruh yang luarbiasa besarnya, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, religi, keyakinan politik, dan tingkat pendidikan. Dan lazimnya, kaum buruh kekurangan pengalaman dan latihan politik, Karenanya, serikat-serikat buruh menyuguhkan suatu kesempatan besar bagi para ahli strategi politik dan para ahli agitasi untuk memenangkan massa luas rakyat bagi cita-cita dan maksud-maksud mereka.

Dalam pamfletnya yang termashur, What is to be Done?, Lenin menegaskan bahwa belum terdapat kesadaran sosial-demokratik di kalangan kaum buruh.

> Itu (kesadaran sosial-demokratik) hanya dapat dibawa kepada mereka dari luar. Sejarah semua negeri membuktikan bahwa kelas buruh, secara khususnya dengan usahanya sendiri, hanya mampu mengembangkan kesadaran serikat buruh, yaitu, keyakinan bahwa perlu untuk bergabung dalam serikat-serikat buruh, melawan kaum majikan dan berusaha memaksa pemerintah mengeluarkan perundang-undangan perburuhan yang diperlukan, dsb.[19]

Karenanya, kesadaran sosial-demokratik ini mesti dibawa kepada kaum buruh melalui sesuatu sistem pendidikan, jaitu pendidikan politik. Mengenai pendidikan politik ini Lenin mengatakan sebagai berikut:

> Cukupkah untuk membatasi diri sendiri pada propaganda permusuhan kelas buruh terhadap otokrasi? Sudah tentu tidak cukup. Tidak cukup untuk menjelaskan kepada kaum buruh bahwa mereka secara politik tertindas (tidak lebih daripada menjelaskan kepada mereka bahwa kepentingan mereka antagonistik dengan kepentingan para majikan). Manfaat mesti diambil dari setiap contoh konkret mengenai penindasan ini untuk maksud agitasi (secara sama bagaimana kita mulai menggunakan contoh-contoh konkret mengenai penindasan ekonomi untuk maksud agitasi). Dan sejauh penindasan politik mempengaruhi semua macam kelas di dalam masyarakat, sejauh ia menyatakan dirinya sendiri dalam berbagai bidang kehidupan dan aktivitas, dalam kehidupan industri, kehidupan madani, dalam kehidupan pribadi dan keluarga, kehidupan ilmu pengetahuan, dsb. dsb., tidak terbukti bahwa kita tidak akan memenuhi tugas kita mengembangkan kesadaran politik kaum buruh jika kita tidak melakukan pengorganisasian penelanjangan politik otokrasi dalam semua aspeknya? Untuk menjalankan agitasi di sekitar contoh-contoh konkret penindasan, contoh-contoh ini mesti diungkapkan ...[20]

Tugas mendidik massa kaum buruh ini di dalam semangat sosialisme (sosial-demokrasi, kemudian: komunisme) mesti diberikan/diserahkan kepada organisasi kaum buruh sendiri, yaitu serikat-serikat buruh. Dalam pidatonya pada sidang gabungan para Delegasi ke Kongres Sovyet-Sovyet Ke-delapan, para anggota Dewan Pusat

[19] Lenin, "What is to be Done?," *Selected Works*, Jilid II, hlm. 53.

[20] *Ibid.*, hlm. 78

edi cahyono's LIBRARY

Serikat-serikat Buruh Seluruh-Rusia dan Dewan Serikat-serikat Buruh Gubernia Moskow-Anggota RCP (B), pada 30 Desember, 1920, Lenin mengatakan bahwa:

> ... mereka (serikat-serikat buruh) adalah organisasi pendidikan, organisasi yang mendaftar, yang melatih, mereka adalah sekolah-sekolah, sekolah administrasi, sekolah manajemen, sekolah komunisme. Mereka bukan tipe sekolah biasa, karena tidak ada guru-guru dan murid-murid; yang kita punyai ialah sebuah perpaduan yang luarbiasa khususnya dari apa yang ditinggalkan kapitalisme kepada kita, dan yang tidak dapat tidak meninggalkan pada kita, detasemen-detasemen revolusioner yang maju, boleh dikatakan, barisan depan revolusioner kaum proletariat, yang dipromosikan dari barisan-barisannya sendiri.[21]

Sebelum Lenin, Marx sudah mempunyai gagasan bahwa serikat-serikat buruh mesti menjadi sekolah-sekolah sosialisme. Dalam meringkas pandangan Marx mengenai hal ini, A. Lozovsky[22] memberitahukan kepada kita bahwa

> Marx menganggap serikat-serikat buruh pusat-pusat pengorganisasian, pusat-pusat untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan kaum buruh, organisasi-organisasi untuk memberikan pada kaum buruh suatu pelatihan dasar kelas..... Kenyataan bawa kaum buruh yang berserakan, saling bersaing satu sama lain, kini mulai merapatkan barisan mereka dan keluar bersama-sama (yang paling penting bagi Marx). Dalam hal ini ia (Marx) melihat suatu jaminan bahwa kelas buruh akan berkembang menjadi suatu kekuatan yang berdiri sendiri. Marx dan Engels berulang-ulang merujuk dalam karya-karya mereka pada gagasan bahwa serikat-serikat buruh adalah sekolah solidaritas, sekolah sosialisme.[23]

Sudah sedini tahun 1848, Marx dan Engels menunjukkan bahwa "Buah sesungguhnya perjuangan-perjuangan mereka (yaitu dari kaum buruh dengan serikat-serikat buruh mereka)[24] terletak, tidak di dalam hasil langsung, melainkan dalam serikat kaum buruh yang semakin-berkembang."[25]

[21] Lenin, *Selected Works*, Jilid IX, hlm. 4.

[22] Pseudonim untuk Salomon Dridzo, sebelumnya ketua Red Internationl of Trade Unions.

[23] A. Lozovsky, *Marx and the Trade Unions*, hlm., 15-16.

[24] Dalam kurung yang ditambahkan oleh penulis buku ini.

[25] Marx-Engels, *Manifesto of the Communist Party*, Moskow 1953, hlm. 60-61

Lozovsky selanjutnya mengatakan:[26]

> ... serikat buruh adalah sebuah sekolah kelas. Ia mengumpulkan kaum buruh yang berserakan, melakukan pekerjaan pendahuluan untuk mengubah kaum buruh ini menjadi suatu kelas, dan mereka berubah menjadi suatu kelas bukan karena pengetahuan yang diperoleh dari buku-buku pelajaran, melainkan pengetahuan yang diperoleh dalam perjuangan-perjuangan kelas. Di negeri-negeri kapitalis pendidikan ini didapat di dalam perjuangan terhadap kapitalisme (pemogokan, demonstrasi, pemberontakan, atau sesuatu bentuk perjuangan lainnya).

Lozovsky kemudian merujuk pada kata-kata berikut ini yang berulang kali dinyatakan oleh Lenin:[27]

> Serikat-serikat buruh adalah sekolah-sekolah untuk pemersatuan, sekolah solidaritas, sekolah untuk belajar administrasi dan manajemen.

Gagasan untuk menjadikan serikat-serikat buruh alat bagi indoktrinasi dan pelatihan massa kaum buruh untuk perjuangan besar sosialis telah dengan cermat dipelajari dan dilaksanakan di dalam praktik oleh kaum Bolsyewik dalam membangun serikat-serikat buruh mereka, sebelum, selama, dan setelah Revolusi Oktober. Azas itu kini diwujudkan di dalam Konstitusi Serikat-serikat Buruh USSR.

Dalam sebuah buku lain, Lozovsky menggambarkan salah satu dari tugas-tugas penting serikat-serikat buruh di Uni Sovyet sebagai "... tugas mendidik massa di dalam semangat Komunisme. Serikat-serikat buruh mempunyai alat-alat organisasi dan materi yang luar biasa besarnya yang tersedia untuk melanjutkan pekerjaan ini."[28] Dan selanjutnya:

> ... Serikat-serikat buruh USSR, sebagai sekolah bagi pendidikan-kembali massa, bagi pengajaran kepada mereka bagaimana mengelola dan bagaimana memerintah, sebagai sekolah-sekolah Komunisme, mengambil suatu bagian yang paling aktif di dalam membangun Negara Sosialis baru, mengambil suatu bagian yang aktif dalam kehidupan politik dan ekonomi negeri itu dalam

[26] A. Lozovsky, *Marx and the Trade Unions*, hlm. 175-176.

[27] *Ibid.*, hlm. 177

[28] A. Lozovsky, *Handbook on the Soviet Trade Unions*, hlm. 93

edi cahyono's LIBRARY

memperkuat kemampuan pertahanan negeri itu. Serikat-serikat buruh menjalankan pekerjaan pendidikan politik dengan suatu harapan untuk menarik 22 juta (dalam tahun 1937)[29] anggota ke dalam tugas memerintah Negara Sosialis, dengan suatu harapan menjadikan mereka pejuang-pejuang yang sadar untuk membangun suatu masyarakat komunis.[30]

Salah satu dari tugas yang paling penting dari serikat-serikat buruh ialah tugas menggenangi massa dengan suatu jiwa internasionalisme.[31]

Konstitusi Serikat-serikat Buruh USSR menentukan dalam mukadimahnya tugas pendidikan dari serikat-serikat buruh Sovyet sebagai berikut:

Serikat-serikat buruh menanamkan pada keanggotaan mereka semangat patriotisme Sosialis dan suatu sikap Komunis terhadap pekerjaan dan terhadap milik umum sosialis; mereka terlibat di dalam pelatihan komunis rakyat pekerja dan dalam memajukan standar kebudayaan dan profesional kaum buruh pada personel teknik; mereka menggenangi para anggota mereka dengan suatu kesadaran akan internasionalisme proletar dan berjuang untuk persatuan gerakan kelas buruh internasional dan untuk perdamaian abadi dan demokrasi di seluruh dunia.[32]

Serikat-serikat buruh adalah sebuah organisasi pendidikan, sebuah organisasi untuk mendaftar dan melatih kekuatan-kekuatan, mereka adalah sebuah sekolah, sebuah sekolah administrasi, sebuah sekolah manajemen, sebuah sekolah Komunisme.[33]

Dan selanjutnya dalam mukadimah ini:

Serikat-serikat buruh membantu para anggota serikat buruh untuk menaikkan tingkat pemahaman ideologi dan politik dan pendidikan umum mereka; menyebarluaskan pengetahuan politik dan ilmu dan secara ekstensif mempopulerkan metode-metode produksi yang diperbaiki.[34]

Dalam paragraf I, seksi 3, Konstitusi ini dinyatakan bahwa anggota serikat buruh terikat pada tugas untuk memperbaiki kecakapannya,

[29] Dalam tanda kurung ditambahkan oleh penulis.

[30] A. Lozovsky, *Handbook on the Soviet Trade Unions*, hlm. 95.

[31] *Ibid*.

[32] *Konstitusi Serikat-serikat Buruh USSR*, Mukadimah.

[33] *Ibid*.

[34] *Ibid*.

menguasai panggilannya secara menyeluyruh.

Garis ini meluas pada semua negeri komunis lainnya, di mana kaum buruh digenangi dengan semangat yang sama, berkat serikat-serikat buruh komunis.

Mari kita ambil Tiongkok sebagai sebuah contoh. Pada bulan Mei 1953, Kongres Serikat-serikat Buruh Seluruh-Tiongkok yang Ketujuh berlangsung di Bejing, pada dasarnya untuk menerima sebuah konstitusi baru bagi federasi serikat-serikat buruh Tiongkok. Dalam mengajukan rancangan Konstitusi baru itu, Hsu Chih-chen, salah seorang dari duapuluhempat anggota Presidium dan pada waktu bersamaan salah seorang dari delapan anggota Sentral Sekretariat dari Federasi Serikat-serikat Buruh Seluruh Tiongkok, menyampaikan pidato pendahuluan yang di dalamnya ia mengesahkan gagasan-gagasan Sovyet mengenai gerakan serikat buruh. Di antara lain ia memberitahukan kepada konvensi itu bahwa:[35]

> Serikat-serikat nburuh Tiongkok harus mendidik massa luas kaum buruh dalam semangat patriotisme dan komunisme dan terus-menerus mendidik mereka untuk memahami identitas negara dan kepentingan individual, dan mengenai kepentingan jangka panjang dan langsung, dan berusaha untuk menaikkan tingkat-tingkat politik, kebudayaan dan teknik mereka. Mereka harus sepenuhnya mengembangkan semangat internasionalisme, secara aktif berpartisipasi dalam gerakan kelas buruh internasional, mengusahakan persatuan dan solidaritas gerakan ini dan untuk membela suatu perdamaian abadi di Timur Jauh dan seluruh dunia.

Kongres kemudian menerima, pada 10 Mei 1953, Konstitusi Serikat-serikat Buruh Republik Rakyat Tiongkok yang baru. Di dalam Mukadimah Konstitusi ini, dinyatakan bahwa:

> Serikat-serikat buruh itu, di bawah kepemimpinan Partai, telah menjadi sebuah sekolah administrasi, sebuah sekolah manajemen dan sebuah sekolah Komunisme bagi kaum buruh.
>
> Tugas-tugas yang paling penting serikat-serikat buruh Tiongkok selama periode pembangunan nasional adalah memperkuat persatuan kelas buruh ... mendidik kaum buruh untuk secara sadar mematuhi undang-undang dan dekret-dekret

[35] *Seventh All-China Congress of Trade Unions* hlm. 88.

edi cahyono's LIBRARY

> negara dan disiplin kerja ... (Serikat-serikat buruh Tiongkok) mesti menjalankan kepemimpinan kolektif, persuasi dan pendidikan sebagai metode utama kerja mereka. Mereka mesti menunjukkan perhatian atas kepentingan massa, mengkristalisasi pandangan-pandangan mereka dan memajukan kritik dan oto-kritik.
>
> Serikat-serikat buruh Tiongkok mesti terus-menerus mendidik kaum buruh dalam internasionalisme dan secara aktif ambil bagian di dalam gerakan kelas buruh internasional.

Dan Pasal 4 Konstitusi itu mewajibkan para anggota serikat-serikat buruh Tiongkok "untuk secara penuh perhatian melibatkan diri mereka dalam studi-studi politik, teknik dan kebudayaan untuk meningkatkan kesadaran kelas mereka dan emampuan bekerja."[36]

Nasehat, Hsu Chih-chen dengan demikian diterima oleh Kongres, dan gerakan serikat buruh Tiongkok kemudian secara nyata dan formal diintegrasikan ke dalam gerakan serikat buruh komunis dunia di tingkat yang dicapai di dalam pendirian Demokrasi-demokrasi Rakyat; yaitu suatu gerakan serikat buruh yang secara terbuka dan secara formal menerima kepemimpinan Partai Komunis dan yang menjadi semacam organ resmi dari Negara Komunis.

Mari kita sekarang memeriksa pengaruh konsep Marxis-Leninis ini pada serikat-serikat buruh di Indonesia.

Tiada diragukan lagi bahwa SOBSI dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya menganut gagasan untuk menjadikan serikat-serikat buruh itu tunduk pada tugas besar dalam mendidik berjuta massa rakyat pekerja Indonesia, menjadikan mereka sadar kelas dan mempersiapkan mereka bagi perjuangan besar untuk membentuk suatu tatanan baru di Indonesia. Konstitusi SOBSI itu sendiri tidak memuat ketentuan serikat-serikat buruh itu sebagai sekolah sosialisme, sebagaimana kasusnya dengan konstitusi-konstitusi serikat-serikat buruh Sovyet dan Tiongkok. Ini sudah tentu, masuk akal, karena Indonesia, dan Partai Komunis di Indonesia, masih belum mencapai suatu kedudukan pada tingkat negeri-negeri itu dan partai-partai komunis di negeri-negeri itu.

[36] *Konstitusi Serikat-serikat Buruh Republik Rakyat Tiongkok*, 1953, Pasal 4.

Hal yang penting di Indonesia ialah bahwa para pemimpin SOBSI mengetahui dan memahami tugas gerakan serikat buruh ini. Pengarang buku ini mengetahui dari pengamatan pribadi bahwa para pemimpin dan aktivis SOBSI dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi sepenuhnya memahami tugas ini dan menjalankannya dengan pengabdian dan pengetahuan penuh. Dan memang massa buruh Indonesia memerlukan pendidikan dan pelatihan, sementara kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik negeri ini, dan suasana revolusioner, justru menyajikan kesempatan-kesempatan yang bagus sekali bagi suatu pekerjaan seperti itu.

Tema bahwa serikat-serikat buruh adalah tempat yang paling baik bagi kaum buruh untuk belajar, merupakan suatu topik kegemaran para ahli propaganda serikat buruh. Kesengsaraan, eksploitasi dan keterbelakangan kelas pekerja Indonesia, kekurangaqn-kekurangan komunitas Indonesia dan Negara (Pemerintah) senantiasa terekspose secara gamblang. Kaum buruh didorong untuk belajar dari pengalaman-pengalaman mereka dengan pemogokan, demonstrasi, rapat-rapat umum dan aksi-aksi terpadu lainnya, dari praktik-praktik Pemerintah dalam hubungan dengan perburuhan dan di bidang-bidang lain, dari sikap-sikap reaksioner kaum kapitalis asing, dan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum imperialis terhadap kedaulatan Republik Indonesia, dan dari segala sesuatu yang dengannya kaum buruh bersentuhan dalam perjuangan mereka untuk suatu kehidupan yang lebih baik dan untuk kesejahteraan negeri dan rakyat. Belajar dari pengalaman, belajar dari praktik, belajar dan sekali lagi belajar, inilah kata-kata yang secara berulang-ulang dikatakan kepada para tokoh serikat buruh. Dalam Pasal 5, sub (b) Konstitrusi SOBSI, para anggota SOBSI diperintahkan untuk menyerahkan laporan-laporan mengenai persoalan yang berkenaan dengan perkembangan serikat-serikat buruh dan federasi bersangkutan. Untuk melakukan pembelajaran ini dari pengalaman, diskusi-diskusi secara teratur diselenggarakan oleh SOBSI dan serikat-serikat buruh di mana para anggotanya didorong untuk berpartisipasi. Selanjutnya, para anggota mempunyai kewajiban

edi cahyono's
LIBRARY

untuk mengikuti, membaca dan menyebarluaskan penerbitan-penerbitan federasi itu.

Penerbitan-penerbitan itu banyak sekali. Pertama-tama, terdapatlah organ-organ berkala dari SOBSI Pusat, yaitu Bendera Buruh dan Buletin SOBSI. Sebagai tambahan, brosur dan selebaran diterbitkan dan didistribusikan pada peristimwa-peristiwa penting. Berkala-berkala ini, brosur dan selebaran memuat tulisan-tulisan mengenai masalah-masalah organisasi, politik dan ekonomi dan memberikan analisis-analisis yang sesuai dengan pola dan gaya komunis konvensional. Tugas SOBSI dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya untuk mendidik dan melatih kelas pekerja Indonesia didiskusikan secara teratur dalam tulisan- dari SOBSI Sentral dan Warsosukarto dan Hassan Raid dari SARBUPRI merupakan penyumbang-penyumbang teratur pada berkala-berkala SOBSI dan SARBUPRI. Laporan-lapoiran yang diserahkan oleh para anggota mengenai pengalaman mereka dan hasil-hasil diskusi dalam rapat-rapat anggota juga diterbitkan sehingga orang-orang lain dapat memperolah manfaat dari pengalaman-pengalaman dan diskusi-diskusi ini. Pengarang buku ini telah menjadi seorang pengamat selama sejumlah tahun mengenai kegiatan-kegiatan SOBSI dan serikat-serikat buruh lainnya. Dan dalam perjalanan tahun-tahun ini serikat-serikat buruh itu telah mencapai suatu perbaikan/kemajuan yang besar sekali, baik di dalam metode dan praktik-praktik. Penyakit-penyakit kekanak-kanakan telah ditanggulangi, dan kesalahan-kesalahan telah dikoreksi, melalui panduan teori yang lebih baik dan melalui metode kritik dan oto-kritik.

SOBSI tidak saja memberikan tekanan pada pelajaran dari pengalaman, dari pertempuran yang di dalamnya kaum buruh telah terlibat dalam perjuangan mereka terhadap kaum kapitalis, dari keberhasilan mereka dan dari kegagalan mereka, melainkan juga memberi perhatian besar kepada pengajaran klasik. Bagi anggota biasa (jelata) juga terdapat peluang-peluang untuk berkenalan dengan masalah-masalah dasar gerakan perburuhan dan dengan ketentuan-ketentuan elementer gerakan serikat buruh. Kepada

yang terbaik di antara anggota kemudian diberi kesempatan untuk memenuhi syarat menjadi pemimpin serikat buruh. Dengan cara ini bakat-bakat ditemukan dan kader dan pemimpin prospektif direkruit dari barisan anggota biasa.

Untuk maksud ini kursus-kursus teratur diselenggarakan dan sekolah-sekolah lengkap didirikan. Pada 23 Oktober, 1956, Biro Sentral SOBSI menyelenggarakan persidangan, khususnya untuk mendiskusikan program pendidikan federasi itu. Sebuah resolusi telah diterima yang menurutnya tahun berikutnya federasi mesti mendirikan sekolah-sekolah SOBSI, baik di tingkat sentral maupun di daerah-daerah. Dalam sekolah-sekolah itu para kader SOBSI mesti diberi pengajaran dan pelatihan dalam sejarah gerakan buruh, dalam program-program sosial dan ekonomi, dalam metode-metode mempersatukan kelas pekerja Indonesia dan dalam memperkuat organisasi SOBSI dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi. Untuk mendanai program itu, sebuah kampanye khusus mesti dilakukan untuk mengumpulkan uang dari seluruh keanggotaan SOBSI atas satu basis sukarela.[37] Pada upacara pembukaqan sekolah Jakarta, Tjugito, atas nama Dewan Nasional SOBSI, berpidato di mana ia menekankan betapa pentingnya untuk para pemimpin dan kader SOBSI untuk memperbaiki pengetahuan secara terus-menerus.[38]

SARBUPRI, serikat buruh perkebunan, menuntut dari para anggotanya agar mereka membaca dan mengikuti penerbitan-penerbitan serikat buruh itu dan dari SOBSI, dan agar mereka membantu penyebarluasan lebih lanjut dari bahan-bacaan itu. Para anggota juga didorong untuk menghadiri rapat-rapat, sidang-sidang, diskusi-diskusi, ceramah-ceramah dan kursus-kursus, yang diorganisasi oleh serikat buruh pada selang-selang waktu tertentu.[39]

[37] *Bendera Buruh*, 5 Desember, 1956, hlm. 111.

[38] *Ibid.*, 15 Agustus, 1957.

[39] *Peraturan Dasar SARBUPRI*, Pasal 5.

edi cahyono's
LIBRARY

Konsep agar serikat-serikat buruh membentuk sebuah sekolah besar bagi kelas pekerja, kembali ditekankan oleh Warsosukarto, seorang pemimpin SARBUPRI. Dalam sebuah tulisan dalam Warta SARBUPRI, ia memulis:[40]

> Ini berarti bahwa serikat buruh merupakan tempat di mana kaum buruh dididik agar menjadi sadar akan kelas mereka. Melalui pengalaman mereka, kaum buruh mesti menyadari bahwa mereka merupakan suatu kelas yang dieksploitasi, suatu kelas yang mesti berjuang bagi emansipasinya, suatu kelas di mana kaum buruh dilatih untuk melakukan aksi-aksi, di mana kader-kader itu dibentuk.....

Pengarang buku ini selanjutnya menunjukkan bahwa metode pengajaran klasik adalah tepat, namun bahwa itu jangan menjadi satu-satunya sistem.

Untuk melaksanakan tujuan pendidikan para anggotanya, SARBUPRI mengorganisasi kursus-kursus secara teratur. Hal ikhwal ini dipandang sebagai sesuatu yang begitu pentingnya hingga ia merupakan agenda khusus selama Kongres Keempat serikat buruh yang diselenggarakan pada bulan Oktonber 1956. Kongres itu menerima, di antara lain, suatu resolusi mengenai pendidikan. Singkatnya, resolusi itu menyerukan pembentukan kursus-kursus di serikat-serikat buruh lokal di bawah panduan Presidium Sentral. Resolusi itu lebih lanjut mendesak para anggota untuk memanfaatkan sekolah-sekolah ini, dan merekomendasikan dibacanya secara luas penerbitan-penerbitan serikat buruh itu oleh semua anggota SARBUPRI.[41]

Sedangkan mengenai pengalaman dengan sekolah-sekolah SARBUPRI, kita membaca yang berikut di bawah ini dalam Berita SARBUPRI:[42]

[40] Warsosukarto, "Kedudukan dan Tugas Serikat Buruh," *Warta SARBUPRI*, Agustus 1955.

[41] Petunjuk yang diberikan oleh Dewa Nasional SOBSI.

[42] *Warta SARBUPRI*, September 1957, hlm. 33-34. Terjemahan oleh pengarang buku ini.

> Sekolah itu, yang didirikan sesuai dengan resolusi Kongres Keempat, dioperasikan dari bulan April hingga Juli 1957 di Jakarta. Sekolah itu diikuti oleh semua anggota-staf SARBUPRI yang bekerja pada markasbesar Serikat buruh itu. Tujuan sekolah itu adalah memajukan/meningkatkan pengetahuan dan kemampuan-kemampuan bekerja dari para anggota-staf itu, agar meningkatkan kesadaran akan organisasi, semangat untuk belajar dan kesadaran akan pekerjaan ...
>
> Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Dewan Nasional SOBSI, jadwal kursus-kursus itu mencakup sejarah gerakan perburuhan, masalah-masalah organisasi, isu-isu sosial-ekonomi dan masalah Front Persatuan. Tekanan diletakkan pada masalah-masalah organisasi yang mengambil sepuluh ceramah, sejarah gerakan perburuhan yang diselesaikan dalam enam ceramah, dan isu-isu sosial-ekonomi dan masalah Front Persatuan masing-masingnya dalam empat ceramah ... Pada akhir semester para siswa mesti menjalani ujian-ujian dan menulis laporan-laporan.

Gagasan dasar dari semua kegiatan pendidikan ini ialah, sudah tentu, agar "serikat-serikat buruh membantu kaum buruh memperoleh pengalaman khususnya dalam bentuk perjuangan terorganisasi untuk pembelaan kepentingan kaum buruh, agar serikat-serikat buruh menangani pelatihan para kader untuk kepemimpinan kelas-buruh."[43]

SBPP (buruh pelabuhan dan pelayaran), PERBUM (buruh minyak), SBG (buruh industri gula), SBKA (buruh kereta api), SBPU (buruh pekerjaan umum) dan lain-lain serikat buruh yang berafiliasi dengan SOBSI, yang diliput dalam studi ini, semuanya mempunyai dalam konstitusi (Peraturan Dasar) mereka ketentuan-ketentuan yang mewajibkan para anggotanya untuk membaca, mempelajari dan menyebarluaskan bahan bacaan dari masing-masing serikat buruh dan dari SOBSI; membuat laporan-laporan dan berpartisipasi di dalam diskusi-diskusi. Topik-topik bahan ini selalu masalah-masalah aktual dipandang dan dianalisis menurut metode-metode Marxis dan Leninis klasik. Dan pada waktu-waktu tertentu, para pengarang mengajar ajaran-ajaran asli dari dan kutipan-kutipan dari para pemimpin besar kelas pekerja internasional: Marx, Engels, Lenin, Stalin, Georgi Dimitrov, Mao Tse-tung, Ho Chi-

[43] *Ibid.* Agustus 1955, hlm. 144.

edi cahyono's LIBRARY

minh, dan D. N. Aidit.[44]

Dalam mengakhiri tinjauan mengenai kegiatan-kegiatan pendidikan SOBSI dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya, pengarang buku ini ingin menyatakan keyakinannya bahwa kegiatan-kegiatan ini telah sangat menyumbang pada peningkatan tingkat pendidikan dan kemajuan kesadaran kelas kaum buruh Indonesia, dan pada waktu bersamaan telah sangat mengabdi perjuangan Partai Kiomunis.

SOBSI bukanlah satu-satunya kelompok yang aktif dalam menjalankan tugas pendidikan serikat-serikat buruh. Serikat-serikat buruh dan federasi-federasi lainnya juga memahami arti-penting pendidikan melalui organisasi-organisasi mereka. Dan banyak tokoh serikat buruh non-SOBSI telah, dalam kenyataan, mendapatkan gagasan itu dari sumber yang sama seperti kaum komunis. Mereka, juga, memandang serikat-serikat buruh itu sebagai sekolah sosialisme, atau sebagai pusat-pusat pendidikan.

HISSBI memandang sebagai tugasnya untuk membuat para anggota dan kaum buruh pada umumnya sadar akan perjuangan kelas.[45] HISSBI, juga, mengejar tujuan ini dengan mengorganisasi kursus-kursus dan konferensi-konferensi secara teratur. Sejak tahun 1953, federasi ini secara teratur mengadakan kursus-kursus dalam sejarah gerakan perburuhan, teori-terori sosialis, masalah-masalah organisasi, politik, dan ekonomi. Banyak dari ceramah diberikan oleh para pemimpin Partai Buruh. HISSBI, juga, dapat secara memuaskan menengok kembali pada program pendidikannya.

SOBRI, yang di dalam kenyataan adalah sebuah gerakan komunis, mengikuti pola SOBSI. Di dalam program pendidikan SOBRI, rujukan khusus diberikan pada pandangan-pandangan Tan Malaka, pemimpin besar komunis itu, yang dinyatakan sebagai musuh dari Partai Komunis resmi, dan yang dibunuh di Jawa Timur pada tahun 1949.

[44] D.N. Aidit adalah Sekretaris Jendral sekarang dari Partai Komunis Indonesia (PKI)

[45] *Anggaran Dasar*, (Konstitusi) HISSBI, Pasal 6.

KBSI dan serikat-serikat buruhnya, yang berada di dalam lingkungan pengaruh sosialisme demokratik, juga sangat aktif dalam menjalankan program-program pendidikan. Suatu kelebihan adalah bahwa generasi ini mempunyai kaum intelek yang piawai, banyak di antara mereka itu anggota Partai Sosialis, yang selalu siap untuk mengajar dan melaksanakan seminar-seminar di bawah pengayoman federasi ini. PBKA (kaum buruh kereta api non-SOBSI) teristimewa terkenal karena sekolahnya untuk kaum buruh di Bandung. Sumber-sumber keuangannya yang bagus,[46] pengalaman dan pengabdian para pemimpin PBKA, telah menambahkan pada ketersediaan para guru unggulan, dan menjadikan program pendidikan PBKA suatu keberhasilan besar. Prospek-prospek KBSI dan PBKA di bidang ini bahkan lebih baik lagi, karena organisasi-organisasi ini secara teratur mengirimkan tokoh serikat buruh muda ke Inggris, Amerika Serikat dan negeri-negeri lain untuk mempelajari masalah-masalah perburuhan dan untuk memenuhi syarat sebagai calon pemimpin serikat buruh atau pendidik kaum buruh.

SBII (Serikat buruh Muslim, menyadari bahwa keberhasilan kaum komunis adalah, hingga batas yang jauh, hasil dari kegiatan pendidikan SOBSI, selama bertahun-tahun telah juga mengorganisasi sidang-sidang pendidikan berkala. Studi ideologi Islam, memainkan suatu peranan penting dalam program itu. Para penceramah secara teratur dalam sekolah SBII adalah: Jusuf Wibisono, (Presiden SBII, anggota Presidium Partai Masyumi, berkali-kali Menteri Keuangan, dan seorang pengacara). Mohammad Natsir, (Presiden Masyumi dan mantan-Perdana Menteri Republik), Sjafruddin Prawiranegara, Mantan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan anggota Presidium Masyumi), dan lain-lain pemimpin Partai Masyumi.

Akhirnya, KBKI juga aktif dalam melaksanakan program pendidikan. Dianggap sudah dengan sendirinya bahwa para pemimpin dari Partai Nasionalis adalah guru-guru teratur, dan bahwa doktrin-

[46] PBKA mengoperasikan suatu sistem panggilan (*check-off*).

edi cahyono's LIBRARY

doktrin Marhaenisme dan cita-cita dari PNI merupakan subyek-subyek yang digemari dalam ceramah-ceramah itu.

Suatu gejala yang agak mengecewakan ialah bahwa banyak dari acara pendidikan itu kadangkala lebih digunakan oleh penceramah tertentu untuk menganjurkan pandangan-pandangan dan sasaran-sasaran partai politik tertentu, dan untuk menyerang pesaing-pesaing politiknya, daripada dipusatkan pada kebutuhan gerakan serikat buruh. Namun ini merupakan tumbuhan-sampingan yang tidak terelakkan dari watak politik serikat-serikat buruh itu. Namun, pemberantasan keburukan ini merupakan suatu masalah besar.

## Konsepsi Serikat Buruh sebagai Organisasi Massa

Gagasan bahwa serikat-serikat buruh adalah atau mesti organisasi massa berasal dari ajaran Marxis-Leninis. Gerakan serikat buruh di dalam orbit komunis berfungsi sebagai hubungan dari garda depan (Partai Komunis) dengan massa. Serikat-serikat buruh mempunyai tugas mengumpulkan massa dan melebur mereka menjadi satu tentara besar. Kepeloporan ini merupakan salah satu dari bab yang paling menggairahkan di dalam literatur Leninis yang telah memukau berjuta-juta kaum buruh yang gelisah dan kini memukau pangsa-pangsa besar generasi muda di bagian-bagian Asia, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, seperti di negeri-negeri lain, kaum sosialis non-komunis juga memahami artipenting konsepsi bahwa serikat-serikat buruh adalah organisasi-organisasi massa. Mereka mengetahui kelebihan-kelebihan azas organisasi ini. Dan mereka ingin mendapatkan manfaat darinya sebagaimana dilakukan oleh kaum komunis. Dan bahkan para tokoh serikat buruh non-sosialis, yang telah mengorganisasi serikat-serikat buruh mereka menurut garis-garis industri dan menarik keuntungan dari watak massal serikat-serikat buruh seperti itu, adalah, dalam kenyataan, menggunakan metode yang sama.

Dalil Leninis ialah bahwa serikat-serikat buruh mesti organisasi-organisasi massa, mesti mempunyai sifat massal yang paling luas, agar menjadikan serikat-serikat buruh paling kerakyatan dan demokratik; mesti membawa serikat-serikat buruh di dalam jangkauan setiap pekerja, sehingga serikat-serikat buruh menjadi rumah, pelindung, darmawan, dan sahabat sehari-hari dari seluruh kelas pekerja.

Namun itu sudah tentu bukan satu-satunya penjelasan. Suatu pertimbangan yang penting ialah bahwa, sebagai organisasi-organisasi massa, menjangkau dan mengumpulkan massa luas dari massa pekerja itu, serikat-serikat buruh, yang sementara itu telah juga menjadi sekolah-sekolah komunisme dan tentara besar di dalam perjuangan kelas di bawah komando tertinggi barisan depan, merupakan suatu hubungan yang tidak ternilaikan antara Partai Komunis dan massa. Versi Barat mengenai konsep komunis ini ialah bahwa serikat-serikat buruh harus berfungsi sebagai organisasi-organisasi front (depan) dan sebagai suatu alat untuk menunjukkan kekuatan dan menyiratkan dukungan rakyat yang sangat luas sedangkan Partai Komunis itu sendiri di dalam kenyataan adalah suatu kelompok minoritas.

Kaum komunis, melalui organisasi-organisasi massa ini, khsusnya serikat-serikat buruh, telah sangat berhasil, sesungguhnya, dalam menguasai dan mengarahkan massa rakyat yang belum diindoktrinasikan, tetapi yang secara antusias bersambut pada agitasi.

Penerapan azas itu pada gerakan serikat buruh Sovyet diintroduksikan dengan rumusan berikut ini di dalam mukadimah Konstitusi Serikat-serikat Buruh USSR:

> Dalam serikat-serikat buruh Sovyet yang merupakan organisasi massa umum non-partai, kaum buruh dan pegawai lainnya dari semua pekerjaan dipersatukan atas suatu dasar kesukarelaan tanpa membedakan ras, nasionalitas, jenis kelamin atau kepercayaan religius.
>
> Serikat-serikat buruh Sovyet melakukan semua kegiatan mereka di bawah panduan Partai Komunis, kekuatan pengorganisasi dan pengarah dari

edi cahyono's LIBRARY

masyarakat Sovyet.

Serikat-serikat buruh USSR mengumpulkan massa kaum buruh di sekeliling Partai Lenin dan Stalin.

Untuk maksud menjangkau dan mempersatukan semua buruh serikat-serikat buruh Sovyet menolak setiap pembatasan penerimaan keanggotaan, dengan menyatakan keanggotaan dalam serikat-serikat buruh "terbuka bagi semua warga USSR, yang bekerja dalam kantor-kantor perusahaan industri, atau yang belajar pada lembaga-lembaa pendidikan atau teknik lebih tinggi atau sekolah-sekolah kejuruan."[47] Dalam perpindaan dari satu serikat buruh kepada serikat buruh lain, para anggota mempertahankan keanggotaan serikat buruhnya dan tidak diharuskan membayar suatu iuran baru.[48] Jika seorang buruh asing yang termasuk pada suatu serikat buruh di luar negeri sebelum ia datang di USSR, ia juga dibebaskan dari pembayaran iuran sebagai anggota baru manakala berganung dalam sebuah serikat buruh Sovyet.[49]

Di Tiongkok, selama Kongres Ke-Tujuh Serikat-serikat Buruh Seluruh-Tiongkok, Hsu Chih-chen, di dalam laporannya mengenai Rancangan Konstitusi baru Serikat-serikat buruh Republik Rakyat – yang sudah diusinggung di muka– menunjukkan bahwa:

... serikat-serikat buruh Tiongkok adalah organisasi-organisasi massa dari kelas pekerja Tiongkok.[50]

... Serikat-serikat buruh Tiongkok adalah ... suatu persatuan organisasi massa kelas pekerja seluruh negeri.[51]

salah satu dari ketentuan dasar serikat-serikat buruh ialah mendidik kaum buruh dan jalan untuk mendidik dan meningkatkan tingkat kesadaran kelas kaum buruh yang tidak sadar ialah dengan mengorganisasi mereka ke dalam serikat buruh.

[47] *Constitution of the Trade Unions of the USSR*, Ps. 1.

[48] A. Lozovsky, *Handbook on the Soviet Trade Unions*, hlm. 19.

[49] *Ibid.*, hlm. 27.

[50] *Kongres Ketujuh Serikat-serikat Buruh Seluruh-Tiongkok*, hlm.85.

[51] *Ibid*, hlm. 89

> hanya manakala hak-hak para anggota ditetapkan secara jelas dan dilindungi, dapatlah serikat buruh bekerja secara murni berbasis massa, terus-menerus diperbaiki dan diperkuat oleh partisipasi aktif dan dukungan luas massa kaum buruh. Karena serikat-serikat buruh adalah organisasi-organisasi kelas pekerja, pekerjaan serikat buruh berarti bekerja di kalangan massa.[52]

Konstitusi baru itu, yang kemudian diterima oleh Kongres, menyatakan di dalam mukadimah, bahwa:

> Serikat-serikat buruh Tiongkok, yang dipimpin oleh Partai Komunis, telah mengumpulkan massa luas kaum buruh di sekeliling Partai dan dengan demikian telah menjadi sabuk-sabuk penyebaran antara partai dan massa.....Serikat-serikat buruh Tiongkok adalah organisasi-organisasi massa dari semua pekerja kasar dan ahli yang sepenuhnya atau terutama hidup dari upah mereka, yang terbentuk atas satu dasar kesukarelaan tanpa membedakan nasionalitas, jenis kelamin, atau kepercayaan religius.[53]

Sifat massal ini lebih lanjut mendapatkan ungkapannya dalam Pasal 1 Konstitusi yang menggariskan bahwa "Keanggotaan dalam serikat-serikat buruh harus terbuka bagi semua buruh manual dan buruh non-manual yang upahnya merupakan sumber hidup satu-satunya atau utama dan yang menerima Konstitusi Serikat-serikat buruh itu."

Sebelum Kongres ini, Pemerintah Rakyat Tiongkok Pusar mengesahkan sebuah undang-undang khusus yang membahas gerakan serikat buruh. Undang-undang Serikat Buruh Republik Rakyat Tiongkok 29 Juni, 1950 ini, disahkan dengan tujuan mendefinisikan dengan istilah-istilah jelas status hukum, fungsi, dan tugas-tugas organisasi serkat buruh di dalam Negara baru dan untuk maksud memungkinkan kelas pekerja menjadi terorganisasi lebih baik dan dengan demikian memainkan bagiannya sendiri di dalam Pembangunan Demokrasi Baru.[54]

Demikian, tiga tahun sebelum Kongres Ketujuh Serikat-serikat Buruh, Pemerintah Komunis sudah menghendaki azas-azas Sovyet

[52] *Ibid*, hlm. 90, 92.

[53] *Trade Union Law of the People's Republic of China*, Mukadimah.

[54] *Trade Union Law of the People's Republic of China*, Mukadimah.

edi cahyono's
LIBRARY

menjadi azas-azas gerakan serikat buruh Tiongkok. Untuk maksud ini Undang-undang itu menetapkan inter alia:

> Serikat-serikat buruh adalah organisasi-organisasi massa dari kelas pekerja yang terbentuk atas suatu dasar kesukarelaan. Semua pekerja-upahan manual dan non-manual di dalam perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga dan sekolah-sekolah dalam wilayah Tiongkok yang upahnya merupakan satu-satunya atau alat utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan semua pekerja-upahan yang teratur pekerjaannya berhak mengorganisasi serikat-serikat buruh.[55]

Kemudian, demi untuk ketertiban, Unsdang-undang itu merujuk pada kongres-kongres gerakan serikat buruh, dengan menyatakan bahwa Serikat-serikat buruh adalah organisasi-organisasi massa yang dibentuk sesuai resolusi-resolusi dan Konstitusi yang diterima oleh Kongres Perburuhan Seluruh-Tiongkok dan berbagai Kongres serikat-serikat buruh Industri.[56]

Adakah bukti yang lebih baik mengenai ketundukan gerakan serikat buruh Tiongkok pada Pemerintah dan, melalui Pemerintah, kepada Partai Komunis? Kongres Ketujuh tahun 1953 dan Konstitusi yang diterima untuk serikat-serikat buruh keberadaannya hanya untuk melaksanakan petunjuk-pertunjuk Undang-undang tiga tahun sebelumnya itu, tidak hanya yang berkenaan dengan gagasan organisasi massa, melainkan juga mengenai semua azas lainnya dari gerakan serikat buruh.

Konsepsi mengenai serikat-serikat buruh sebagai organisasi-organisasi massa telah mendapat sambutan luas di kalangan tokoh-tokoh serikat buruh Indonesia, dan tidak terbatas pada kaum komunis di antara mereka.

SOBSI dan yang berafiliasi dengannya adalah, sudah tentu, yang paling pertama menerima dan melaksanakan azas itu. Sejak tahun 1946, para tokoh serikat buruh Indonesia dengan kecenderungan Marxis-Leninis juga menganjurkan gagasan ini. Manakala para pemimpin perburuhan berkumpul pada bulan November 1946 untuk

[55] *Ibid*, Pasal 1.

[56] *Ibid*, Pasal 3.

proklamasi SOBSI, konsep organisasi massa telah dipahami. Dalam Konferensi Nasional SOBSI tahun 1952 dan Konges Kedua SOBSI bulan Januari 1955 (yang menyetujui konstitusi SOBSI yang sekarang in) persoalan itu kembali didiskusikan dan kelebihan-kelebihannya dipelajari. Petunjuk-petunjuk baru dirumuskan untuk melahirkan hasil-hasil penting. Kongres Kedua SOBSI ini (dan Konferensi Nasional tahun 1952 yang terlebih dulu menerima Konstitusi baru itu), agaknya tidak menganggap perlu untuk menyisipkan definisi mengenai azas organisasi massa itu di dalam Konstitusi. Hanya implementasi azas itu diwujudkan di dalam ketentuan mengenai keanggotaan:

> Memenuhi syarat bagi keanggotaan SOBSI adalah semua buruh yang sudah terorganisasi, melalui serikat-serikat buruh mereka, baik yang nasional maupun yang lokal, tanpa membedakan nasionalitas, ras, asalusul, jenis kelamin, religi, dan keyakinan politik; baik yang bekerja dalam jawatan-jawatan Pemerintah maupun dalam perusahaan-perusahaan swasta; dan mereka akan menjadi anggota secara sukarela dan setelah menerima azas-azas dan tujuan-tujuan SOBSI.[57]

Sungguh mirip dengan model Sovyet dan Tionkok!

Konstitusi-konstitusi dari semua serikat buruh yang berafiliasi dengan SOBSI mempunyai, tanpa kecuali, suatu ketentuan yang sama mengenai keanggotaan, dengan penggarisan lebih jauh bahwa para anggota serikat-serikat buruh secara dengan sendirinya menjadi anggota dari SOBSI; dan bahwa serikat-pserikat buruh itu diorganisasi menurut garis-garis industri. SARBUPRI, serikat buruh besar dari kaum buruh perkebunan, menyatakan di dalam Konstitusinya bahwa:[58]

> Memenuhi syarat bagi keanggotaan SARBUPRI adalah semua warga Indonesia yang bekerja dalam perkebunan-perkebunan, baik yang dimiliki swasta maupun Pemerintah; selanjutnya orang-orang yang diperlukan oleh organisasi, kaum buruh perkebunan yang sudah pensiun dan diberhentikan yang masih

[57] *Konstitusi SOBSI*, Pasal 3.

[58] *Peraturan Dasar SARBUPRI*, Pasal 3. *Cf. Peraturan Dasar* SBG (Pasal 3), dari SARBUKSI* (Pasal 3), dari SDBPP (Pasal 3), dari SBKA (Pasal 3), dari PERBUM (Pasal 3), dsb.

edi cahyono's LIBRARY

menerima separuh upah/pembayaran, tanpa perbedaan ras, religi, kepercayaan politik, jenis kelamin, kedudukan, dan jabatan. Seseorang menjadi seorang anggota secara dan dengan penerimaan azas-azas SARBUPRI dan SOBSI.

Lebih lanjut, berbagai serikat buruh yang berafiliasi dengan SOBSI menyatakan di dalam konstitusi mereka bahwa serikat-serikat buruh adalah organisasi-organisasi massa.[59]

Kenyataan bahwa SARBUPRI dan berbagai serikat buruh lain dari SOBSI, seperti SBG (serikat buruh dalam industri gula, 305.000 anggota) dan SARBUKSI (kaum buruh kehutanan, lebih dari 200.000 anggota) terdiri atas orang yang masih terikat pada kehidupan perkampungan dan pedesaan dangan ikatan-ikatan sosial tradisional, berarti bahwa azas organisasi massa SOBSI telah berhasil, sesungguhnya, di dalam menjangkau, mengumpulkan, mempengaruhi, dan mengarahkan massa yang luas dari penduduk biasa di banyak daerah Republik. Dan dengan memperhatikan kenyataan bahwa perkebunan-perkebunan dan kebun-kebun tebu merupakan pusat-pusat ekonomi yang kepadanya banyak kota dan desa bergantung, kita dapat menyimpulkan bahwa lingkungan pengaruh dari SOBSI dan serikat-serikat buruhnya, sebagai suatu hasil implementasi azas-azas organisasinya, melalui program pendidikan, propaganda dan agitasi mereka, berkat kemampuan dan pengabdian mereka, dan mengingat diuntungkannya mereka oleh begitu banyak peluang, telah mencengkam pikiran dan membangkitkan imajinasi berjuta-juta orang Indonesia yang gelisah yang hidup dan bekerja di desa-desa, di sekitar perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik gula, di sekitar ladang-ladang dan penyulingan minyak bumi, di dekat pelabuhan-pelabuhan, –yang terdapat banyak sekali di negeri kepulauan ini– dan di kota-kota, yang besar dan yang kecil. Adalah SOBSI dan serikat-serikat buruhnya dan organisasi-organisasi massa lainnya yang diilhami komunis,[60] yang hingga batas yang jauh bertanggung jawab atas

[59] Pasal 1 dari *Peraturan Dasar* (Konstitusi) SBG, PERBUM, SBPU, SBRI, DSEBDA, SB KEMPERBU.

[60] Organisasi-organisasi massa lainnya yang diilhami-komunis ialah: *Barisan Tani Indonesia*, atau BTI, *Pemuda Rakyat*, sebuah Gerakan Wanita, LEKRA (para seniman),

keberhasilan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam memenangkan tigapuluh sembilan dari 260 kursi Parlemen dalam pemilihan umum tahun 1955 dan untuk bahkan kemenangan lebih besar dalam pemilihan umum berikutnya dari 520 anggota Majelis Konstituante. Dalam pemilihan provinsi dan kotapraja, kaum Komunis bahkan muncul sebagai partai yang memimpin di banyak kota Jawa Tengah (penduduk 19 juta) dan di Jawa Timur (penduduk 20 juta) di mana mereka mencapai suatu mayoritas mutlak di kota-kota penting tertentu; sedangkan di Jawa Barat (penduduk 16 juta) mereka menjadi partai terbesar kedua, hanya dilampaui dalam besarnya oleh Partai Masyumi. Sebaliknya, di bagian terbesar pulau-pulau di luar pulau Jawa, di mana SOBSI (dan lain organisasi massa komunis) adalah jauh lebih kecil (dikarenakan tiadanya industri berskala-besar), Partai Komunis juga muncul lebih lemah atau bahkan dapat diabaikan. Namun di dua tempat di Sumatra, yaitu di bagian Timur Sumatra Utara –selama seratus tahun suatu pusat perkebunan intensif dan berskala-besar– dan di sekeliling Palembang di Sumatra Selatan di mana Shell/BPM dan Perusahaan Minyak Amerika *Standard Vacuum* mengebor minyak dan menjalankan dua buah penyulingan raksasa, SDOBSDI sangat aktif, dan kaum komumis besar sekali pengaruhnya dan kekuatannya. Situasi yang sama berlaku di sekitar perusahaan *Caltex-Pasific* (sebuah anak perusahaan dari *Standard Oil Company of California* dan *Texas Oil Company*) di Sumatra Timur dan di Balikpapan di mana Shell/BPM mengoperasikan sebuah penyulingan minyak bumi yang penting.

Sebagaimana telah disebut di muka, gagasaan serikat-serikat buruh sebagai organisasi massa juga telah mendapat sambutan luas di kalangan kaum sosialis dalam KBSI, HISSBI dan SOBRI dan di beberapa serikat buruh merdeka. Bahkan para tokoh serikat buruh non-Marxis bukannya tidak tergerak oleh gagasan itu, sekali pun reaksi mereka tidak berasal dari sumber-sumber klasik Marxis-Leninis, tetapi dari pertimbangan-pertimbangan yang bersifat

PERBEPSI, (veteran dan pejuang gerilya), Komite untuk Memajukan Perdamaian Dunia dan berbagai Perhimpunan Persahabatan Internasional.

edi cahyono's
LIBRARY

semurninya praktis.

Bagi para pemimpin KBSI, yang banyak di antara mereka adalah siswa atau bekas-murid strategi dan taktik Marxis, manfaat azas organisasi massa sudah gamblang. Lagi pula, di antrara sdel-sel PSI (Partai Sosialis Indonesia) di dalam KBSI terdapat banyak yang mem- punyai pengalaman dalam mengelola urusan serikat buruh menurut garis-garis Marxis-Leninis. Pengalaman-pengalaman seperti itu dapat diperoleh manakala kaum sosialis masih tinggal dan bekerja sebagai satu keluarga besar yang bekerjasama dengan kaum komunis. Pada masa itu sejumlah kaum sosialis, termasuk beberapa tokoh yang kini menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia dan aktif di dalam KBSI dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya, yang aktif sebagai pemimpin, sebagai pengorganisasi, sebagai aktivis dan ahli teori serikat-serikat buruh yang sudah difederasikan di dalam SOBSI[61] Pengenalan dan pengalaman dengan

[61] Hingga bulan Juli 1947 kaum sosialis Indonesia dipersatukan di dalam *Partai Sosialis* (tanpa tambahan *Indonesia*). Kaum sosialis demokratik terkemuka seperti Sutan Sjahrir, Djohan Sjahruzah, Subadio Sastrosatomo, Wijono dan almarhum Supeno merupakan inti dari partai ini bersama dengan kaum sosialis Leninis seperti almarhum Amir Sjarifuddin, Tan Ling Djie dan Abdul Madjid Djoyoadhiningrat. Pada bulan Juli 1947, perpecahan dalam kubu sosialis terjadi, perpecahan yang sudah membara selama beberapa waktu lamanya. Peristiwa ini mengakhiri keberadaan Sajap Kiri (Front Sajap Kiri), Komite Aksi Bersama dari *Partai Sosialis*, *Partai Komunis Indonesia*, *Partai Buruh Indonesia*, *Pemuda Sosialis* atau PESINDO, *Barisan Tani Indonesia*, dan SOBSI. Kaum sosialis demokratik (masih Marxis dalam azas) meninggalkan Partai Sosialis dan, pada bulan Februari 1948 mendirikan *Partai Sosialis Indonesia* di bawah kepemimpinan Sutan Sjahrir. Para pro-komunis untuk beberapa waktu lamanya tetap di dalam Partai Sosialis di bawah kepemimpinan Amir Sjarifuddin dan Tan Ling Djie.. Tahun berikutnya pengintegrasian besar di kalangan kaum Leninis menjadi kenyataan. Didahului oleh suatu aksi bersama di dalam *Front Demokrasi Rakjat*, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia dan Partai Komunis Indonesia lebur menjadi *Partai Komunis Indonesia* baru. Menarik untuk diperhatikan ialah *pengakuan* Amir Sjarifuddin bahwa sejak tahun 1935 dirinya adalah seorang komunis ilegal. Tentang Amir Sjarifuddin yang luarbiasa ini, yang adalah salah seorang intelektual yang paling cemerlang dan seorang orator paling unggul yang pernah dikenal pengarang buku ini di Indonesia, yang berikut ini mesti diberitahukan. Setelah menggantikan. Sjahrir sebagai Perdana Menteri Republik pada bulan Juli 1947, Amir Sjarifuddin digantikan oleh Dr. Hatta pada bulan Januari 1948, kemudian terlibat di dalam pemberontakan komunis di bulan September tahun yang sama, kemudian tertangkap dan dieksekusi dalam bulan Janurari 1949.

cita-cita dan metode-metode Marxis-Leninis tidak mudah dilupakan. Karena pada waktu sekarang cita-cita itu masih berpengaruh di dalam KBSI, sangat besar kemunginan ide-ide itu mencakup konsepsi mengenai serikat-serikat buruh sebagai organisasi massa, dan masih merupakan suatu sumber inspirasi dan taktik-taktik.

Yang berkenaan dengan HISSBI, adalah pengaruh Partai Buruh yang membuat federasi ini mengenal konsep-konsep Marxis. Sebagai kenyataan, di dalam HISSBI teori-teori Marxis merupakan suatu subyek yang secara intensif dipelajari. Agitasi dan propaganda oleh para aktivis HISSBI dilakukan menurut garis-garis Marxis. Bersesuaian dengan itu, serikat-serikat buruh HISSBI dianggap dan dijelaskan sebagai organisasi-organisasi massa.

SOBRI, yang dipimpin oleh kaum komunis juga, mengikuti garis-garis yang sama seperti SOBSI. Bagi para pemimpin SOBRI, yang pada waktu bersamaan adalah anggota Partai Murba, serikat-serikat buruh adalah satu-satunya alat untuk menjangkau massa kaum buruh yang tidak terikat.

Dikarenakan azas-azas mereka, para pemimpin KBKI dianggap tidak menyukai gagasan dan metode Marxis. Namun, untuk menghadapi tantangan SOBSI dan persaingan dengan serikat-serikat buruh lainnya juga, KBKI tidak dapat berbuat lain kecuali meniru praktik-praktik yang berhasil dari serikat-serikat buruh lainnya itu. Lagi pula, KBKI tidak menolak untuk menarik manfaat dari kelebihan-kelebihan konsep organisasi massa.

Posisi yang sama diambil oleh SBII Muslim. Agar dapoat bersaing dengan kaum komunis para pemimpin Masyumi dan SBII mesti mencari metode-metode yang akan memberikan kepada mereka akses pada berjuta-juta kaum buruh Indonesia, yang bagian terbesar dari mereka itu adalah Muslim kepercayaannya.

Akhirnya, GSBI dan serikat-serikat buruh merdeka juga bukan penonton yang tidak tergerak melihat keberhasilan SOBSI atas massa banyak. Serikat-serikat buruh ini, juga, suka menyuguhkan diri mereka kepada para anggotanya dan kepada kaum buruh

edi cahyono's LIBRARY

pada umumnya sebagai organisasi-organisasi massa.

Pengarang buku ini tidak bermaksud menolak kemungkinan bahwa serikat-serikat buruh non-SOBSI sungguh-sungguh telah memperoleh keuntungan dengan menggunakan metode-metode Marxis itu, termasuk konsep organisasi massa itu. Namun, dengan melakukan itu, banyak serikat buruh yang tidak benar-benar mengenal metode-metode dan sumber-sumber informasi Marxis-Leninis, telah, dalam kenyataan, hanya berfungsi untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan ini untuk keuntungan SOBSI. Sebagaimana halnya dengan partai-partai politik, organisasi-organisasi kaum buruh non-komunis, dengan ketiadaan azas-azas mereka sendiri, dan menirukan kaum komunis, seringkali secara tidak sadar melayani kepentingan kaum komunis di Indonesia.

## Konsep Sentralisme Demokratik

Manusia mengorganisasi diri untuk menjadi kuat, untuk mengembangkan kekuasaan. Bagi kaum buruh, bersatu atau tetap terberai, merupakan hal berada atau tidak berada. Dengan tiada memiliki alat produksi, atribut par excellence dari kekuatan dan kekuasaan, kaum buruh telah mencari dan menemukan alternatif pada kepemilikan material di dalam persatuan, organisasi dan aksi bersama.

Berikutnya, pencarian itu ialah akan metode-metode yang akan memperoleh yang sebanyak mungkin dari organisasi, menjadikan yang terorganisasi mengabdi organisasi, membetuk kepemimpinan yang kokoh dan menjamin kesetiaan dan disiplin.

Lenin telah berspekulasi dengan mencoba menyusun dua konsep yang tidak dapat didamaikan satu sama lain, yaitu demokrasi dan absolutisme. Ia menamakan hasilnya itu: sentralisme demokratik. Ia mengembangkan sebuah sistem organisasi yang dapat mengambil keuntungan sepenuhnya dari eksternal-eksternal prosedur demokratik (laporan, diskusi, kritik, pemungutan suara, pemilihan, dsb.) tetapi pada waktu bersamaan sesuatu yang didasarkan pada

pelaksanaan azas-azas kekuasaan monolitik yang begitu karakteristik bagi kaum komunis. Demikianlah, terbatas dan beroperasi di dalam bayangan suatu kekuasaan yang tidak mengenal ampun, para bawahan tidak akan mungkin mempunyai peluang, kemampuan atau keberanian untuk menjatakan suatu pendapat yang bebas, apa lagi untuk menentang kepemimpinan yang bercokol. Kritik komunis, oleh karenanya, biasa merujuk pada sentralisme demokratik sebagai suatu alat mengontrol/mengawasi barisan anggota biasa, memastikan kepatuhan, menciptakan disiplin yang ketat, membungkam perlawanan dan mendirikan kepemimpinan yang tidak dapat dibantah. Para lawan komunisme memandang sentralisme demokratik sebagai akhir demokrasi dan awal kediktatoran.

Konsep mengenai sentralisme demokratik untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh kaum Bolsyewik dalam konferensi mereka di Tammerfors pada bulan Desember 1905. Kongres Keenam Partai itu pada bulan Agtustus 1917 menerima azas itu sebagai suatu hal keperluan organisasi. Di dalam Anggaran Dasar baru Partai Komunis USSR, sebagaimana yang direvisi oleh Kongres Kesembilanbelas tahun 1952, sentralisme demokratik masih dinyatakan sebagai azas panduan dari struktur organisasi Partai dan didefinisikan sebagai:

a. pemilihan semua badan partai dari bawah hingga pucak;
b. pertanggungjawaban periodik badan-badan partai kepada organisasi partai;
c. disiplin partai yang ketat, dan penundukan minoritas kepada mayoritas;
d. mandat tak bersyarat keputusan-keputusan badan-badan lebih tinggi pada badan-badan lebih rendah.

Azas sentralisme demokratik juga diterima oleh Komintern. Pasal 12 dari Duapuluhsatu Syarat Penerimaan, yang disetujui oleh Kongresnya pada tahun 1920, menentukan bahwa "Partai-partai yang termasuk pada Internasionale Komunis mesti berdasarkan pada azas sentralisme demokratik," Azas itu menemukan jalannya ke dalam konstitusi akhir dari Komintern, diterima pada Kongres

edi cahyono's LIBRARY

Keenam bulan September 1928.[62]

Lenin sendiri mempopulerkan konsep itu sebagai Kebebasan dalam diskusi, persatuan dalam aksi. Kaum komunis di seluruh dunia mengikuti pola itu.

Mao Tse-tung, pemimpin Tiongkok yang tiada tandingannya, sejak permulaan kenaikannya pada kekuasaan membahas masalah bagaimana mendamaikan demokrasi dengan keharusan yang terus bertumbuh akan kesatuan dalam aksi dan disiplin. Menyusun sebuah rancangan resolusi untuk Konferensi Kesembilan organisasi Partai Komunis dari Tentara Ke-Empat dari Tentara Merah pada bulan Desember 1929, Mao memberikan petunjuknya mengenai rektifikasi pikiran-pikiran salah di dalam Partai sebagai berikut:[63]

> .....untuk secara ketat memberlakukan cara hidup demokratik di bawah panduan terpusat, Garisnya untuk ini ialah sebagai berikut:
>
> (1) Badan pimpinan Partrai mesti memberikan suatu garis panduan yang tepat dan menemukan pemecahan-pemecahan manakala timbul masalah-masalah, untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai suatu kepemimpinan sentral
>
> (2) Badan yang lebih tinggi mesti secara jelas memahami kondisi-kondisi badan-badan yang lebih rendah dan mengenai kehidupan barisan anggota biasa, untuk menjamin dasar obyektif bagi kepemimpinan yang tepat.

Seperti yang kita ketahui, Mao di dalam kenyataan tidak hanya mencari suatu pembenaran bagi gagasan-gagasannya yang otokratik, berbicara seperti seorang despot yang mengetahui kebenaran dari beberapa abad yang lalu dan yang menganjurkan sejenis kediktatoran yang penuh kebajikan. Pada suatu kesempatan lain Mao mengatakan:[64]

> Yang disebut sistem demokratik pada bansa-bangsa modern lazimnya dimonopoli oleh burjuasi dan semata-mata telah menjadi sebuah alat untuk menindas rakyat biasa.
>
> Berkaitan dengan persoalan struktur politik, itu adalah masalah mengenai

[62] Sebuah laporan singkat mengenai asal-usul sentralisme demokratik diberikan dalam karya R.N. Carew Hunt, *A Guide to Communist Jargon*, hlm. 53-55.

[63] Mao Tse-tung, *Selected Works*, Jilid II, hlm. 109-110

[64] Mao Tse-tung, "On New Democracy," *Selected Works*, Jilid III, hlm. 120-121.

bentuk struktur kekuasaan politik, bentuk yang diambil oleh kelas-kelas sosial tertentu dalam membentuk organ-organ kekuasaan politik mereka untukmelawan musuh-musuh mereka dan melindungi diri mereka sendiri. Tanpa suatu bentuk kekuasaan politik yang sepadan tidak akan ada apa pun untuk mewakili negara .... Tetapi suatu sistem yang sungguh-sungguh dengan hak-pilih universal dan setara, tanpa memandang jenis kelamin, keyakinan, sifat pendidikan, mesti dipraktikkan sehingga organ-organ pemerintah yang dipilih dapat secara layak mewakili setiap kelas revolusioner menurut statusnya di dalam negara, menyatakan kehendak rakyat dan memimpin perjuangan-perjuangan revolusioner, dan mewujudkan jiwa Demokrasi Baru.

Suatu sistem seperti itu adalah sentralisme demokratik. Hanya suatu pemerintahan dengan sentralisme demokratik dapat sepenuhnya menyatakan kehendak dari seluruh rakyat revolusioner dan secara paling kuat memerangi musuh-musuh revolusi ...

Sistem negara –kediktatoran bersama dari semua kelas

Revolusioner. Struktur politik –sentralisme demokratik.

Inilah pemerintah demokrasi baru.

Dan pada bulan Februari 1942, sambil membuka Akademi Partai, Mao Tse-tung berpidato di mana ia mengkritik sisa-sisa sektarianisme di dalam partai, di antara lain, mereka yang ramai-ramai menuntut kebebasan, sebagai berikut:[65]

Mereka tidak memahami sentralisme demokratik di dalam Partai dan tidak menyadari bahwa Partai Komunis tidak hanya memerlukan demokrasi, melainkan, secara lebih mendesak bahkan memerlukan sentralisasi. Mereka melupakan sentralisme demokratik, yang menundukkan minoritas kepada mayoritas, tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi, yang bagian kepada keseluruhan dan seluruh Partai kepada Komite Sentral.

Sebelumnya, Kongres Keenam Partai Komunis Tiongkok, yang bersidang di Moskow dari bulan Juli hingga September 1928, merumuskan tugas-tugas Partai, salah satunya ialah:[66]

(untuk) merealisasikan sentralisme demokratik sejati; demokrasi maksimal di dalam Partai mesti dijamin di dalam batas kerahasiaan; memutuskan isu-isu penting melalui diskusi-diskusi kolektif dan keputusan-keputusan kolektif; tetapi

[65] Mao Tse-tung, *Selected Works*, Jilid IV, hlm. 38.

[66] Brandt, Schwartz dan Fairbank, *A Documentary History of Chinese Communism*, hlm. 149.

edi cahyono's
LIBRARY

pada waktu bersamaan, menentang kecenderungan demokrasi ekstrem, karena itu dapat menghancurkan disiplin Partai, mendorong suatu sikap tidak-bertanggungjawab, dan merusak kepercayaan pada kepemimpinan Partai.

Penerapan sentralisme demokratik pada badan-badan non-politik tidak mengubah konsedp dasar itu. Konstitusi Serikat-serikat Buruh Republik Rakyat Tiongok menentukan bahwa "Serikat-serikat buruh Tiongkok diorganisasi menurut garis-garis industri, berdasarkan sentralisme demokratik."[67]

Mengenai apa artinya sentralisme demokratik ini, Konstitusi itu memberikan penjelasan sebagai berikut:[68]

(a) Badan-badan pimpinan serikat-serikat buruh di semua tingkat mesti dipilih secara demokratik dari bawah oleh para anggota dan mesti menyerahkan laporan mengenai pekerjaan mereka pada selang-selang waktu tertentu kepada para anggota.
(b) Serikat-serikat buruh di semua tingkat akan menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan Konstitusi dan keputusan-keputusan serikat-serikat buruh.
(c) Serikat-serikat buruh hanya akan membuat keputusan dengan suara mayoritas para angota yang hadir pada rapat itu.
(d) Organisasi-organisasi serikat buruh yang lebih rendah akan mematuhi organisasi-organisasi serikat buruh lebih tinggi.

Undang-undang Serikat Buruh Republik Rakyat Tiongkok menyatakan azas sentralisme demokratik itu sebagai undang-undang negeri berkenaan dengan perserikatan perburuhan. Undang-undang itu menentukan dalam Pasal 2:

> Serikat-serikat buruh akan diorganisasi berdasarkan azas sentralisme demokratik, sesuai dengan Konstitusi Federasi Buruh Seluruh-Tiongkok, sebagaimana yang diterima oleh Kongres Perburuhan Seluruh-Tiongkok.
>
> Komite-komite serikat buruh di semua tingkat akan dibentuk lewat pemilihan dalam rapat-rapat umum anggota atau konferensi-konferensi perwakilan.
>
> Para anggota serikat-serikat buruh mempunyai hak, sesuai dengan Konstitusi serikat buruh mereka, untuk kapan saja memecat atau mengganti seseorang

[67] *Constitution of the Trade Unions of the People's Republic of China*, Mukadimah.

[68] *Ibid.*, Ps. 6.

wakil atau anggota komite yang telah mereka pilih. Serikat-serikat buruh pada semua tingkat akan menyerahkan laporan-laporan mengenai pekerjaan mereka kepada barisan anggota biasa yang mereka wakili atau kepada konferensi-konferensi perwakilan mereka dan akan mematuhi keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari organisasi serikat buruh masing-masing yang lebih tinggi.

Semua pengumuman ini, sudah tentu, mengikuti model Sovyet. Konstitusi Serikat-serikat Buruh USSR menggariskan di dalam paragraf 12 bahwa:

Serikat-serikat buruh dibangun berdasarkan azas sentralisme demokratik yang berarti bahwa:

(a) Semua badan serikat buruh dari bawah dipilih oleh para anggota dan bertanggung jawab kepada mereka.
(b) Organisasi-organisasi serikat buruh memutuskan semua isu kegiatan serikat buruh dari serikat-serikat buruh dan keputusan badan-badan serikat buruh lebih tinggi.
(c) Organisasi-organisasi serikat buruh memutuskan keputusan-keputusan mereka dengan pemberian suara mayoritas dari keanggotaan.
(d) Badan-badan serikat buruh yang lebih rendah tunduk pada badan-badan yang lebih tinggi.

Laporan mengenai asalusul konsep sentralisme demokratik dan dimasukkannya konsep itu ke dalam Anggaran-Dasar Partai Komunis USSR, Anggaran Dasar Komintern, dan ke dalam Konstitusi-konstitusi Serikat-serikat Buruh USSR dan Tiongkok jelas memberi kesan bahwa kepemimpinan komunis pertama-tama dan terutama memperhatikan/memperihatinkan masalah mengenai bagaimana menjamin disiplin dan menguasai keadaan. Namun, pengarang buku ini berpendapat bahwa konsep per se tidak harus meniadakan hak-hak demokrasi sejati. Bagi pengarang buku ini tampaknya bahwa konsep itu cukup luwes untuk dilaksanakan di dalam praktik dalam bentuk-bentuk dan derajat-derajat yang berbeda-beda dari sentralisme seketatnya dalam arti otokrasi hingga dinikmatinya prosedur yang sepenuhnya demokratik. Banyak yang akan bergantung pada situasi di mana sistem itu mesti beroperasi. Bagi banyak orang Indonesia konsep sentralisme demokratik

edi cahyono's LIBRARY

mempunyai daya tariknya. Selama berabad-abad rakyat Indonedsia telah sadar akan cita-cita demokrasi dan senantiasa menikmati kebebasan prosedur-prosedur demokratik, sekalipun terbatas pada tingkat desa karena Belanda telah menyerobot kekuasaan pada tingkat-tingkat regional dan nasional.[69] Lagi pula, karena pencapaian kemerdekaan orang Indonesia telah diasyikkan oleh gagasan satu itu untuk membangun suatu negeri baru dan suatu masyarakat baru. Dan menurut Konstitusi Republik Indonesia keadilan sosial akan berlaku dalam masyarakat baru itu dan ekonomi nasional mesti dibangun mengikuti garis-garis sosialis.[70] Ini berarti: perencanaan, suatu derajat tinggi organisasi, dan kepemimpinan, yang diterima sebagai bersesuaian dengan demokrasi, selama sentralisme demokratik berarti pelaksanaan hal-hal esensial seperti kebebasan untuk mengkritik, mendiskusikan dan menyatakan pandangan-pandangan yang berlawanan, dan hak untuk bersuara, untuk menolak, untuk menggantikan fungsionaris-fungsionaris dan menjalankan suatu oposisi yang loyal, banyak orang Indonesia siap untuk menerima panduan yang dipusatkan dari suatu kepemimpinan yang terdiri atas orang-orang yang dipilih secara demokratik dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh suatu mayoritas suara. Tetapi bagian besar orang Indonesia jelas akan menentang suatu sistem yang menjadikan hak-hak dasar dan kebebasan suatu cemoohan/ejekan; mereka akan berpaling dari suatu sentralisme demokratik yang, sebetulnya, hanya akan mengakhiri demokrasi dan membuka jalan pada kediktatoran.

Dengan berlatar-belakangkan suasana pikiran rakyat Indonesia ini kita mesti melihat peranan konsep sentralisme demokratik di dalam gerakan serikat buruh Indonesia. Di samping SOBSI, banyak -serikat buruh lainnya menganut gagasan itu sekali pun tidak semua dari mereka mengenal asal-usul tata nama Bolsyewik itu, dan

[69] Dr. B.J. Rage, dalam *Indonesische en Indische Democratie* memberikan sebuah laporan mengenai prosedur-prosedur demokratik dalam pemerintahan desa pribumi dan komunitas Indonesia.

[70] Konstitusi Republik Indonesia memuat azas-azas sosialis tertentu dan, dalam Ps. 38, menggariskan suatu struktur sosialis dari ekonomi nasional.

banyak dari mereka sama sekali tidak menggunakan istilah sentralisme demokratik itu. Bagi orang-orang Indonesia ini istilah demokrasi terpimpin atau demokrasi dengan kepemimpinan (dibedakan dari demokrasi dalam anarki) barangkali lebih menyenangkan/cocok.

SOBSI menerima sentralisme demokratik sebagai azas organisasinya. Dan mereka melakukan hal itu dengan pandai sekali, yaitu dengan menghindari sesuatu rujukan pada pembatasan-pembatasan atas demokrasi dan dengan hanya menekankan ciri-ciri demokratik sistem itu. Pasal 9 Konstitusi SOBSI menggariskan bahwa:

(a) Semua badan pimpinan akan dipilih secara demokratik dari bawah.
(b) Semua badan pimpinan akan menyerahkan laporan-laporan dan memberi pertanggungjawaban pada waktu-waktu tertentu kepada badan-badan yang telah memilih mereka.

Paragraf ketiga dari Pasal 6 ini, yang menyatakan bahwa "Setiap anggota SOBSI akan mematuhi dan menjalankan setiap keputusan organisasi itu, dan suatu minoritas akan mematuhi suatu mayoritas, dan suatu organisasi serikat buruh lebih rendah tunduk pada suatu organisasi yang lebih tinggi," diterima, nyatanya, sebagai suatu hal organisasi yang masuk akal.

Sesuai dengan itu, di dalam organ-organ SOBSI, dan dalam pidato-pidato para pemimpin SOBSI, manakala membahas konsep itu, tekanan selalu diberikan pada sifat demokratik yang sesungguhnya dari sistem itu, yaitu kebebasan untuk mengkritik, untuk berpartisipasi dalam diskusi-diskusi, untuk meminta para fungsionaris menyerahkan laporan dan memberi pertanggung-jawaban, hak untuk memberikan suara dan untuk memilih, dan untuk menggantikan pejabat-pejabat serikat buruh. Istilah sentralisme demokratik itu sendiri sama sekali tidak disebut-sebut dalam Konstitusi SOBSI yang sekarang. Konstitusi lama menggunakan istilah itu ketika ia dalam Pasal 3 menyatakan bahwa organisasi SOBSI didasarkan pada sentralisme demokratik[71]

edi cahyono's LIBRARY

Konstitusi baru, sekali pun mengabaikan penyisipan/pemasukan nama itu di dalam pasal-pasalnya, tetap mengikuti azas itu. Sebagai suatu kenyataan, SOBSI, sejak 1952, berkeras menekankan dilaksanakannya konsep itu secara ketat. Dalam Konferensi Nasional tahun 1952 dan dalam Kongres Kedua tahun 1955, sentralisme demokratik merupakan satu hal yang didiskusikan secara tuntas, karena di masa lalu azas itu telah agak diabaikan dan tampak di dalam Konstitusi (lama) semata-mata sebagai hiasan etalase. Sekretaris Jendral SOBSI, Njono, di dalam laporannya kepada Konferensi Nasional, mengeluh bahwa SOBSI telah gagal melaksanakan azas sentralisme demokratik itu secara tepat, dan mendesak konferensi membahas masalah itu dan memberikan petunjuk-petunjuk baru. Keluhan Sekretaris Jendral itu menyentuh bagian demokratik maupun panduan sentral sistem itu, menunjukkan bahwa di masa lalu terlalu sedikit kongres, konferensi dan rapat-rapat anggota diselenggtarakan oleh SOBSI dan serikat-serikat buruhnya, dan bahwa, sebaliknya, kepemimpinan puncak SOBSI terlah gagal memberikan panduan yang begitu diperlukan oleh gerakan serikat buruh.

Sekali pun Konstitusi baru SOBSI tidak menyebutkan kata sentralisme demokratik itu sendiri, ia memberikan suatu uraian mengenai konsep itu dalam pengertian yang sangat serupa dengan pola Sovyet dan Tiongkok (Pasal 9 Konstitusi SOBSI yang disebutkan di muka).

Serikat-serikat buruh yang berafiliasi SOBSI juga memuat di dalam konstitusi-konstitusi mereka definisi-definisi mengenai azas sentralisme demokratik sebagaimana itu ditetapkan di dalam Konstitusi SOBSI.[72]

[71] Konstitusi lama SOBSI dapat ditemukan dalam *Tindjauan Masalah Perburuhan*, 1 Juni, 1950.

[72] *Peraturan Dasar SARBUPRI*, 1956, Pasal 9; *Peraturan Dasar SBG*, (1956) Pasal 12; *Peraturan Dasar SARBUKSI*, 1957, Pasal 10; *Peraturan Dasar PERBUM*, (1953), Pasal 10; *Peraturan Dasar SBPP*, 1956, Pasal 8; *Peraturan Dasar SBKA*, 1957, Pasal 9; *Peraturan Dasar SBPU*, 1956, Pasal 12; *Peraturan Dasar SEBDA*, 1956, Pasal 11; *Peraturan Dasar SB KEMPERBU*, 1957, Pasal. 10; *Peraturan Dasar SBRI*, 1956, Pasal 9, dsb.

Di antara federasi-federasi dan serikat-serikat buruh non-SOBSI, HISBBI dan SOBRI secara khusus menyebutkan di dalam konstitusi (Anggaran Dasar) mereka bahwa mereka mendasarkan organisasi mereka atas azas sentralisme demokratik.[73] Dalam penjelasan-penjelasan mereka mengenai konsep itu para pemimpin HISSBI dan SOBRI menggunakan argumentasi-argumentasi dan pembenaran-pembenaran yang mirip dengan yang dikemukqakan oleh SOBSI, sekali pun harus dinyatakan bahwa para ahli teori HISBBI menekankan penegakan hak-hak demokratik dasar dan kebebasan dan memperingatkan terhadap setiap bentuk praktik totalitarian.

KBKI dan GSBI, secara formal, tidak menggunakan konsep sentralisme demokratik. Tetapi gagasan itu sendiri bukan tidak dikenal bagi mereka terbukti dari kenyataan bahwa KBKI dan beberapa pemimpin GSBI telah menyatakan bahwa mereka setuju dengan konsep Presiden Soekarno demokrasi terpimpin atau demokrasi dengan kepemimpinan.

KBSI diam mengenai sentralisme demokratik, sekali pun beberapa kaum sosialis di antara kepemimpinan KBSI boleh jadi mengenal konsep itu sebagaimana mereka mengenal gagasan organisasi massa.

SBII tampaknya melihat sentralisme demokrasi itu sebagai awal dan metode komunis dan menolaknya sebagai suatu persoalan azasi.

Sebagai penutup, pengarang buku ini ingin menyatakan pendapat bahwa konsep sentralisme demokratik telah diterima oleh bagian besar serikat buruh karena ia dipandang sebagai metode terbaik untuk melaksanakan demokrasi sejati di dalam praktik di Indonesia dengan kondisi-kondisinya yang khas dan dengan kebutuhannya akan persatuan dan bimbingan khusus. Masa depan akan membuktikan apakah demokrasi sejati yang akan berlaku atau

[73] *Anggaran Dasar HISSBI*, 1952, Pasal 5; *Anggaran Dasar SOBRI*, 1951, Pasal V.

edi cahyono's
LIBRARY

apakah sentralisme otokratik yang akan berkuasa. Sementara itu, bagi banyak serikat buruh, teristimewa bagi SOBSI dan yang berafiliasi dengannya, konsep itu sudah menghasilkan stabilitas, disiplin dan kekuatan.

# BAB IV
# HUBUNGAN SERIKAT BURUH DENGAN PARTAI POLITIK

Bab-bab di muka sudah mengungkapkan watak politik gerakan serikat buruh Indonesia. Karakteristik ini juga terbukti di dalam eratnya pergaulan serikat-serikat buruh dengan partai-partai politik.

Di banyak negeri, di mana terdapat suatu perhimpunan yang serupa, maka perhimpunan ini seringkali memberikan serikat-serikat itu kesempatan untuk memainkan suatu peranan penting dalam menentukan politik dan penanganan urusan-urusan internal partai-partai politik itu. Di Indonesia, di mana serikat-serikat buruh itu kurang stabil, tidak begitu terbentuk baik, dan lebih muda daripada partai-partai politik, dan di mana unsur-unsur politik, yaitu, para anggota atau yang dinamakan sel-sel partai-partai politik menduduki posisi-posisi kunci dalam banyak serikat buruh dan federasi –gantinya pemimpin-pemimpin serikat buruh yang kuat memegang kedudukan-kedudukan yang penting di dalam badan-badan pimpinan partai— kita mendapatkan konstelasi yang sebaliknya. Di Indonesia, partai-partai poltik telah menjadikan banyak serikat buruh sejenis cabang/tambahan atau satelit, menggunakan serikat-serikat buruh itu sebagai organisasi- front (barisan depan) untuk membantu partai-partai itu dalam kampanye-kampanye politik mereka. Serikat-serikat buruh melakukan jasa-jasa penting bagi partai-partai dalam memperbesar dan memperluas lingkungan pengaruh mereka. Mereka mengorganisasi rapat-rapat politik dan demonstrasi kekuatan dan kekuasaan lainnya. Konsep-konsep serikat-serikat buruh sebagai organisasi massa dan sebagai sekolah-sekolah itu sendiri melayani tujuan ini.

edi cahyono's
LIBRARY

Keadaan ini telah dimungkinkan dengan keberhasilan partai-partai politik tertentu menciptakan atau mereorganisasi serikat-serikat buruh dan federasi-fedeasi. Karena tidak dapat disangkal bahwa penciptaan serikat-serikat buruh dan federasi-federasi tertentu itu sendiri dalam kenyataan merupakan pekerjaan partai-partai politik tertentu.

Kaum komunis telah mengambil prakarsa dalam pembentukan SOBSI pada tahun 1946 dan dalam pembangunan lebih lanjut federasi raksasa ini. Dalam perjalanan bertahun-tahun pengaruh komunis bertumbuh hingga ia menjadi berdominasi dan eksklusif. Reorganisasi SOBSI pada tahun 1952 –ketika Konferensi Nasional Pertama diselenggarakan– dan pada tahun 1955 (Kongres Kedua SOBSI) sepenuhnya merupakan pekerjaan para pemimpin serikat buruh yang berorientasi-komunis. Sejak itu nada dasar SOBSI adalah komunisme. Kaum komunis juga merupakamn kekuatan pendorong dalam pembentukan dan/atau reorganisasi serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan federasi ini, teristimewa SARBUPRI (serikat buruh perkebunan), SBG (buruh industri gula), SBPP (buruh pelabuhan dan pelayaran), SBKA (pegawai kereta api), PERBUM (buruh minyak), SBIM (buruh metal), dan sebagainya.

Pembentukan KBSI pada tahun 1953 terutama merupakan hasil dari hasrat serikat-serikat buruh non-komunis untuk bersatu dan menaham kekuasaan SOBSI yang terus bertumbuh. Kaum sosialis (para anggota PSI) dan kaum nasionalis (para anggora PNI) adalah para pemimpin dalam usaha ini. Koesnan, yang pada waktu itu Ketua GSBI dan yang merupakan seorang pemimpin serikat buruh yang berpengalaman dan juga seorang tokoh terkemuka di dalam Partai Nasionalis, Sukatja dan Rivai S. Atmadja, keduanya dari Partai Sosialis Indonesia, adalah pengorganisasi terpenting dari federasi baru itu. Sejak pengunduran dirinya. Koesnan dan sejumlah serikat buruh yang diilhami-PNI dari KBSI pada akhir tahun 1953 dan pada awal tahun 1954, kaum Sosialis memiliki kebebasan aksi yang lebih besar. Namun, mereka telah secara konsekuen harus memperhitungkan ganjalan-ganjalan pihak sebagian dari beberapa anggota KBSI terhadap intrik-intrik partai-

partai politik dalam federasi mereka.

Penciptaan SBII (Serikat Buruh Muslim) merupakan sepenuhnya pekerjaan Partai Masyumi. Selama suatu konvensi Partai ini pada tahun 1947, pembentukan sebuah serikat buruh yang berdasarkan azas-azas Islam, merupakan suatu pokok diskusi dan pemikiran. Tahun berikutnya sebuah konferensi kaum Ulama dan pemimpin perburuhan dari Afiliasi Islam menyetujui pendirian SBII.

Yang mengenai KBKI, Partai Nasionalis (PNI) yang bertanggung jawab ba penciptaan gerakan ini. Organisasi ini adalah tumbuhan dari suatu biro khusus di dalam Partai Nasionalis –yang aslinya bernama HIMBI atau Himpunan Buruh Indonesia– yang bertanggung jawab dalam menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah perburuhan dan gerakan buruh.

Selama persiapan bagi pembentukan HISSBI pada tahun 1952 dan 1953 para anggota terkemuka Partai Buruh memainkan suatu peranan dominan. Sejak itu perkembangan federasi ini telah berhubungan dengan naik-turunnya Partai Buruh.

SOBRI dibentuk pada tahun 1951 oleh para anggota dan simpatisan Partai Murba.

SARBUMUSI didirikan sebagai suatu implementasi suatu resolusi dari Dewan Partai Nahdlatul Ulama pada bulan September 1954.[1]

Resolusi ini menyetujui penciptaan sebuah gerakan serikat buruh sebagai suatu cabang atau bangunan bawah dari Partai Nahdlatul Ulama agar ia dapat bersaing dengan Partai Masyumi di bidang gerakan perburuhan maupun dalam bidang politik.

Akhirnya, Partai Muslin ketiga di negeri ini, Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII), tidak mau ketinggalan, dan baru-baru ini mendirikan GOBSI-IND.

Fakta yang tersebut di atas dengan jelas mengindikasikan maksud-maksud berbagai partai politik Indonesia berkenaan dengan gerakan serikat buruh. Mereka dengan jelas memandang serikat-serikat

[1] *Pedoman*, 16 September, 1954.

edi cahyono's LIBRARY

buruh sebagai organisasi front (barisan depan) di dalam perjuangan mereka untuk kekuasaan politik.

**Bentuk-bentuk hubungan**

Hubungan serikat-serikat buruh atau federasi dengan partai-partai politik dapat mengambil berbagai bentuk. Serikat buruh atau fedeerasi dapat secara organisasi berhubungan dengan suatu partai politik sebagai suatu anggota yang berafiliasi (seperti dalam kasus hubungan SBII dengan Masyumi) ataupun sebagai suatu cabang atau bangunan-bawah (seperti dalam kasus hubungan SARBUMUSI dengan Nahdlatul Ulama dan dari GOBSI-IND dengan PSII), atau serikat buruh (federasi) dapat menjadi sebuah asosiasi dari partai itu, yang saling bekerjasama satu sama lain sebagai dua mitra setara. Bentuk hubungan ini berlaku bagi asosiasi KBKI-PNI.

Mengenai hubungan antara SOBSI dan PKI (Partai Komunis Indonesia), di sini kita tidak mempunyai sesuatu hubungan organisasi apa pun. Dalam suatu pengertian organisasi tertentu SOBSI merupakan suatu organisasi yang sepenuhnya berdiri sendiri. Hubungan itu ada di dalam identitsas azas-azas ideologi dan pandangan politik dan dalam kesamaan strategi dan taktik-taktik, yang dilaksanakan oleh operasi sel-sel komunis di dalam federasi dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya.

KBSI juga sebuah federasi yang berdiri sendiri di dalam pengertian bahwa ia tidak mempunyai hubungan apa pun dengan sesuatu partai politik. Yang dianggap dominasi federasi ini oleh Partai Sosialis adalah sesuatu yang dibesar-besarkan dari –yang tidak terlalu berhasil juga— usaha beberapa eksponen PSI dalam kepemimpinan federasi itu untuk menciptakan suatu lingkungan pro-PSI di dalam KBSI.

HISSBI dan SOBRI merupakan dua organisasi yang berdiri sendiri di mana secara berturut-turut Partai Buruh dan Partai Murba mempunyai orang-orang masing-masing di dalam kedudukan-kedudukan kunci federasi-federasi itu.

GSBI ;sepenuhnya bebas dari pengaruh langsung sesuatu partai politik. Namun, di antara para pemimpin dan barisan anggota bisa federasi ini terdapat sejumlah kaum nasionalis (anggota PNI).

Laporan mengenai hunbungan federasi-federasi itu dengan partai-partai politik itu membuktikan bahwa gerakan serikat buruh Indonesia bukan suatu hubungan yang kompak dan homogen, melainkan terbagi dan diklasifikasikan mengikuti garis-garis politik. Kerjasama dan konroversi di antara partai-partai politik itu langsung menghasilkan kerjasama atau kontroversi di antara serikat-serikat buruh.

**Hubungan SOBSI dengan PKI**

Seperti dinyatakan di atas, SOBSI adalah, secara organisasi, sebuah gerakan yang sepenuhnya berdiri sendiri. Terhadap tuduhan-tuduhan pihak-pihak lain bahwa federeasi itu dikontrol atau didominasi oleh Partai Komunis (PKI), para pemimpin SOBSI berulang kali mengulangi pernyataan bahwa federasi mereka berdiri sendiri, adalah non-partisan, dan sama sekali tidak didominasi oleh atau berasosiasi dengan sesuatu partai politik yang mana pun. Dari pihak PKI pengyangkalan yang sama juga berulang kali diberikan. Kedua organisasi hanya bersatu di dalam cinta mereka bagi negeri dan rakyat Indonesia, kedua jurubicara masing-masing biasa mengatakan. Kedua organisasi itu mempunyai, sesungguhnya, pikiran-pikiran yang sama mengenai kejahatan-kejahatan yang mengganggu bangsa ini dan mengenai pengobatan untuk menyingkirkan kejahatan-kejahatan ini. PKI dan SOBSI berbagi keyakinan bahwa bangsa ini hanya dapat diselamatkan oileh suatu politik nasional yang ditujukan pada pelepasan diri dari kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme asing dan kakitangan mereka. Dan tugas raksasa Selamatkan Bangsa! dan Hancurkan Musuh-musuh Rakyat, mesti dilakukan oleh suatu *Front Peresatuan Nasional* yang meliputi semua kelompok nasional, partai-partai politik dan organisasi-organisasi buruh, di mana PKI dan SOBSI siap untuk berpartisipasi dan bertanggungjawab.[2]

edi cahyono's LIBRARY

SOBSI mendasarkan klaimnya untuk kebebasannya berdasarkan garis argumentasi berikut ini:

(a) Konstitusi SOBSI dan konstitusi-konstitusi serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya menjamin bahwa SOBSI dan yang berafiliasi dengannya itu bebas, adalah non-partai (non partisan).[3]
(b) SOBSI mempunyai sebuah organisasi yang sepenuhnya berdiri sendiri.
(c) Banyak pemimpin dan anggota SOBSI bukan komunis; sebagian besar dari barisan anggota biasa tidak termasuk pada sesuatu partai politik; beberapa dari mereka adalah koimunis, tetapi di antara barisan anggota biasa juga terdapat anggota-anggota dari partai-partai lain; sekurang-kurangnya seorang anggota dari Dewan Nasional SOBSI termasuk pada satu partai politik yang lain daripada Partai Komunis.[4]

Kelemahan argumenasi itu jelas sekali.

Mari kita periksa point pertama; yaitu, bahwa SOBSI adalah non-partai (non-partisan). Istilah non-partai lazimnya mempunyai dua arti. Non-partai dapat berarti bahwa sebuah organisasi, dalam kasus kita SOBSI itu, secara sepenuhnya netral terhadap semua partai politik, bahwa ia tidak merupakan suatu tambahan atau cabang dari suatu partai politik. Kedua, non-partai berarti bahwa SOBSI itu sendiri bukan sebuah organisasi politik, bahwa ia tidak dianggap berperilaku atau bertindak seperti sebuah partai politik.

Kedua arti diberikan kepada frase selama perdebatan sengit di Rusia sebelum Revolusi Oktober mengenai persoalan jenis hubungan apapkah yang mesti ada di antara serikat-serikat buruh

[2] Ini dan lain-lain kalimat sejenis ini merupakan substansi protes-protes dalam pers Komunis di Indonesia selama delapan tahun terakhir.

[3] *Konstitusi SOBSI*, Ps.1; *cf.* Pasal 1 dari *Peraturan Dasar* (Konstitusi) dari SARBUPRI, SBG, SARBUKSI, SBPP, SBKA, PERBUM, SBPU, SEBDA, SB KEMPERBU, dan dari sebagian besar serikat-serikat buruh yang berafiliasi

[4] *arsono Wardoyo*, yang adalah seorang anggota dari *Partai Permai*, sebuah partai politik kecil dari kaum radikal non-komunis. Werdoyo telah berada dalam kepemimpinan SOBSI selama delapan tahun terakhir.

dan Partai Buruh Sosial-Demokratik Rusia (pendahulu Partai Bolsyewik).

Kesepakatannya ialah bahwa serikat-serikat buruh mestinya organisasi-organisasi non-partai, dalam arti bawa mereka jangan bekerja dan bertindak sebagai badan-badang politik atau partai-partai politik. Perjuangan ekonomi mesti menjadi tugas utama mereka, namun perjuangan ekonom ini mesti dipandang sebagai satu bagian dari suatu perjuangan yang lebih besar, yaitu, perjuangan kelas tunggal dari seluruh kelas buruh terhadap seluruh kelas kapitalis, perjuangan kelas yang sebenarnya suatu perjuangan politik. Dalam pengakuan bahwa mesti ada pembagian tugas di antara Partai dan serikat-serikat buruh, dan bahwa serikat-serikat buruh mesti secara penuh pengabdian menjalankan perjuangan sehari-hari terhadap kaum kapitalis untuk perbaikan kondisi-kondisi kerja, Lenin juga secara berulang-ulang memperingatkan terhadap apa yang dinamakan ekonomisme, yaitu kecenderungan di kalangan banyak kawan masa itu yang memandang perjuangan untuk kemenangan-kemenangan ekonomi langsung sebagai satu-satunya tugas serikat-serikat buruh, dengan sepenuhnya mengabaikan perjuangan politik.[5] Kesimpulan kemudian dicapai bahwa serikat-serikat buruh bukanlah perhimpunan-perhimpunan politik, bahwa tugas khusus masing-masing ialah perjuangan ekonomi itu; namun, perjuangan politik, khusuusnya bagian darinya yang sangat penting bagi perjuangan ekonomi dan bagi jaminan kebebasan serikat buruh dan hak-hak kaum buruh, mesti juga menjadi perhatian gerakan serikat buruh. Dan yang paling penting, sudah menjadi pengertian bahwa, dalam melakukan perjuangan politik ini, serikat-serikat buruh mesti mendapatkan panduan/ bimbingan Partai Buruh Sosial-Demokratik itu (Partai Komunis)..

Serikat-serikat buruh juga mesti non-partai dalam pengertian bahwa mereka jang mempunyai ikatan-ikatan organisasi dengan Partai, dan bahwa organisasi mereka mesti terpisah dan berdiri sendiri. Namun, Partai mesti mempunyai pengaruh atas serikat-

[5] *Cf.* Isaac Deutscher, *Soviet Trade Unions*, hlm. 7-8, dan Thomas T. Hammond, *Lenin on Trade Unions and Revolution*, hlm. 15-33.

edi cahyono's LIBRARY

serikat buruh. Persoalan bagaimana dan hingga batas mana pengaruh partai ini mesti dikerahkan, bergantung pada tahap atau fase dari perjuangan proletariat. Manakala Partai dan serikat-serikat buruh mesti bekerja dalam situasi yang luarbiasa sulit dan berbahaya, karena pemerintahan kapitalis yang berkuasa sangat bermusuhan terhadap gerakan dan Partai dan serikat-serikat buruh itu sendiri masih muda dan lemah, pengaruh Partai atas serikat-serikat buruh mesti dikerahkan secara berhati-hari, berhemat, bertahap, dan secara rahasia. Namun manakala Partai telah menjadi suatu kekuasaan yang dihormati di negeri itu dan segala sesuatu mesti diekspos kepada dunia luar, maka Partai mesti mengambil alih kekuasaan atas gerakan serikat buruh, secara terbuka dan menentukan.[6]

Demikian, dapat terjadi bahwa dalam Rusia masa-kini serikat-serikat buruh masih dirujuk sebagai organisasi-organisasi non-partai, sudah tentu, hanya dalam pengertian bahwa mereka bukan asosiasi-asosiasi politik[7] Pada waktu bersamaan, serikat-serikat buruh USSR berada di bawah kekuasaan CPSU (Partai Komunis Uni Sovyet). Dengan kemenangan kelas buruh melalui Revolusi Oktober, serikat-serikat buruh Sovyet telah menjadi sebuah alat dari kelas berkuasan dengan tugas utama mereka: mempersiapkan massa kaum pekerja untuk peranan mereka sebagai pembangun suatu masyarakat baru. Bagaimana tugas ini mesti dilaksanakan oleh serikat-serikat buruh Sovyet?

> Tugas yang dituntut dari serikat-serikat buruh tidak dilaksanakan oleh mereka secara acak, tetapi dalam satu cara terorganisasi, di bawah kepemimpinan kaum komunis yang aktif di dalam gerakan serikat buruh. Berjuta-juta rakyat bekerja secara sadar dan secara sukarela mengakui kepemimpinan Partai Komunis.....[8]

Di Uni Sovyet masa kini, bagaimanakah Partai Komunis melaksanakan kepemimpinannya dalam serikat-serikat buruh?

[6] F. Thomas T. Hammond, *op cit*, hlm. 60-75.

[7] *Constitution of the Trade Unions of the USSR*, Mukadimah.

[8] A. Lozovsky, *Handbook on the Soviet Trade Unions*, hlm 120

Tentang hal ini kita membaca dalam Lozovsky, penjelasan berikut ini:[9]

> Ia (Partai Komunis) melakukan itu melalui perantaraan kaum Komunis yang bekerja dalam serikat-serikat buruh. Para anggota Partai di dalam komite-komite serikat buruh pabrik dan lembaga, dalam presidium komite-komite regional, teritorial dan sentral dari serikat-serikat buruh, di dalam AUCCT,[10] merupakan kelompok-kelompok Partai yang tunduk pada masing-masing organisasi partai. Demikianlah, misalnya, kelompok Partai di dalam komite serikat buruh pabrik tunduk pada komite Partai pabrik.
>
> Tugas kelompok Partai ialah menjelaskan politik Partai kepada kaum buruh non-Partai dan meyakinkan mereka untuk menerimanya. Namun begitu, mereka melakukan itu tidak dengan memaksakan saranan-saranan mereka kepada para buruh non-Partai, melainkan dengan menjelaskan dan membuktikan kepada kaum buruh ini bahwa saranan mereka merupakan satu-satunya saranan yang tepat, bahwa itu adalah untuk kebaikan bagi kolektif tertentu maupun masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Di Tiongkok kita dapatkan situasi yang sama. Serikat-serikat buruh bukan organisasi-organisasi politik dan mereka tunduk pada bimbingan Partai Komunis.[11]

Dengan menempatkan SOBSI berlatar-belakang Sovyet dan sebelum kemenangan Revolusi-revolusi Komunis, kita melihat hubungan di antara SOBSI dan Partai Komunis Indonesia muncul dalam kejelasan yang terang-benderang. Misalnya, kalimat dalam Pasal 1 dari Konstitusi SOBSI yang menyatakan bahwa federasi itu adalah sebuah organisasi non-partai, hanya berarti bahwa SOBSI bukanlah sebuah perhimpunan politik, tetapi kalimat itu tidak berarti bebasnya SOBSI dari PKI.

Arti istilah non-partai di Indonesia sekarang ialah: tidak berafiliasi dengan sebuah partai politik. Apakah yang sama diartikan oleh SOBSI ketika ia menerima Pasal 1 Konstitusinya? Kecil kemungkinannya, karena federasi itu, sudah tentu, telah mengambil frase itu dari model Sovyet dan dari situasi di sana

[9] *Ibid.*, hlm. 121.

[10] AUCCTU adalah inisial-inisial *All-Union Central Council of Trade Unions.*

[11] *Constitution of the Trade Unions of the People's Republic of China*, Preambul.

edi cahyono's LIBRARY

sebelum Revolusi Oktober. Para pemimpin SOBSI, yang adalah murid-murid yang maju tentang teori dan metode komunis, secara sempurna mengetahui apa watak non-partai dari serikat-serikat buruh itu artinya. Mereka tidak mengadopsi pasal lainnya dari model Sovyet itu, yaitu bahwa serikat-serikat buruh bekerja di bawah panduan Partai Komunis, adalah juga dinalarkan dengan cermat. Indonesia belum mencapai tahapan bagi suatu politik yang begitu terbuka!

Mari kita sekarang membahas argumen kedua dari SOBSI itu, yaitu bahwa ia mempunyai suatu organisasi yang sepenuhnya berdiri sendiri, yang terpisah dari bebas dari sesuatu hubungan organisasi dengan Partai Komunis atau dengan sesuatu partai politik lainnya. Mengenai hal ini, pengarang buku ini ingin juga merujuk kepada situasi di Rusia sebelum Revolusi Sosialis tahun 1917 dan di USSR masa kini dan Tiongkok di mana Federasi Serikat-serikat Buruh secara sama telah dan secara terpisah diorganisasi bebas dari hubungan-hubungan organisasi formal dengan Partai Komunis, karena alasan-alasan bahwa serikat-serikat buruh mesti dan tetap mesti merupakan organisasi-organisasi massa, sedangkan Partai Komunis itu bukan organisasi massa.

Suatu hal ikhwal penting diajukan oleh para pemimpin SOBSI ketika mereka menyatakan bahwa bagian besar dari barisan anggota biasa dari SOBSI bukanlah komunis dan bahwa hanya sejumlah tertentu dari para pemimpin SOBSI itu adalah komunis.

Bahwa banyak atau kebanyakan anggota dari SOBSI dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya bukan komunis atau bahwa di antara mereka bahkan anggota dari partai-partai politik lain, secara sepenuhnya cocok bagi konsepsi organisasi massa dari gerakan serikat buruh. Seseorang dapat menjadi seorang anggota dari SOBSI tanpa memandang ras, jenis kelamin, keyakinan politik, dsb. Namun, kuncinya ialah, bahwa sejumlah komunis dipekerjakan di kepemimpinan puncak dan regional dari SOBSI dan di dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya. Konsepsi komunis mengenai hubungan Partai—Serikat Buruh ialah bahwa para anggota Partai harus aktif di berbagai pos dalam

serikat-serikat buruh dan di dalam SOBSI sebagai sel-sel atau agen-agen khusus.

Para anggota Partai Komunis Indonesia yang memegang kedudukan di dalam SOBSI adalah kaum komunis kelas satu dan juga tokoh-tokoh serikat buruh yang berpengalaman/ Dari sembilan orang, yang dipilih pada tahun 1956 ke Biro Sentral SOBSI, enam adalah anggota terkemuka pemegang-kartu anggota Partai Komunis Indonesia, kesemuanya duduk di kursi parlemen sebagai anggota dari fraksi Komunis. Keenam orang ini adalah: Njono, (Sekretaris Jendral SOBSI), Tjugito, Sekretaris Dewan Nasional SOBSI), Djokosudjono, (anggota Dewan Nasional), Suhaemi Rahman, (anggota Dewan Nasional), Sudoyo, (anggota Dewan Nasional), Singgih Tirtosoediro, (anggota Dewan Nasional)[12]. Dua tokoh lainnya, F. Runturambi dan Soeprapto, adalah juga sangat terkenal sebagai mitra dekat dari PKI, dan kini anggota Parlemen, dipilih pada tahun 1955 lewat pencalonan oleh PKI. Pengarang buku ini yakin bahwa kedua tokoh tersebut terakhir ini akan segera menjadi anggota resmi dari Partai Komunis. Demikianlah, hanyalah anggota ke sembilan dari Biro Sentral SOBSI itu yang adalah seorang anggota sebuah partai lain. K. Werdoyo, juga seorang anggota Parlemen, adalah seorang pemimpin dari Partai Permai.

Di dalam pernyataan-pernyataan mereka, yang menekankan watak berdiri sendiri dari SOBSI, jurubicara federasi itu maupun dari Partai Komunis, sambil mengakui kehadiran begitu banyak komunis di dalam SOBSI, selalu berusaha meminimalkan arti-penting situasi ini. Mereka menegaskan bahwa kehadiran mereka hanya suatu kejadian yang kebetulan, disebabkan oleh ketepatan azas-azas dan kebijakan-kebijakan dan pengabdian mereka kepada kesejahteraan nasional rakyat Indonesia. Yang tipikal dari jenis mentalitas komunis ini adalah di dalam isi sebuah surat yang ditulis dan dikirimnkan pada 4 Desember, 1954, oleh Njono, Sekretaris Jendral SOBSI, kepada D.N. Aidit, Sekretaris Jendral Partai Komunis

[12] *Bendera Buruh*, 7 Maret, 1956, hlm. IV, dan Parlaungan, *Hasil Rakjat Memilih Tokoh-tokoh Parlemen*, hlm. 267.

edi cahyono's LIBRARY

Indonesia, pada peristiwa manakala Njono mengajukan permintaan akan keanggotaan PKI setelah menjadi pemimpin pucak dari SOBSI dan seorang simpatisan kuat dari Partai Komunis selama banyak tahun. Njono menyudahi suratnya itu dengan dugaan bahwa permintaan akan keanggotaan Partai Komunis itu akan disamber oleh kaum kapitalis dan kaum reaksioner untuk memperbarui tuduhan-tuduhan mereka bahwa SOBSI didominasi oleh Partai Komunis.[13]

Dengan Njono di pimpinan, kaum komunis dan para simpatisan-komunis di dalam barisan SOBSI dan di dalam serikat-serikat buruh yang berafiliasi selama sepuluh tahun telah menjalankan pekerjaan sulit dalam mengubah SOBSI dari sebuah gabungan serikat-serikat buruh dengan azas-azas longgar berserakan menjadi sebuah organisasi yang terorganisasi-baik dan sangat efisien di bawah bimbingan monolitik kaum komunis yang berpengalaman dan penuh pengabdian. Berkat para revolusioner profesional yang tidak mengenal letih (atau, sebagai suatu versi kata-kata Lozovsky: "Berkat kebijakan revolusioner yang konsekuen dan tepat dari kaum Komunis dan pekerjaan penjelasan yang berkanjang di kalangan massa, yang tersebut terakhir itu segera melihbat/ mengetahui siapa yang memimpin mereka mengikuti jalan yang tepat, dan mengakui Partai Komunis sebagai satu-satunya kekuatan yang memimpin,),"[14] SOBSI telah menjadi sebagaimana ia adanya sekarang: sebuah organisasi hebat dan sebuah senjata perkasa dari kaum komunis yang dapat diandalkan pada setiap peristiwa.

Mari kita sekarang mengalihkan perhatian pada federasi-federasi lainnya.

**KBSI**

Lawan-lawan federasi ini dan musuh-musuh politik Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan teristimewa kaum komunis, suka merujuk

[13] *Harian Rakjat*, 6 Desember, '1954.

[14] Lozovsky, *Handbook on the Soviet Trade Unions*, hlm. 119.

pada KBSI sebagai sebuah cabang PSI dan sebuah alat dalam tangan kaum sosial-demokrat sayap kanan Indonesia yang reaksioner ini. Anggapan didominasinya KBSI oleh Partai Sosialis ini berasal dari kenyataan bahwa sejumlah kaum sosialis menduduki posisi-posisi kunci di dalam Komite Eksekutif Pusat dari Federasi itu, digabung dengan kenyataan bahwa KBSI telah mengambil peranan pesaing dan lawan dari SOBSI yang didominasi-komunis.

Karena Partai Sosialis telah memperagakan suatu sikap yang sangat kritikal terhadap Kabinet-kabinet pertama dan kedua dari Dr. Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasionalis (Agustus 1953-Agustus 1955 dan April 1956-Maret 1957) dan kaum Sosialis di dalam KBSI dicurigai mempunyai peranan dalam mengaduk/menghasut federasi ini selama periode-periode itu, Partai Nasionalis dan partai-partai lain yang mendukung Ali Sastroamidjojo, ditambah gerakan-gerakan serikat buruh masing-masing (KBKI, GSBI) ditambahkan kepada lawan yang sudah banyak sekali dari KBSI dan PSI.

Apakah kebenarannya mengenai yang dianggap dominasi KBSI oleh Partai Sosialis?

Jurubicara KBSI berulang-ulang menegaskan bahwa federasi itu sebuah organisasi yang berdiri sendiri yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan sesuatu partai pilitik yang mana pun juga. Ps. VIII Konstitusi KBSI menyatakan bahwa organisasi itu berdasarkan demokrasi dan mempunyai suatu watak bebas dan non-partai. Kusna Puradiredja sendiri, Ketua KBSI, tidak berbuat apa pun untuk mempertahankan federasinya itu di luar politik partai dan untuk mempertahankan watak organisasi sebagai suatu gerakan serikat buruh sejati, ia hanya memperhatikan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Ia sendiri, seorang tokoh serikat buruh yang saleh, dengan cemas mengamati balkanisasi gerakan serikat buruh Indonesia oleh partai-partai politik. Hingga seberapa jauh ia berhasil dalam menjadikan federasinya suatu gerakan serikat buruh sejati dan berdiri sendiri? Hingga seberapa jauh kaum sosialis di dalam KBSI berhasil dalam menjadikan federasi itu sebuah gerakan pro-PSI?

edi cahyono's
LIBRARY

Pengarang buku ini mengetahui dari hubungan-hubungan pribadi bahwa KBSI adalah sebuah federasi yang terorganisasi baik di bawah suatu manajemen yang bagus sekali. Demikian pula kasusnya dengan berbagai serikat buruh yang berafiliasi dengannya, teristimewa serikat buruh Puradiredja sendiri, PBKA (serikat buruh pegawai kereta api). Tetapi sejauh yang mengenai kemandirian federasi itu, keberhasilan Puradiredja sedikit banyak telah tertahan oleh kegiatan-kegiatan unsur-unsur PSI dalam federasi itu dan di banyak serikat buruh yang berafiliasi dengannya. Sebaliknya, tidak terdapat bukti bahwa kaum sosialis telah mencapai tujuan dari yang dianggap usaha-usaha subversif mereka, yaitu menjadikan federasi itu sebuah satelit dari PSI. Paling-paling, kaum sosialis itu telah menyumbang pada penciptaan suatu lingkungan simpati di kalangan banyak anggota KBSI terhadap cita-cita dan tujuan-tujuan sosialis. Oleh karenanya, tampak pada pengarang buku ini bahwa dominasi KBSI oleh Partai Sosialis hanyalah sebuah mitos, sebuah provokasi jahat dari pihak para pesaingnya dan musuh-musuh politiknya, dan mungkin sekali, suatu produk impian khayal beberapa pemimpin PSI.

Mari kita sekarang melihat beberapa kenyataan. Mereka dalam kepemimpinan KBSI yang adalah anggota Partai Sosialis adalah: A.H. Siregar, Wakil-Ketua federasi itu, Andi Zainal Abidin, Sekretaris Jendral, Kuswari, Wakil Sekretaris Jendral, Afnan, Bendahara, dan beberapa orang lainnya. Ketuanya, Kusna Puradiredja, tidak berafiliasi dengan sesuatu partai politik, sekali pun ia pada umumnya bersimpati dengan cita-cita sosialis demokratik. Dalam komite-komite KBSI regional juga terdapat kaum sosialis aktif dalam posisi-posisi kunci. Dalam komite eksekutif PBKA, B.K.J.Tambunan (sekretaris organisasi), R.A. Santoso (sekretarius penerangan) dan Sudarsono (penanggungjawab program pendidikan) adalah anggota-anggota Partai Sosialis. Dalam komite eksekutif SBP (pegawai penerbangan), A.H. Siregar (Ketua), Lauw Beng Hien (Wakil-Ketua) dan Sukanto (Sekretaris Jendral) adalah juga anggota-anggorta yang yakin dari Partai Sosialis Indonesia.

Pada waktu serikat-serikat buruh pro-PNI dan serikat-serikat buruh anti-PSI masih berada di dalam KBSI, yaitu sebelum mundurnya serikat-serikat buruh itu secara massal dari federasi itu pada tahun 1954, para pemimpin sosialis di dalam federasi itu terus-menerus menimbulkan kekesalan di kalangan serikat-serikat buruh ini. Aktiviras-aktivitas yang dianggap pro-PSI, teristimewa yang dijulukkan kepada Sukatja, mantan sekretaris jendral federasi itu, dan Rivai S. Atmadja, seorang tokoh kunci lain dalam komite eksekutif KBSI, mengakibatkan ketegangan-ketegangan. Usaha-usaha untuk meredakan ketegangan-ketegangan itu, di antara lainnya dengan mengekang kegiatan-kegiatan para anggota sosialis dalam kepemimpinan KBSI tidak berhasil, dan meninggalkan ketegangan dan dakwaan-dakwaan itu tetap marak. Pada bulan Desember 1953 dilaporkan bahwa keputusan Koesnan, Ketua KBSI pada waktu itu, bersiap untuk mengundurkan diri karena perbedaan-perbedaan pendapat dengan kaum sosialis di dalam komite eksekutif federasi itu. Dalam sebuah pernyataan, komite eksekutif memberitahukan kepada publik bahwa keputusan Koesnan untuk mengundurkan diri dari KBSI adalah persoalan dan tanggungjawab Koesnan sendiri.[15] Suratkabar yang memuat pernyataan itu menyarankan bahwa adalah Partai Nasionalis, partai politik Koesnan, yang, dalam kenyataan, bertanggungjawab atas keputusan Koesnan itu. Beberapa hari kemudian, suatu afiliasi KBSI, serikat pegawai bank-bank rakyat yang dioperasikan-Pemerintah (SPBRI), menuduh sejumlah anggota dari komite eksekutif KBSI melakukan praktik-praktik yang tidak jujur, yaitu telah melakukan aktivitas-aktivitas pro-PSI. Serikat buruh itu menuntut pengskorsan Sukatja dan Rivai S. Atmadja dari KBSI.[16] Sebabnya ialah bahwa kedua fungsionaris KBSI ini dilaporkan terlibat dalam suatu usaha oleh Partai Sosialis untuk mempengaruhi pengangkatan delegasi-delegasi ke konvensi salah satu serikat buruh yang berafiliasi dengan KBSI, SSKDN (Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri). SBBRI juga mendukung tuntutan PGRI

[15] *Pedoman*, 4 Desember, 1953.

[16] *Pedoman*, 7 Desember, 1953.

edi cahyono's
LIBRARY

(Persatuan Guru), pada waktu itu juga berasosiasi dengan KBSI, bahwa federasi itu mesti menyelenggarakan suatu kongres darurat secepat mungkin untuk mereorganisasi federasi itu dan mengeluarkan para individu dalam kepemimpinan federasi yang telah menyalahgunakan kedudukan mereka dengan mengorbankan watak non-partai dari federasi itu. Namun mayoritas serikat-serikat buruh yang berafiliasi, tidak setuju dengan saran untuk mengadakan sebuah kongres, dengan akibat bahwa di bulan-bulan berikutnya sejumlah serikat buruh mengundurkan diri dari federasi itu. Tuduhan-tuduhan lebih jauh mengenai aktivitas-aktivitas pro-PSI oleh fungsionaris KBSI mengakibatkan pemecatan beberapa tokoh Sosialis dari cabang Bandung federasi itu dalam bulan Mei 1954 Pada waktu bersamaan sebuah pernyataan resmi KBSI, yang ditanda tangani oleh Kusna Puradiredja pada 10 Mei, 1954, menyangkal keberadaan bukti apapun bahwa Partai Sosialis telah atau berusaha mendominasi KBSI.[17] Pada bulan Mei 1955 tuduhan terhadap federasi sebagai sebuah alat poltiik dalam tangan Partai Sosialis mencapai puncaknya, berasal dari kenyataan bahwa dalam bulan Mei 1955 federasi itu dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya terlibat dalam suatu pemogokan berskala-besar, berarti sebagai sebuah protes terhadap Pemerintah karena yang dianggap kegagalannya atau penolakannya untuk mengambil tindakan terhadap melambungnya harga-harga komoditi dan langkah-langkah lain yang dapat mengurangi kesulitan-kesulitan kaum buruh.[18] Pemerintah, partai-partai politik dan serikat-serikat buruh yang mendukung Pemerintah dan Pers Pro-Pemerintah[19] mengutuk aksi KBSI itu sebagai keliru, jahat, reaksioner, merusak kepentingan kaum buruh, dan diilhami oleh kelompok-kelompok politik yang menentang Pemerintah, khususnya Partai Sosialis. Pemerintah didesak mengambil tindakan-tindakan drastrik terhadap biangkeladi pemogokan itu. Nah, KBSI bertahan hidup dalam krisis itu, sekalipun aksi protes itu sendiri telah memperolah

[17] *Pedoman*, 12 Mei, 1954.

[18] *Abadi*, 7 Mei, 1955; *Pedoman*, 7 Mei, 1955.

[19] *Merdeka*, 9 Mei, 1955; *Harian Rakjat*, 6, 7, 9 dan 11 Mei, 1955.

keberhasilan yang kurang berarti karena kekuatan terbatas dari serikat-serikat buruh yang ikutserta, dan, sekurang-kurangnya menurut KBSI, karena digunakannya orang-orang pemecah pemogokan yang disediakan oleh SOBSI.[20]

Dalam meringkas, pengarang buku ini dapat mengatakan yang berikut ini tentang kedudukan KBSI

(a) Banyak pemimpin federasi itu dan dari serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya adalah tulus dalam usaha-usaha mereka untuk menjadikan KBSI sebuah organisasi yang berdiri sendiri dan non-politik.
(b) Partai Sosialis Indonesia, atau sekurang-kurangnya para pemimpin tertentu dari partai ini, ingin membawa federasi itu ke dalam lingkungan pengaruh partai itu melalui operasi sel-sel partai di dalam federasi itu. Dalam usaha-usaha ini PSI telah mencapai sukses yang besar, tetapi juga telah menghadapi perlawanan dan juga menimbulkan kegelisahan dan ketegangan.
(c) Apakah PSI dalam jangka panjangnya akan berhasil dalam menguasai federasi itu secara sepenuhnya, hal itu bergantung pada haridepan partai itu sendiri. Jika PSI mampu bertahan dalam krisis yang memukul partai itu sejak tahun 1955 dan muncul kembali sebagai suatu faktor berpengaruh didalam pentas politik Indonesia, maka mungkin bagi partai itu untuk menguasai KBSI secara menentukan. Namun begitu, peluang-peluang bagi PSI untuk berpengaruh kembali tidaklah terlalu besar.

**KBKI**

Federasi ini, yang tanpa belas kasihan dalam mencaci KBSI karena mempunyai hubungan-hubungan tidak patut dengan PSI, sendiri mempertahankan hubungan erat dengan sebuah partai politik, Partai Nasional Indonesia, sambil pada waktu bersama mempunyai

[20] *Pedoman*, 9 Mei, 1955.

edi cahyono's LIBRARY

suatu status setara sebagai mitra dalam suatu kerjasama sukarela dengan partai ini. Semua pemimpin KBKI, termasuk Ketuanya, Ahem Erningpradja, adalah anggota Partai Nasional Indonesia. Dalam sebuah wawancara-pers, Erningpradja, mendiskusikan hubungan-hubungan antara SOBSI (bekas organisasinya) dan Partai Komunis, menyatakan pendapatnya bahwa ia tidak akan terkejut jika Njono (Sekretaris Jendral SOBSI yang belum lama berselang mengajukan permintaan untuk menjadi anggota Partai Komunis Indonesia , menjalankan politik komunis di dalam SOBSI, karena dirinya sendiri (Erningpradja) sebagai seorang anggota Partai Nasionalis selalu siap untuk sekuat tenaga berusaha mengubah gerakan serikat buruhnya, KBKI, pada azas-azas dan politik Partai Nasionalis.[21]

**SBII**

Dengan SBII hubungan politik adalah sangat sederhana. SBII berafiliasi dengan Partai Masyumi sebagai anggota istimewa, dan semua pemimpin serikat buruh itu adalah juga anggota Masyumi.

**HISSBI dan SOBRI**

Hubungan HISSBI dengan Partai Buruh semata-mata didasarkan pada identitas gagasan-gagasan dan cita-cita. Semua pemimpin HISSBI adalah anggota Partai Buruh. Kecuali itu, HISSBI merupakan suatu organisasi yang sepenuhnya berdiri sendiri.

SOBRI juga berdiri sendiri, tetapi mengikuti politik Partai Murba. Semua anggota SOBRI adalah anggota Partai ini.

[21] *Pedoman*, 9 Desember 1954. Kesiapan Erningpradja untuk menjadikan KBKI semacam perpandangan PNI terlampau berlebihan, karena sudah diputuskan dalam Pernyataan Azas-azas KBKI bahwa federasi itu menganut azas-azas dan politik PNI.

**Serikat-serikat Buruh Merdeka**

Sebab utama mengapa banyak serikat buruh lebih memilih untuk tetap berada di luar federasi-federasi ialah karena mereka menyesalkan afiliasi federasi-federasi itu dengan partai-partai politik. Beberapa dari serikat-serikat buruh itu pernah anggota dari federasi-federasi di masa lalu, tetapi kini telah mengundurkian diri dari organisasi-organisasi itu karena kekecewaan dan pengalaman pahit dengan intrik-intrik partai-partai politik atau sama sekali tidak menyukai partai-partai politik, justru keberadaan dan keselamatan serikat-serikat buruh itu sendiri akan dibahayakan jika mereka tetap berada di dalam atau menjadi anggota federasi-federasi.

PGRI (Persatuan Guru), sebelumnya berafiliasi dengan KBSI, dan sebelum itu, dengan GSBI, kini berdiri sendiri sebagai akibat kekhawatiran –sebagaimana secara khusus dinyatakan oleh barisan anggota biasa– menjadi sasaran intrik-intrik politik.

Konsekuensi wajar dari keadaan ini ialah serikat-serikat buruh merdeka bebas dari afiliasi dengan partai-partai politik tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa partai-partai politik itu sendiri tidak berusaha untuk menggunakan pengaruh mereka, atau bahwa di kalangan keanggotaan tidak terdapat unsur-unsur dengan kedekatan pada partai-partai politik. Menarik untuk diperhatikan ialah pengalaman beberapa pemimpin puncak dari PGRI selama beberapa tahun terakhir. Pada awal tahun 1954 serikat buruh ini menarik diri dari KBSI. Kongres Ketujuh PGRI, yang diselenggarakan pada akhir bulan November 1954, menegaskan kembali keputusan serikat buruh itu untuk tetap berdiri sendiri. Kongres ini juga memilih suatu komite eksekutif baru, di antara lain terdiri atas Soedjono sebagai Ketua Umum, M.E. Subiadinata sebagai Ketua Satu dan Hermanu Adi sebagai Ketua Dua.[22] Segera setelah Kongres itu keanggotaan PGRI digelisahkan oleh berita dalam pers bahwa Soedjono dan Hermanu Adi telah dinominasikan oleh Partai

[22] *Pedoman*, 6 dan 13 Desember, 1954.

edi cahyono's
LIBRARY

Komunis di dalam pemilihan parlemen, dan bahwa nama-nama mereka muncul di dalam daftar calon PKI sebagai berturut-turut Ketua Umum dan Ketua Dua PGRI. Tampaknya, karena tekanan dari para anggota, komite eksekutif dari PGRI mengirimkan sebuah nota protes kepada Partai Komunis terhadap disebutkannya nama serikat buruh PGRI di belakang nama-nama Soedjono dan Hermanu Adi.[23] Banyak cabang PGRI terguncang, sesungguhnya, oleh peristiwa itu.[24]

Soedjono kini seorang anggota Parlemen, tetapi Kongres berikutnya dari PGRI, yang diselenggareakan pada bulan Juni 1956, menggantikan Soedjono dengan Subiadinata sebagai Ketua Umum serikat buruh itu. Namun, kedudukan kuat Soedjono di kalangan anggota sekawan di dalam serikat buruh itu secara jelas didemonstrasikan ketika Soedjono terpilih sebagai orang kedua, yaitu sebagai Ketua Satu dari PGRI. Bagaimana pun, ia seorang yang sangat pandai dan seorang pemimpin yang baik bagi PGRI. Tetapi, itu juga dapat berarti bahwa Partai Komunis mempunyai pengikut yang kuat di dalam serikat buruh itu.

[23] *Pedoman* 23 Desember, 1954. Suratkabar itu tidak memberitahu apakah Soedjono dan Adi juga menandatangani nota protes ini.

[24] *Cf.Pedoman*, 30 Desember 1954.

# BAB V

# KEGIATAN POLITIK SERIKAT BURUH

Gerakan serikat buruh Indonesia, dipolitikkan sebagaimana ia adanya, tidak membatasi perhatiannya pada bidang ekonomi. Ia juga aktif di bidang politik.

Pertama-tama, gerakan itu merisaukan kebijakan Pemerintah berkenaan dengan perburuhan dan dengan perundang-undangan perburuhan. Kedua, ia juga berkepentingan dalam masalah-masalah politik yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan perburuhan.

Di atas segala-galanya, gerakan itu telah mengambil tanggungjawab besar untuk keamanan dan integritas negeri, bagi pelestarian dan penyempurnaan kemerdekaan dan kedaulatan Republik dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Serikat-serikat buruh itu siap berpartisipasi dalam perkembangan dan pembangunan kembali negara dan untuk maksud ini bersedia untuk menanggung kesulitan-kesulitan tertentu secara sabar. Sebagai tambahan, politik luarnegeri dan urusan dunia pada umumnya juga merupakan masalah penting bagi federasi-federasi dan bagi banyak serikat buruh.

Perhatian dalam masalah-masalah politik ini mendapatkan ungkapannya dalam berbagai pernyataan dan resolusi, dalam komite-komite gabungan dan konferensi-konferensi, dalam lobi-lobi, dalam melakukan tekanan-tekanan dan dalam mengorganisasi rapat-rapat massa dan demonstrasi-demonstrasi raksasa. Pemogokan politik juga bukan suatu senjata yang tidak dikenal. Dengan suatu sifat yang agak garang adalah aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda pada bulan Desember 1957 setelah

edi cahyono's
LIBRARY

suatu pemogokan umum di semua perusahaan itu di seluruh negeri. Aksi-aksi ini dilakukan oleh serikat-serikat buruh sebagai pembalasan terhadap politik Belanda berkenaan dengan Irian Barat.

## Aktivitas Serikat Buruh dalam Hubungan dengan Kebijakan Perburuhan Pemerintah dan Perundang-undangan Perburuhan

Di Indonesia, Pemerintah dipandang berkewajiban untuk melindungi perburuhan, membela hak-hak kaum buruh dan memajukan kondisi-kondisi kerja yang adil. Sudah dianggap dengan sendirinya bahwa Pemerintah berada di pihak kaum buruh di dalam perjuangan mereka terhadap eksploitasi dan penindasan. Ini adalah sangat wajar karena Republik Indonesia adalah produk dari suatu revolusi di mana kaum buruh mempunyai suatu bagian yang aktif. Republik itu adalah hasil dari empatpuluh tahun perjuangan di mana kebebasan dari eksploitasi dan dari penindasan merupakan isu besarnya.

Penerimaan oleh negara akan kewajiban-kewajiban terhadap rakyat pekerja diwujudkan di dalam Konstitusi Republik Indonesia. Pasal 19 Konstitusi menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sedangkan Pasal 20 mengakui hak semua warga atas kebebasan berkumpul dan berasosiasi. Merujuk pada hak kaum buruh khususnya, Pasal 21 menyatakan bahwa hak untuk berdemonstrasi dan untuk mogok diakui dan akan ditentukan dengan undang-undang. Sebagai tambahan, Pasal 29 menjamin hak setiap orang untuk membentuk dan bergabung pada serikat-serikat buruh untuk perlindungan dan memajukan kepentingan-kepentingannya. Yang mengenai pekerjaan dan kondisi-kondisi pekerjaan Pasal 28 mengatakan

1. Setiap warga, menurut kemampuannya, mempunyai hak untuk bekerja, yang layak bagi seorang makhluk manusia.
2. Setiap orang mempunyai hak atas pilihan pekerjaan secara bebas dan atas kondisi-kondisi kerja yang adil.

3. Setiap orang mempunyai, dalam kondisi-kondisi yang setara, hak atas pembayaran setara untu pekerjaan setara dan atas kontrak-kontrak kerja yang sama-sama menguntungkan.
4. Setiap orang yang bekerja mempunyai hak atas pembayaran yang adil, yang menjamin suatu kondisi yang sesuai dengan martabat manusia bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

Konsepsi revolusioner mengenai Negara dan pencerminannya di dalam ketentuan-ketentuan Konstitusi telah menempatkan Pemerintah Indonesia dalam suatu keadaan yang tunduk pada tekanan kuat oleh rakyat, dan khususnya, oleh serikat-serikat buruh. Jelas bahwa realisasi azas-azas dan tujuan-tujuan yang begitu tinggi mesti dibarengi kesulitan-kesulitan dan mesti membawa pada salah-pengertian, perselisihan dan ketegangan-ketegangan. Kecuali kesulitan dalam penafsiran makna ketentuan-ketentuan itu, serikat-serikat buruh seringkali menuduh Pemerintah tidak tulus dan tiada mempunyai kebulatan tekad untuk melaksanakan azas-azas itu ke dalam praktik. Di lain pihak, Pemerintah cenderung menjawab dengan tuduhan-balik bahwa banyak serikat buruh tidak realistik, bahwa mereka tidak masuk akal dalam tuntutan-tuntutan mereka, dan bahwa mereka tidak melihat situasi ekonomi negeri ini yang genting dan bahwa rakyat dan kaum buruh khususnya, mesti lebih dulu bekerja keras sebelum berpikir tentang suatu negara kesejahteraan dan suatu surga kaum buruh. Suatu argumen seperti itu hanya, sudah tentu, berakibat dalam suatu pembicaraan yang tiada habisnya yang tiada membawa pada sesuatu hasil apa pun.

Sementara itu, penilaian kaum buruh mengenai kejujuran dan kemampuan Pemerintah lazimnya bergantung pada persoalan mengenai siapa yang berkuasa pada suatu masa tertentu. Lazimnya, suatu Pemerintah, menteri-menteri tertentu, dan khususnya Menteri Perburuhan, bahkan sebelum penerimaan jabatan mereka, diberi label sebagai seorang yang reaksioner ataupun progresif, anti- atau pro-buruh oleh serikat-serikat buruh itu. Dan sekali diberi label sebagai anti-buruh, seorang menteri atau menteri-menteri akan terus-menerus mendapatkan kesulitan dengan banyak

edi cahyono's
LIBRARY

serikat buruh. Betapa pun, itu dapat terdengar lebih buruk daripada keadaan yang sesungguhnya, karena berbagai serikat buruh dan federasi jarang sekali sepakat di antara mereka sendiri dalam sikap-sikap mereka terhadap Pemerintah. Kedudukan seuatu serikat buruh individual akan bergantung pada garis politiknya. Suatu Kabinet atau seorang menteri, sekali dinyatakan oleh Partai Komunis sebagai reaksioner, tidak akan pernah mampu melakukan sesuatu yang baik dalam mata SOBSI dan serikat-serikat buruhnya. Suatu nasib seperti itu akan menimpa para menteri Masyumi dan dari Partai Sosialis. Sebaliknya, begitu menerima restu dari Partai Komunis, seorang menteri seperti itu akan dipandang dengan simpati oleh SOBSI. Kabinet-kabinet Pertama dan Kedua dari Ali Sastroamidjojo telah mempunyai pengalaman ini. Tetapi bahkan manakala suatu Pemerintah atau seorang menteri telah dinyatakan persona non grata oleh suatu faksi tertentu dari gerakan serikat buruh, ini tidak harus berarti bahwa seorang menteri seperti itu tidak dapat berurusan dengan serikat-serikat buruh ini. Di antara para pemimpin serikat-serikat buruh ini dan menteri itu suatu saling pengertian sesungguhnya dapat dicapai mengenai masalah-masalah tertentu, sekalipun hal-hal seperti itu tidak akan pernah diakui secara terbuka oleh para pemimpin serikat buruh ini. Seperti sudah dinyatakan di muka, dalam keseluruhannya, serikat-serikat buruh Indonesia siap untuk melakukan apa saja demi kepentingan negeri ini dan untuk seluruh komunitas. Namun pada umumnya mereka mesti tetap menunjukkan suatu sikap keras!

Mari kita sekarang meninjau aspek-aspek tertentu mengenai kebijakan perburuhan Pemerintah yang darinya serikat-serikat buruh telah menjadikan isu-isu pokok di dalam kegiatan-kegiatan politik mereka.

**Hak untuk Mogok dan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan**

Dengan pemulihan perdamaian dan berlanjutnya kegiatan-kegiatan ekonomi pada tahun 1950, [1] serikat-serikat buruh mengkonsolidasi diri mereka dan segera mengajukan tuntutan-tuntutan mereka

akan upah-upah lebih tinggi dan kondisi-kondisi bekerja pada umumnya yang lebih baik, teristimewa di perkebunan-perkebunan, di dalam industri gula, dan lain-lain perusahaan besar di bawah pengelolaan asing (Belanda). Dan memang terdapat alasan untuk ketidakpuasan. Upah dalam perusahaan-perusahaan ini tertinggal jauh di belakang ongkos-ongkos hidup yang berlaku,[2] sedangkan kondisi-kondisi kerja lainnya mengingatkan kita pada zaman kolonial lama. Manajemen Belanda, nanum, menolak untuk memenuhi yang mana pun dari tuntutan-tuntutan itu, menyebutkan tuntutan-tuntutan itu tidak berdasar dan tidak masuk akal. Dan menjulukkan aktivitas-aktivitas mereka pada ekstremisme dan hasutan komunis.

Di dalam laporan untuk tahun 1950, 1951, dan 1952, Dewan Pengusaha untuk Indonesia di Den Haag, Holland, merujuk pada mayoritas serikat-serikat buruh Indonesia sebagai organisasi-organisasi yang beriktikad buruk dengan satu-satunya maksud menggerogoti secara sistematik posisi ekonomi dari perusahaan-perusahaan besar itu. Laporan itu lebih jauh menuduh para pemimpin gerakan serikat buruh Indonesia dengan sengaja gagal mengingatkan kaum buruh bahwa mereka juga mempunyai kewajiban maupun hak-hak, dan membahayakan keseimbangan

[1] Pada bulan Desember 1949 Konferensi Meja Bundar di Den Haag menghasilkan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Menurut Persetujuan Keuangan dan Ekonomi, yang juga disetujui pada Konferensi itu, hak-hak, konsesi-konsesi, dan lisensi-lisensi korporasi-korporasi Belanda di Indonesia diakui oleh Republik. (*Resultaten van de Ronde Tafel Conferentie*, Financiele en Economische Overeenkomst, Pasal 1, hlm. 28). Karenanya, pihak Belanda menerima kembali perkebunan-perkebunan, estate gula, perusahaan pertambangan mereka, dsb., dan segera melanjutkan kegiatan-kegiatan mereka.

[2] Misalnya, pada paruh pertama tahun 1950, upah minimum per hari di perkebunan dan di estate gula di Jawa adalah 65 sen (rupiah) tunai ditambah kesetaraan 80 sen *in natura*, dengan demikian seluruhnya ‘1,45 rupiah per hari; itu adalah kira-kira US$ 12,7 sen, dengan dollar pada waktu itu ditentukan 11,40 rupiah sejak bulan Maret 1950. Di perkebunan-perkebunan di Sumatra, upah sehari minimum adalah Rp. 1.15 tunai dit ini ditambah Rp. 0.80 *in natura*, atau seluruhnya Rp. 1.95 . (*Verslag De Javasche Bank over Het Boekjaar 1951-1952*, hlm. 131).

edi cahyono's
LIBRARY

di antara keduduk kaum buruh dan kesejahteraan publik pada umumnya. Laporan menjulukkan semua kejahatan ini pada agitasi dan subversi komunis dan kiri lainnya.[3]

Akibat penolakan tuntutan-tuntutan dan sikap umum anti-serikat buruh dari manajemen Belanda ialah bahwa dalam bulan Agustus dan September 1950 dan pada bulan Januari dan Februari 1951 lebih dari 700.000 buruh perkebunan melakukan mogok di Jawa dan Sumatra. Sebagai tambahan pada itu, pemogokan pemogokan lain, yang besar dan kecil, terjadi di seluruh pulau-pulau terpenting.

Pemerintah Pusat, dengan ketiadaan sesuatu prosedur hukum bagi penanganan perselisihan-perselisihan perburuhan, tidak dapat berbuat banyak untuk menghadapi situasi itu. Tetapi, komandan-komandan militer di berbagai daerah, mengambil keuntungan dari undang-undang darurat perang yang secara teori masih berlaku, mengeluarkan dekret-dekret militer yang melarang pemogokan-pemogokan. Disebabkan oleh meningkatnya krisis, Mohammqad Natsir, Perdana Menteri dan pada waktu bersamaan Menteri Pertahanan ad interim kemudian memutuskan untuk mengambil langkah-langkah darurat. Didukung oleh seluruh dewan menteri, Natsir menggunakan ketentuan-ketentuan undang-undang darurat itu, dan pada 3 Februari, 1952, mengumumkan Dekret Militer No. 1. Decret itu melarang pemogokan-pemogokan di perusahaan-perusahaan vital dan merujuk perselisihan-perselisihan perburuhan pada komite-komite khusus untuk diselesaikan. Serikat-serikat buruh, dengan engan, menuruti perintah itu, tetapi segera memulai suatu kampanye untuk pembatalan Dekrit Militer itu.

Selama persiapan-persiapan untuk pembentukan suatu Pemerintahan baru setelah pengunduran diri Kabinet Natsir pada 21 Maret, 1951, penghapusan larangan mogok merupakan suatu isu penting. Gerakan serikat burh, khususnya SOBSI, mendesak para pemimpin politik yang telah ditunjuk oleh Presiden untuk membentuk Kabinet baru itu agar mengadopsi sebuah program

[3] *De Ondernemersraad voor Indonesie. Verslag over 1950, 1951, en 1952*, hlm. 42-45. yang beroperasi di Indonesia.

Pemerintah yang akan memulihkan hak mogok kaum buruh. Tekanan kaum buruh itu bukannya tanpa keberhasilan. Kabinet baru itu, dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo dan dilantik pada 27 April 1951, mengumumkan bahwa Decret Militer itu akan digantikan dengan sebuah undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan yang tidak akan meliputi suatu larangan mogok, Menteri Perburuhan dalam Pemerintah baru itu segera membuat persiapan-persiapan untuk merancang sebuah undang-undang seperti itu. Untuk maksud itu ia melakukan dengar-pendapat, tidak saja dengan para pemimpin politik, tetapi juga dengan eksponen-eksponen gerakan serikat buruh dan dengan wakil-wakil industri. Selama dengar-pendapat itu, para pemimpin serikat buruh menunjukkan suatu kesadaran besar akan realisme, dan menyetujui gagasan bahwa Pemerintah mesti diberi kekuasaan tertentu untuk menghadapi perselisihan-perselisihan perburuhan yang sulit. Namun, mereka menekankan agar hak untuk mogok jangan dibatasi dengan cara apapun. Bagian besar partai-partsai politik, yang diwakili di dalam Pemerintah, berpendapat bahwa Pemerintah mesti diberi kekuasaan yang luas untuk mengakhiri perselisihan-perselisihan yang membahayakan dan untuk mencegah pemogokan. Hasilnya yalah bahwa dalam bulan September 1951 sebuah undang-undang disahkan oleh Pemerintah, dikenal sebagai Undang-undang Darurat No. 16 mengenai Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.[4] Undang-undang itu memberlakukan suatu masa menunggu selama tiga minggu bagi serikat-serikat buruh setelah mereka menyatakan niat mereka untuk mogok, dan bagi pengusaha yang mau melarang bekerja kaum buruh mereka. Lebih jauh, undang-undang itu menentukan suatu sistem perantaraan paksa dan arbitrase paksa. Menteri Perburuhan, sebagai Ketua Komite Sentral untuk Penyelesaian Perselisihan-perselisihan Perburuhan,

[4] Sebuah *undang-undang darurat* adalah sebuah undangp-undang yang dikeluarkan oleh Kabinet, tanpa kerjasama Parlemen. Suatu undang-undang seperti itu, begitu diumumkan, mesti diserahkan kepada Parlemen untuk disetujui. Undang-undang darurat No. 16 tidak pernah disetujui oleh Parlemen karena jalan-buntu selalu selama proses di dalam Parlemen. Ia sahih/berlaku hingga Arpil 1957 ketika ia digantikan oleh sebuah Undang-undang baru.

edi cahyono's
LIBRARY

dan sebagai semacam pengawas atas Komite-komite Regional, merupakan tokoh kunci di dalam sistem itu. Demikian, selama perselisihan perburuhan, manakala pemogokan mengancam atau telah sungguh-sungguh terjadi, perhatian para pihak dalam perselisihan, dan teristimewa dari serikat buruh yang bersangkutan dikonsentrasikan pada Menteri Perburuhan. Banyak serikat buruh, tetapi khususnya yang berafiliasi dengan SOBSI, sangat kritikal terhadap Undang-undang Darurat No. 16, dan menentang banyak keputusan dari Komite Sentral itu. Serikat-serikat buruh ini segera memulai suatu kampanye sengit yang meliputi seluruh bangsa untuk Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Pada waktu bersamaan, sambil menunggu penyelesaian perselisihan-perselisihan itu, Komite Sentral, serikat-serikat buruh bersangkutan, termasuk yang berafiliasi dengan SOBSI; dan SOBSI sendiri, membuat berkunjung pada Menteri Perburuhan menjadi suatu kebiasaan, untuk memenangkan keputusan-keputusan yang menguntungkan. Kejadian-kejadian seperti itu juga disambut baik oleh Menteri, karena itu memberikan peluang baik bagi Menteri untuk menceramahi para tamu itu dan menjelaskan kebaikan-kebaikan kasus itu dipandang dari sudut Pemerintah, demi kepentingan negeri dan kaum buruh itu sendiri. Hasilnya yalah bahwa serikat-serikat buruh itu menjadi suatu faktor penting bagi Pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakannya sehari-hari.

Disebabkan oleh meningkatnya tunturan-tuntutan serikat-serikat buruh, khususnya dari SOBSI, agar Undang-undang Daruratr itu dibatalkan, masalahnya menjadi suatu hal penting dalam program partai-partai politik dan setiap Pemerintahan. Setiap Kabinet – dan Indonesia mengganti pemerintahnya hampir setiap tahun– pada gilirannya, selalu menjanjikan kepada kaum buruh bahwa suatu undang-undang baru akan dirancang untuk menggantikan Undang-undang Darurat yang kontroversial itu. Kapan saja suatu Pemerintahan jatuh, seperti yang terjadi bulan Februari 1952, Juni 1953, Juli 1955 dan Maret 1956, serikat-serikb at buruh dan federasi-federasi melakukan suatu kampanye dengan mengirim kawat, surat atau delegasi-delegasi khusus kepada para pemimpin

politik yang ditunjuk untuk membetuk suatu Kabinet baru dan kepada Presiden Republik, menuntut agar Pemerintahan baru itu sedcara langsung mengambil langkah-langkah untuk menggantikan Undang-undang Darurat itu, dan agar tokoh yang akan diangkat sebagai Menteri Perburuhan dalam Kabinet mendatang itu haruslah seseorang yang dipandang bersahabat dengan kaum buruh. Banyak serikat-buruh non-SOBSI juga lebih menyukai sebuah undang-undang lain untuk mengganti Undang-undang Darurat itu, tetapi dalam pernyataan-pernyataan mereka, serikat-serikat buruh ini tidak seekstrem SOBSI, karena mengetahui bahwa yang tersebut terakhir itu mempunyai alasan-alasan tertentu untuk menentang Undang-undang itu. Seorang calon untuk Menteri Perburuhan jika diusulkan oleh SOBSI, lazimnya menghadapi tentangan dari serikat-serikat buruh lainnya, dan vice versa. Dalam beragitasi terhadap keputusan-keputusan Komite Sentral bagi Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan terhadap seorang Menteri Perburuhan, SOBSI tidak saja membuat pernyataan-pernyataan dan mengeluarkan resolusi-resolusi, tetapi juga seringkali mengirim delegasi-delegasi kepada Pemerintah, kepada Parlemen, kepada Presiden Republik dan kepada partai-partai politik terpenting. Kadangkala mereka juga mengorganisir rapat-rapat massa dan demonstrasi-demonstrasi lainnya. Teristimewa selama perayaan Hari Mei manakala ratusan ribu kaum buruh berkumpul dalam rapat-rapat raksasa di setiap kota, penghapusan Undang-undang Darurat itu merupakan suatu isu kegemaran.

Akhirnya, pada bulan April, Undang-undang tahun 1951 itu dibatalkan dan sebuah undang-undang baru disahkan oleh Parlemen. Namun, Undang-undang baru mengenai Penyelesaian Perselisihan Perburuhan itu secara sama tidak menurut keinginan SOBSI, karena, dalam kenyataan, ia hanya sebuah modifikasi dari sistem yang lama, yang membiarkan, sebagaimana adanya, tetap utuhnya azas-azas utama, yaitu mediasi (perantaraan) paksa dan arbitrase paksa maupun batasan-batasan tertentu atas hak untuk mogok, sekali pun tanpa periode peredaan tiga-minggu yang tidak dapat disetujui itu.

edi cahyono's
LIBRARY

Dalam berurusan dengan perselisihan-perselisihan, Komite Sentral dapat membuat rekomendasi-rekomendasi atau memberikan keputusan-keputsan yang mengikat. Namun dalam kebanyakan hal keputusan-keputusan ini mengikat dan tunduk pada pemberlakuan hukum, dengan demikian tidak memberikan pilihan lain pada para pihak kecuali menerimanya. Sejumlah kali terjadi bahwa suatu serikat buruh, yang merasa bahwa telah mengalami ketidak-adilan oleh keputusan mengikat seperti itu, memprotes, menuntut suatu pemeriksaan kembali kasus itu. Dengan Undang-undang Darurat tiada kemungkinan seperti itu. Suatu naik-banding juga tidak dimungkinkan karena Komite Sentral itu merupakan instansi yang tertinggi, dan Mahkamah Agung telah menentukan bahwa pengadilan-pengadilan biasa tidak mempunyai yurisdiksi apapun atas perselisihan-perselisihan perburuhan kolektif yang diliput oleh Undang-undang Darurat itu. Satu-satunya jalan yang terbuka bagi serikat buruh ialah menolak keputusan itu dan menghadapi penuntutan yang dapat mengakibatkan denda atau pemenjaraan bagi pemimpin serikat buruh yang bertanggungjawab. Beberapa serikat buruh menemukan suatu jalan lain, yaitu dengan naik-banding pada Menteri Perburuhan sendiri untuk meminta nasehat dan dukungan. Menurut undang-undang Menteri tidak berbuat apa pun. Namun, dalam berbagai kasus seorang Menteri Perburuhan telah berusaha untuk meminta Komite Sentral membuka kembali atau memeriksa kembali perkara itu, berdasarkan bukti-bukti baru. Namun, seringkali juga, Menteri akan mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan para pemimpin serikat buruh berusaha meyakinkan mereka mengenai ketepatan keputusan dan mendesak serikat buruh itu menyetujui keputusan itu. Dalam beberapa kejadian Menteri itu berhasil, namun dalam kejadian lain tidak. Dalam hal yang terakhir para pemimpin serikat buruh akan pulang dan mendesak barisan anggota biasa untuk diam-diam menyetujui ataupun mogok. Dalam beberapa kejadian pemogokan-pemogokan ilegal seperti itu sungguh-sungguh membawa pada penuntutan dan penghukuman.

Jika Menteri merasa bahwa serikat buruh yang memprotes itu

mempunyai perkara yang kuat namun Menteri itu tidak suka mengambil langkah meminta Komite Sentral melakukan suatu pemeriksaan-/peninjauan-kembali perkara itu, maka ia akan mengundang majikan/pengusaha untuk membicarakan perkara itu. Dalam sejumlah kejadian pembicaraan dengan majikan itu berhasil membujuknya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan serikat buruh hingga sejauh melampaui yang telah diputuskan oleh Komite itu. Semua ini, sudah tentu, terjadi secara tidak resmi dan secara pribadi. Namun itu jelas menunjukkan pengaruh dari Menteri Perburuhan, dan, dari serikat-serikat buruh. Serikat-serikat buruh memelihara hubungan erat dengan Pemerintah, dan Pemerintah dengan serikat-serikat buruh. Memang, di Indonesia, konferensi-konferensi dengan para pemimpin serikat buruh merupakan bagian dari urusan sehari-hari seorang Menteri Perburuhan. Menteri Perburuhan yang sekarang (Samjono) bahkan memulai tanggungjawabnya pada pertengahan tahun 1957 dengan melakukan kunjungan-kunjungan pada markas-markas besar semua federasi untuk menciptakan suatu suasana kepercayaan di antara Pemerintah dan gerakan serikat buruh.

**Hak Berorganisasi**

Jaminan atas hak untuk membentuk atau bergabung pada serikat buruh, dimuat di dalam Pasal 29 Konstitusi, membawa pada pendapat di kalangan serikat-serikat buruh yang lebih kuat, khususnya SOBSI, bahwa Pemerintah atau Negara tidak boleh mempunyai sesuatu hak campur-tangan apa pun dalam urusan-urusan organisasi serikat-serikat buruh. Karena sebab ini SOBSI telah menolak setiap usaha dari Pemerintah untuk membuat, lewat perundang-undangan, suatu penyelesaian dalam kekacauan yang telah mengganggu dunia serikat buruh Indonesia sejak tahun 1950. Berbagai undang-undang yang dirancang oleh Menteri Perrburuhan dan yang membahas organisasi serikat-serikat buruh, dengan pengakuan serikat buruh dan dengan pendaftaran serikat buruh, semuanya telah ditolak oleh SOBSI. Banyak serikat buruh lainnya

edi cahyono's
LIBRARY

juga menolak untuk mendukung usulan-usulan itu, beberapa dari mereka hanya karena alasan prestise. Demikianlah, karena alasan-alasan politik, Pemerintah menunda pekerjaan perancangan undang-undang itu.

Pada bulan Mei 1954, sebuah undang-undang disahkan oleh Parlemen, yang membahas Persetujuan-persetujuan Kolektif, serikat-serikat buruh yang terdaftar dapat mengadakan kontrak-kerja kolektif dengan para pengusaha. Pada bulan April 1955 Menteri Perburuhan mengeluarkan sebuah Peraturan Kementerian yang membahas pendaftaran serikat-serikat buruh.[5] Karena cuma sebuah Peraturan Menteri dan bukan sebuah Undang-undang, peraturan ini hanya dapat memberikan pendaftara sukarela, sehingga serikat-serikat buruh yang tidak menyukai gagasan dirinya didaftar itu, dapat tetap tidak terdaftar, namun begitu tetap dapat menikmati semua hak sebagai sebuah serikat buruh. Dan jika suatu serikat buruh yang tidak terdaftar seperti itu berhasil dalam menutup sebuah kontrak kerja dengan sebuah perusahaan, tiada apa pun yang dapat menghalangi atau melarang serikat buruh itu atau perusahaan itu mengadakan suatu kontrak seperti itu.

Demikianlah, terutama karena perlawanan dari pihak perburuhan yang terorganisasi, khususnya SOBSI, Indonesia tidak mempunyai sesuatu perundang-pundangan yang mengatur serikat-serikat buruh kecuali sebuah peraturan kementerian mengenai pendaftaran secara sukarela yang tidak mempunyai keberlakuan secara hukum.

Contoh ini sekali lagi menunjukkan kekuasaan serikat-serikat buruh, khususnya SOBSI. Lagi pula, Pemerintah-pemerintah dan partai-partai politik, karena mempunyai cukup banyak musuh, tidak ingin menambahkan kemarahan serikat-serikat buruh kepada masalah-masalah mereka, dan telah memutuskan: baiklah, kalau begitu tiada perundang-pundangan mengenai serikat-serikat buruh!

[5] Undang-Undang 28 Mei, 1954, No. 21 mengenai Persetujuan Kolektif antara Serikat-serikat Buruh dan Pengusaha.

**Perundang-undangan Perlindungan Perburuhan**

Pada tahun 1947 dan 1948, pada puncak-puncaknya Revolusi dan ketika daerah-daerah yang dikuasai-Republik dibatasi pada bagian-bagian Jawa dan Sumatra, yang selebihnya diduduki oleh tentara kolonial Belanda dan pemerintahan-pemerintahan boneka yang disponsori Belanda, Pemerintah Republik dan Parlemen Sementara, yang berkedudukan di ibukota Revolusi, Yogyakarta, mengesahkan tiga undang-undang mengenai perburuhan, yaitu, Undang-undang Kecelakaan Industri tahun 1947, Undang-undang Perburuhan tahun 1948 —sebuah undang-undang yang mengurangi jam-jam kerja, melarang kerja anak-anak, membatasi kerja oleh wanita, dan memperkenalkan tindakan-tindakan perlindungan lainnya— dan Undang-undang mengenai Inspeksi Perburuhan tahun 1948. Dengan pelantikan Negara Indonesia Serikat pada bulan Desember 1949, dan penegakan-kembali Republik Persatuan pada bulan Agustus, 1950, tiada keraguan apakah ketiga undang-undang pro-buruh ini masih berlaku. Bahkan terdengar suara-suara yang mengajukan pertanyaan apakah Republik berhasrat untuk mempunyai undang-undang seperti itu, teristimewa Undang-undang Kerja yang menentukan tujuh-jam kerja sehari dan empatpuluh jam kerja seminggu. Gerakan serikat buruh, merasakan bahaya, mengambil langkah-langkah cepat. Di dalam dan di luar Parlemen suatu kampanye dilancarkan untuk pemberlakuan undang-undang perburuhan yang akan melindungi perburuhan. Para wakil buruh dalam Parlemen, dipimpin oleh Ahem Erningpradja, Asrarrudin dan Werdojo, berhasil membuat disetujuinya sebuah usulan/mosi yang menyerukan kepada Pemerintah untuk mengajukan perundang-undangan dan diambilnya langkah-langkah lain bagi perlindungan hak-hak kaum buruh dan perbaikan kondisi-kondisi kerja. Beberapa bulan kemudian, Pemerintah mengajukan tiga rancangan undang-undang kepada Parlemen yang akan membuat tiga undang-undang lama berlaku di dalam Republik yang baru. Di dalam beberap hari, pada bulan Januari 1951, undang-undang itu disahkan dan serikat-serikat buruh itu menang![6]

edi cahyono's
LIBRARY

Terdapat banyak contoh mengenai kegiatan-kegiatan dan kekuatan gerakan serikat buruh Indonesia dalam bidang politik yang bersangkutan dengan perburuhan. Suatu bukti lain mengenai kehormatan yang dinikmati serikat-serikat buruh di Indonesia, adalah kenyataan bahwa banyak pemimpin serikat buruh mempunyai kursi di dalam Parlemen. Hingga tahun 1956 bahkan terdapat suatu Fraksi Buruh khusus dalam Parlemen, terdiri atas pemimpin-pemimpin SOBSI. Di dalam Parlemen sekarang sejumlah pemimpin serikat buruh berfungsi sebagai anggota, tidak mewakili buruh secara resmi, tetapi termasuk pada berbagai partai politik. Pemimpin-pemimpin pucak dari SOBSI kini, miusalnya, kesemuanya anggota Parlemen.

## Kegiatan Politik di luar Bidang Perburuhan

Seperti dinyatakan di muka, gerakan serikat buruh Indonesia memperhatikan/berurusan dengan masalah-masalah dasar dan politik umumnya, seperti keamanan negeri, keselamatan dan kesempurnaan kemerdekaan Indonesia, pembangunan kembali Negara dan perkembangan ekonomi. Serikat-serikst buruh itu juga berkepentingan dalam politik luarnegeri Republik, dan dalam urusan-urusan dunia pada umumnya.

Dalam menggunakan pengaruh mereka dan memberi tekanan-tekanan di bidang-bidang ini, serikat-serikat buruh dan federasi-federasi buruh menggunakan metode-metode yang sama seperti yang berkenaan dengan kebijakan perburuhan Pemerintah.

[6] Undang-undang ini adalah:

1. Undang-undang 6 Januari, 1952, No. 1 yang menyatakan Undang-undang Perburuhan 1948, No. 12, dari Republik Indonesia (Gaya Lama), berlaku untuk seluruh Indonesia (Republik baru).
2. Undang-undang 6 Janurari, 1951, No. 2 yang menjadikan Undang-undang Mengenai Kecelakaan Industri tahun 1947, No. 33, berlaku untuk seluruh Indonesia.
3. Undang-undang 5 Januari, 1951, No. 3 yang menjadikan Undang-undang mengenai Inspeksi Perburuhan tahun 1948, No. 23, berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pernyataan-pernyataan dikeluarkan, resolusi-resolusi dibuat dan poster-poster diperagakan, menyatakan pandangan-pandangan dan keinginan-keinginan serikat-serikat buruh. Delegasi-delegasi diutus ke Presiden Republik, pada Perdana Menteri, para menteri secara perseorangan, Ketua Parlemen, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Staf Angkatan Perang, dan kepada semua Otoritas Pemerintah yang ada, untuk menjelaskan kedudukan gerakan serikat buruh dan untuk menekankan keinginan-keinginannya. Riubuan surat dan kawat dikirim untuk maksud yang sama. Rapat-rapat massa dan demonstrasi lainnya menambahkan kekuatan dan kekuasaan serikat-serikat buruh itu. Seni lobi juga dimengerti dan dikembangkan, sedangkan anggota Parlemen yang berasal dari serikat buruh selalu memperhatikan prosedur-prosedur hukum yang selayaknya. Dalam keseluruhannya, para pemimpin serikat buruh mengikut metode-metode yang sama seperti mitra mereka di banyak negeri demokratik lainnya, satu-satunya perbedaan ialah tekanan yang diberikan oleh watak khusus serikat-serikat buruh Indonesia.

## Kegiatan-berkenaan dengan Keamanan Negeri dan Penyempurnaan Kemerdekaan Indonesia

Mempertahankan Kemerdekaan dan penyempurnaan Kedaulatan Republik merupakan isu politik utama yang sangat menjadi kepentingan/perhatian partai-partai politik, serikat-serikat buruh, organisasi-organisasi lain dan seluruh rakyat, sejak pecahnya Revolusi bulan Agustus 1945, dan yang tidak diredakan oleh penyerahan resmi kedaulatan oleh Belanda di bulan Desember 1949.

Sejak penyerahan kedaulatan, kegiatan partai-partai politik dan serikat-serikat buruh telah berpusat di sekitar hubungan antara Republik dan Negeri Belanda. Perserikatan Belanda-Indonesia, Persetujuan Keuangan dan Ekonomi dan produk-produk lainnya dari Konferensi Meja Bundar (RTC) dan penolakan pihak Belanda untuk menarik diri dari West New Guinea (Irian Barat), menjadi

edi cahyono's
LIBRARY

isu-isu besar politik. Perserikatan Belanda-Indonesia dipandang sebagai suatu pelanggaran atas kedaulatan Republik. Persetujuan Keuangan dan Ekonomi tidak lebih tidak kurang merupakan kelanjutan dominasi Belanda dalam bidang ekonomi yang dalam kenyataan akan mem- biarkan sumber-sumber alam di dalam tangan kaum monopoli Belanda dan akan memustahilkan penghapusan sistem ekonomi kolonial dan perkembangvan suatu ekonomi nasional. Dan akhirnya, dilanjutkannya pendudukan Irian Barat oleh Belanda merupakan suatu perkosaan atas Wilayah Indonesia, suatu pelanggaran atas kedaulatan Republik, suatu pukulan atas martabat nasional, merupakan suatu ancaman terus-menerus terhadap keamanan negeri, dalam kenyataan merupakan suatu pelanggaran terhadap Persetujuan-persetujuan Konferensi Meja Bundar itu sendiri dan bahkan merupakan suatu tindakan agresi. Inilah pertimbangan-pertimbangannya.

Pembubaran Perserikatan Belanda-Indonesia dan Perjanjian-perjanjian Konferensi Meja Bundar lainnya dengan demikian menjadi tuntutan-tuntutan politik dari gerakan serikat-buruh Indonesia setelah tahun 1950.

SOBSI dan serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya memandang masalah-masalah yang timbul dari Perjanjian-perjanjian KMB demikian pentingnya sehingga isu itu disisipkan ke dalam mukadimah konstitusi-konstitusi mereka. Semua konstitusi Serikat-serikat buruh SOBSI telah memandang Perjanjian-perjanjian KMB sebagai kelanjutan imperialisme Belanda, dan sumber dari kesengsaraan kaum buruh Indonesia, dan sebab dari semua kejahatan yang telah mengganggu negeri. Sebagai tambahan, SOBSI, serikat-serikat buruhnya, federasi-federasi dan serikat-serikat buruh lainnya telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang di dalamnya mereka mengutuk Perjanjian-perjanjian KMB dan telah menyatakan kesediaan mereka untuk memperjuangkan pembebasan Irian Barat.

Sikap bermusuhan dari serikat-serikat buruh terhadap Perjanjian KMB dan terhadap negeri Belanda pada umumnya jelas hingga

suatu batas yang jauh adalah pekerjaan dari partai-partai politik dan dari para pemimpin politik yang aktif di dalam serikat-serikat buruh. Namun ia juga berasal dari barisan anggota biasa serikat-serikat buruh itu sendiri. Pada umumnya, kaum buruh tidak dapat dengan mudah melupakan perilaku congkak dan sewenang-wenang dari banyak pengusaha dan pengawas/mandor Belanda di masa lalu. Dan, bahkan dalam Indonesia merdeka, beberapa pengusaha dan pengelola Belanda, sekurang-kurangnya selama tahun-tahun pertama, masih kolonial dalam sikap mereka terhadap kaum buruh. Sangat wajarlah bahwa kekesalan di kalangan kaum buruh itu mendapatkan pengungkapannya dalam politik dan aksi-aksi serikat-serikat buruh. Lebih lanjut, serikat-serikat buruh berpendapat bahwa, terpisah dari kekecewaan mengenai keberlanjutan kepemilikan Belanda dan pengelolaan perusahaan-perusahaan besar, kemerdekaan negeri sama sekali tidak menghasilkan perubahan kondisi-kondisi dan hubungan-hubungan perburuhan.

Kaum buruh beralasan untuk mengharapkan beberapa perubahan mendasar dan cepat dalam hubungan-hubungan buruh-pengusaha maupun dalam hubungan dengan kondisi-kondisi lainnya di dalam industri. Perjanjian Keuangan dan Ekonomi dari Konferensi Meja Bundar itu sendiri telah memuat desiderata berikut:

a. Korporasi-korporasi mesti membuka pintu-pintu mereka pada partisipasi kapital Indonesia dalam bisnis mereka.[7]
b. Harus menjadi usaha korporasi-korporasi untuk mendirikan pelembagaan perundingan kolektif antara pengusaha dan kaum buruh di seluruh bidang hubungan buruh-pengusaha.[8]
c. Korporasi-korporasi mesti memporomosikan penciptaan sebuah komunitas kepentingan-kepentingan di antara manajemen dan kaum buruh.[9]
d. Korporasi-korporasi mesti mengambil langkah-langkah untuk

[7] *Resultaten van de Ronde Tafel Conferentie*, Financiele en Economische Overeenkomst, Pasal-pasal 5, hlm. 30.

[8] *Ibid.*, Pasal 12 (1)(a), hlm. 32

[9] *Ibid.*, Pasal 12 (1)(b), hlm. 31.

edi cahyono's LIBRARY

memperbaiki akomodasi perumahan dan jaminan sosial kaum buruh.[10]

e. Korporasi-korporasi mesti, sesegera mungkin, memasukkan orang-orang Indonesia yang memenuhi syarat ke dalam manajemen (termasuk ke dalam dewan-dewan direksi manajemen) dan di dalam staf korporasi-korporasi; mereka juga mesti bekerjasama dalam membentuk lembaga-lembaga pelatihan, sehingga di dalam suatu jangka waktu yang masuk akal maryoritas staf personel pimpinan akan terdiri dari warga Indonesia.[11]

Teristimewa dalam tahun-tahun pertama setelah ditandatangani Perjanjian-perjanjian KMB, perubahan-perubahan yang diharapkan itu tidak kunjung dilaksanakan. Banyak pengusaha Belanda gagal memenuhi janji yang dinyatakan oleh Pemerintah mereka. Baru sesudah sejumlah tahun keragu-raguan dan setelah berulangkali diperingatkan oleh pembesar-pembesar Indonesia,[12] bahwa sejumlah dari korporasi-korporasi besar mulai memberi perhatian pada masalah itu. Perusahaan-perusahaan minyak, beberapa bisnis perbankan besar, perusahaan percetakan besar, dsb. mendirikan lembaga-lembaga pelatihan yang cocok dalam suatu usaha serius untuk menyiapkan orang-orang Indonesia bagi jabatan-jabatan puncak. Beberapa dari korporasi-korporasi ini juga mengangkat orang-orang Indonesia yang memenuhi persyaratan ke dalam manajemen. Shell/BPM, Standard Vacuum Oil Company dan Caltex Pasific selama bertahun-tahun mempunyai orang-orang Indonesia dalam posisi-posisi puncak dan mempunyai pola-pola pelatihan beroperasi untuk memenuhi kebutuhan akan lebih dan semakin banyak orang Indonesia di dalam manajemen.

[10] *Ibid.*, Pasal 12 (1)(c), hlm. 31.

[11] *Ibid.*, Pasal 12 (1)(d), hlm. 31.

[12] Dalam tahun-tahun 1951-1953, Menteri Perburuhan biasa mengundang manajemen korporasi-korporasi untuk menanyai mereka tentang implementasi ketentuan-ketentuan KMB tersebut di atas. Hasilnya ialah bahwa manajemen itu mengajukan rencana-rencana yang dapat dikerjakan kepada Menteri untuk melaksanaka ketentuan-ketentuan itu.

Namun, sementara itu, banyak sekali kerugian sudah ditimbulkan terhadap hubungan-hubungan pengusaha-buruh di banyak sekali perusahaan-perusahaan Belanda. Lagi pula, banyak dari perusahaan-perusahaan ini terus gagal mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan mereka.

Maka oleh karena itu dapat dimengerti bahwa banyak tokoh serikat buruh berangsur-angsur sampai pada keyakinan bahwa satu-satunya cara pengobatan terhadap penyalahgunaan ialah suatu perubahan radikal dari bangunan ekonomi itu sendiri, dengan, sebagai conditio sine qua non , likuidasi Perjanjian-perjanjian KMB itu, karena adalah Perjanjian-perjanjian dengan Pemerintah Belanda ini, demikian mereka percaya, yang merupakan dasar dari supremasi kapital Belanda di Indonesia.

Adalah dalam hubungan ini bahwa banyak serikat buruh mengembangkan suatu pendapat dan menentukan suatu kebijaksanaan mereka sendiri dalam kaitan dengan hubungan Indonesia-Belanda, bebas dari, atau sebagai tambahan pada pengaruh partai-partai politik. Pendapat independen dari serikat-serikat buruh ini telah digambarkan secara baik sekali oleh SARBUPRI, atau sekurang-kurangnya oleh seorang fungsionaris puncak dari serikat buruh perkebunan yang besar itu, pada tahun 1950. Pada waktu itu, hanya beberapa bulan setelah penyerahan kedaulatan, banyak orang di Indonesia, termasuk beberapa pemimpin SARBUPRI, agaknya, masih berharap, bahwa kondisi-kondisi di dalam perusahaan-perusahaan yang dioperasikan – Belanda akan segera berubah ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya mereka siap untuk menyetujui situasi yang diciptakan oleh KMB, sekurang-kurangnya untuk sementara waktu. Sekali pun Partai Komunis dan beberapa partai politik lainnya sudah melancarkan serangan mereka terhadap Perjanjian-perjanjian KMB pada waktu itu, SARBUPRI, sekali pun adanya kenyataan bahwa ia sudah berafiliasi dengan SOBSI, tampaknya mempunyai suatu pendapat lain atau mengikuti taktik-taktik yang lain. Dalam pidato pembukaannya pada Kongres Kedua serikat buruh itu pada 20 Mei, 1950, Ahem Erningpradja, ketika itu Ketua serikat buruh itu, sambil

edi cahyono's LIBRARY

merujuk pada Perjanjian KMB, mengatakan kepada audiensi yang besar itu bahwa:

> Kaum buruh perkebunan kini memandang Perjanjian-perjanjian KMB sebagau suatu realitas..... Oleh karena itu SARBUPRI memandang keberadaan ka[pital asing di Indonesia sebagai suatru realitas yang merupakan konsekuensi datri kapital asing dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki-asing tidak merupakan suagtu masalah bagi SARBUPRI. Kaum buruh perkebunan tidak menolak untuk bekerja di perkebunan-perkebunan yang dimiliki-asing ini; mereka hanya mengharapkan bahwa manajemen-manajemen mesti menyesuaikan diri mereka pada perubahan-perubahan yang telah terjadi. Untuk tepatnya, mereka mesti menghormati Konstitusi Republik.[13]

Itulah SARBUPRI Ahem Erningpradja pada tahun 1950.

Sekarang, SARBUPRI sama tidak terdamaikannya seperti SOBSI dalam penilaiannya mengenai Perjanjian-perjanjian KMB.[14] Konstitusi serikat buruh itu,[15] dalam mukadimahnya, mengutuk Perjanjian-perjanjian KMB dan menuntut implementasi pembatalannya secara radikal. Ahem Erningpradja sendiri kini bukan Ketua SARBUPRI. Pada tahun 1953 ia meninggalkan serikat buruh itu dan kini ia Ketua KBKI. Tetapi federasi ini juga, termasuk Ketua, Erningpradja, tidak dapat ditawar-tawar lagi berkenaan dengan likuidasi Perjanjian-perjanjian KMB.

Disahkannya resolusi-resolusi, dikeluarkannya pernyataan-pernyataan dan dilakukannya agitasi terhadap Perjanjian-perjanjian KMB tidak terbatas pada bisnis federasi atau komite-komite sentral dari serikat-serikat buruh besar. Organisasi-organisasi regional dan bahkan serikat-serikat buruh lokal, dari waktu ke waktu, memberikan bukti akan kekesalan mereka terhadap hasil-hasil Konferensiu Meja Bundar. Misalnya, pada 21 Januari, 1951, serikat buruh minyak lokal dari Jambi, Sumatra Tengah, berkumpul dalam sebuah konferensi, mengadopsi sebuah resolusi, yang menuntut pembatalan langsung Perjanjian-perjanjian KMB.[16] Dalam bulan

[13] *Tindjauan Masalah Perburuhan*, 1 Juli, 1950, hlm. 31.

[14] Pada bulan Pebruari 1956, Pemerintah Indonesia membatalkan Perserikatan Belanda-Indonesia dan Perjanjian-perjanjian KMB lainnya secara unilateral.

[15] Diadopsi oleh Kongres Keempat SARBUPRI pada bulan Oktober, 1950.

yang sama, namun kini seribu mil jauhnya ke arah timur, yaitu di Jember, Jawa Timur, serikat buruh lokal dari pegawai pasar dan pemotong-daging mengesahkan sebuah resolusi serupa.[17] Belakangan dalam tahun yang sama, kaum buruh tambang menyatakan pendapat yang sama.[18] Demikianlah, semua serikat buruh, nasional, regional maupun lokal, nyaris tanpa kecuali, satu demi satu, mengesahkan resolusi-resolusi dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan, mengecam Perserikatan Belanda-Indonesia dan mengutuk semua Perjanjian KMB lainnya, teristimewa di bidang-bidang keuangan dan ekonomi.

Pada kesempatan-kesempatan tertentu, perasaan anti-Belanda akan melonjak tinggi. Ini adalah, misalnya, kejadiannya ketika selama perundingan-perundingan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda,[19] yang tersebut terakhir terbukti tidak mempuynyai iktikad baik, yang sesungguhnya atau yang berpura-pura, atau berkanjang dalam menunjukkan suatu sikap tak berubah terhadap keinginan-keinginan tertentu pihak Indonesia. Maka, suara-suara serikat-serikat buruh akan bernada lebih tinggi. Menjulangnya sentimen-sentimen secara periodik, yang dikobarkan oleh terus didudukinya Irian Barat oleh Belanda, memperburuk situasi itu. Suatu kesempatan yang bagus bagi agitasi bersikala-besar terhadap Perjankjian-perjanjian KMB setiap tahunnya disuguhkan oleh peringatan proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agtustus, dan oleh perayaan-perayaan Hari Mei. Pada kedua peristiwa itu, diu semua kota beribu-ribu kaum buruh berkumpul dalam rapat-rapat raksasa mendengar pidato-pidato berapi-api dari para pemimpin buruh dan Pemerintah; kaum buruh berbaris di jalan-jalan membawa poster-poster raksasa dan gambar-gambar

[16] *Tindjauan Masalah Perburuhan*, Januari ,1951, hlm. 32.

[17] *Ibid*..

[18] *Ibid*. , April, Mei dan Juni 1951, hlm. 50.

[19] Selama tahun-tahun antara 1950-1955, Republik nyaris setiap tahun membuka pembidcaraan-pembicaraan dengan Belanda, menyarankan perubahan-perubahan dalam hubungan-hubungan Belanda-Indonesia dan mendesak pengembalian Irian Barat, tetapi tanpa hasil.

edi cahyono's
LIBRARY

ukuran besar. Slogan-slogan yang dipakai terutama ditujukan terhadap Perjanjian-perjanjian KMB, terhadap pendudukan Irian Barat oleh Belanda dan lain-lain soal penting dalam maupun luar negera. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya, jumlah kaum buruh yang berkumpul mencapai ratusan ribu. Demonstrasi-demonstrasi ini ditutup dengan pengesahkan resolusi-resolusi yang tidak saja menjadi tajuk-tajuk dalam surat-surat kabar, melainkan juga diajukan pada Pemerintah dan Parlemen. Pengajuan itu seringkali dilakukan oleh delegasi-delegasi khusus kaum buruh.

Kegiatan-kegiatan berkenaan dengan isu Irian Barat dilakukan secara sama. Lebih lanjut, serikat-serikat buruh mengirim para wakil mereka ke komite-komite pusat dan regional yang dibentuk untuk mengkoordinasi dan melaksanakan perjuangan untuk pembebasan Irian Barat. Dalam komite-komite ini delegasi-delegasi kaum buruh bekerjasama dengan para wakil partai-partai politik, dari Pemerintah dan dari Tentara, untuk merancang rencana-rencana dan menentukan strategi dan taktik-taktik. Pada akhir tahun 1957, aksi kaum buruh untuk pembebasan Irian Barat mengemabil bentuk suatu pemogokan umum di semua perusahaan yang dioperasikan-Belanda. Karena meningkatnya sentimen-sentimen aksi ini amembawa pada pengambil-alihan secara sewenang-wenang perusahaan-perusahaan Belanda oleh kaum buruh. Akibatnya ialah bahwa Pemerintah, dalam suatu usaha untuk mencegah kekerasan lebih jauh dari pihak kaum buruh yang marah, mengambil alih penguasaan atas milik-milik Belanda itu.

### Kegiatan Politik berkenaan dengan Pembangunan-kembali Negeri

Perjuangan kemerdekaan yang empat-dasawarsa lamanya itu tidak hanya ditujukan pada penumbangan Rezim Kolonial Belanda di Indonesia, tetapi juga mempunyai sebagai sasarannya pembangunan kembali suatu negara nasional, yang berbeda dari Hindia-Belanda kolonial dalam segala seginya. Manakala kaum buruh, dipimpin

oleh serikat-serikat buruh mereka, bergabung dalam perjuangan ini dan mengirimkan batalyon-batalyon buruh ke medan perang selama peperangan dengan Belanda, mereka mempunyai suatu gagasan mengenai untuk apa mereka berjuang itu, jaitu suatu negara nasional yang bebas dari semua sisa-sisa kolonial, yang dibangun di atas dasar demokrasi yang akan menjamin hak-hak kaum buruh dengan maksud menciptakan kondisi-kondisi bagi suatu perkembangan ekonomi yang akan menjamin kepada kaum buruh kondisi-kondisi bekerja dan kehidupan yang lebih baik.

Dengan pengecualian serikat-serikat buruh Muslim, yang menginginkan sebuah negara berdasarkan azas-azas Islam, semua serikat buruh lainnya menghendaki sebuah negara yang dibangun menurut garis-garis sosialis, sekali pun terdapat beragam gagasan mengenai seberapa jauh Indonesia akan menjadi sebuah negara sosialis. Serikat-serikat buruh non-SOBSI dan non-SOBRI juga menolak konsep suatu sistem negara totaliter. Namun semua ini termasuk pada bidang tujuan-tujuan akhir. Untuk saat ini serikat-serikat buruh itu memusatkan perhatian mereka pada likuidasi semua sisa rezim lama dalam bidang-bidang perundang-undangan, administrasi dan dalam praktik sehari-hari para pembesar Pemerintah, teristimewa di daerah-daerah. Undang-undang kolonial lama yang menolak kebebasan pers, kebebasan berbicara dan hak-hak demokrasi dasar lainnya, sudah dihapuskan sejumlah tahun yang lalu. Serikat-serikat buruh juga menyesalkan perilaku otoriter para pegawai negeri dan perwira polisi yang mengingatkan pada zaman kolonial lama ketika negeri ini dijalankan oleh para pegawai negeri yang memerintah daerah-daerah administrasi, yang besar maupun yang kecil. Kini serikat-serikat buruh itu, dan bagian besar partai-partai politik, menuntut penghapusan sistem pegawai negeri itu. Sebagi gantinya, mereka menginginkan suatu sistem demokratik yang didasarkan pada disentralisasi dan otonomi lokal. Suatu Republik persatuan yang demokratik dengan otonomi seluas-luasnya bagi privinsi-provinsi, kota-kota dan desa-desa adalah yang dikehendaki-/diperjuangkan serikat-serikat buruh itu.

edi cahyono's LIBRARY

Mengenai perkembangan ekonomi negeri, serikat-serikat buruh menghendaki suatu ekonomi-berencana dan implementasi Pasal 38 Konstitusi Republik yang menyatakan bahwa:

1. Perekonomian nasional akan diorganisasi atas dasar koperasi.
2. Cabang-cabang produksi penting bagi Negara dan yang secara vital pempengaruhi kehidupan orang banyak, akan dikuasai oleh Negara.
3. Tanah dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, akan dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Kebanyakan serikat buruh (SOBSI dengan syarat-syarat substansial) mengakui keharusan kapital asing untuk membantu dayaupaya ekonomi, sekali pun mereka memahami bahwa bagian terbesar dalam penyediaan kapital mesti datang dari rakyat sendiri.

SOBSI lagi-lagi memimpin jalan dalam kegiatan-kegiatan serikat buruh berkenaan dengan perkembangan ekonomi negeri in. Konferensi Nasional SOBSI, yang diselenggarakan dalam bulan September 1957, terutama diabdikan pada masalah ini.[20]

Di bidang perkemnbangan ekonomi, pandangan dan keinginan serikat-serikat buruh mirip dengan dari partai-partai politik yang dengannya mereka memelihara perhubungan, dengan tambahan bahwa serikat-serikat buruh meletakkan tekanan pada kedudukan dan hak-hak kaum buruh di dalam proses perkembangan itu.

## Kegiatan dalam hubungan dengan Politik Luarnegeri dan dengan Keadaan Dunia

Pengaruh-pengaruh sosialis di dalam banyak serikat buruh Indonesia telah menjadikan kaum buruh Indonersia berminat dalam politik internasonal dan dalam keadaan dunia pada umumnya.

Pertama-tama sekali serikat-serikat buruh menghendaki jaminan-

[20] *Bendera Buruh*, 30 September , 1957, hlm. 1.

jaminan dari Pemerintah bahwa kebijakan luarnegeri negeri ini akan didasarkan pada kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia, yang hanya dapat dilayani oleh pelestarian perdamaian dunia dan hubungan-hubungan persahabatan di antara Indonesia dan selebihnya dunia. Oleh karenanya Republik mempertahankan suatu politik luarnegeri non-blok (non-alignment) yang ketat dengan kubu mana pun yang kini berlawanan satu sama lain. Gerakan serikat buruh Indonesia dapatr menyetujui dengan perumusan suatu kebijakan luarnegeri yang bebas dan aktif yang ditujukan pada pengurangan ketegangan internasional dan pelestarian perdamaian dunia. Namun, apa yang diartikan dengan ini, tidak sama bagi SOBSI seperti bagi KBSI, bagi KBKI, bagi SBII, dsb. SOBSI bermusuhan terhadap politik luarnegeri Amerika Serikat dan Sekutu-sekutunya, sedangkan banyak serikat buruh lainnya menginginkan hubungan persahabatan dengan Timur maupun dengan Barat.

Untuk kepentingan perdamaian dun ia, semua serikat buruh menolak pakta-paktya militger dan perlombaan persenjataan. Untuk pelestarian umat-manusia, mereka juga mengutuk penggunaan segala jenis bom atom dan hidrogen dan menuntut pelarangan langsung atas percobaan-percobaan nuklir.

Demi untuk kelengkapan, layak disebutkan bahwa SOBSI berpartisipasi dalam kongres-kongres perdamaian internasional. Federasi itu juga sponsor dewan-dewan atau komite-komite untuk memajukan perdamaian dunia.

# BAB VI
# KESIMPULAN

Indoktrinasi gerakan serikat buruh Indonesia oleh ideologi-ideologi politik adalah tuntas dan menyeluruh.

Kelahiran dan pertumbuhan gerakan itu selama limapuluh tahun terakhir, cara yang dengannya indoktrinasi ini dilakukan, dan perkembangan gerakan itu sejak pendirian Republik, telah membuat watak politik dari gerakan serikat buruh Indonesia tidak terelakkan . Keadaan ini juga tidak bisa tidak berlanjut dengan tiada kemungkinan suatu modifikasi dalam masa depan yang dekat.

Gagasan-gagasan dan cita-cita politik ini telah menjadi daya pendorong gerakan itu. Mereka telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan yang telah memungkinkan pencapaian-pencapaian dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional dan dalam perjuangan untuk emansipasi kelas pekerja Indonesia.

Pada waktu bersamaan, watak politik dari serikat-serikat buruh telah sampai pada proporsi-proporsi yang sedemikian rupa dan telah menimbulkan perselisihan-perselisihan dan kekacauan sedemikian rupa sehingga ia menimbulkan kecemasan-kecemasan serius.

Sesuatu mesti dilakukan agar menahan/menghentikan arah yang berbahaya ini. Adalah gerakan serikat buruh itu sendiri yang menjadi taruhan.

Namun begitu, akan salah sekali untuk berasumsi bahwa pengobatan dapat ditemukan dalam penggantian gerakan serikat buruh politik oleh suatu gerakan non-politik, misalnya, dengan suatu gerakan yang berlaku di Amerika Serikat. Suatu usaha seperti itu akan bernasib kegagalan, karena alasan sederhana bahwa Indonesia tidak mempunyai kondisi-kondisi bagi suatu geakan

serikat buruh dengan type bisnis seperti itu. Pra-syarat bagi suatu gerakan seperti itu, yaitu, kepercayaan pada atau penerimaan tatanan ekonomi yang berlalu tidak terdapat di kalangan tokoh-tokoh serikat buruh Indonesia.. Serikat-serikat buruh Indonesia juga tiada mempunyai personel dan material yang diperlukan bagi suatu perkembangan ekonomi sejati dari gerakan itu. Lagi pula, kekuatan-kekuatan yang mendukung watak politik gerakan adalah kuat dan terus meningkat dalam kekuatan dan jumlah.

Tampak bagi pengarang buku ini bahwa jalan menuju penciptaan suatu gerakan serikat buruh Indonesia yang lebih baik mesti dimulai dengan penerimaan watak politiknya sebagai suatu fait accompli. Di dalam keadaan tertentu ini perubahan-perubahan tertentu atau perbaikan-perbaikan tidaklah mustahil. Jelas mudah dilaksanakan suatu kampanye untuk meyakinkan banyak tokoh serikat buruh dan kaum buruh pada umumnya bahwa gagasan-gagasan dan tujuan-tujuan politik itu semuanya baik-baik saja, tetapi bahwa adalah suatu kegilaan untuk menjadikan serikat-serikat buruh sekedar cabang atau substruktur partai-partai politik, dalam arti bahwa setiap partai politik mempunyai gerakan serikat buruhnya sendiri-sendiri, seperti situasinya sekarang.

Orang dapat menerima keberadaan suatu gerakan serikat buruh plural yang berdasarkan pada ideologi-ideologi politik, yaitu, komunisme, sosialisme, nasionalisme, dan Islamisme. Namun situasi sebagaimana ia adanya sekarang dengan dua gerakan buruh komunis, dua sosialis, dua nasionalis, dan empat Muslim, jelas tidak masuk akal. Dan, apabila kaum komunis mesti mempunyai suatu gerakan serikat buruh yang menerima Partai Komunis sebagai barisan pelopornya, kita tidak bisa berbuat apa pun terhadapnya. Tetapi gerakan serikat buruh sosialis tidak harus menjadi cabang dari Partai Sosialis; federasi nasionalis tidak perlu menerima perintah-perintahnya dari Partai Nasional, dan kaum Muslim mesti puas dengan hanya satu serikat buruh tanpa kaitan-kaitan organisasi dengan sesuatu partai politik Muslim tertentu.

Menimbulkan suatu keyakinan dan sikap sejenis ini di kalangan

edi cahyono's
LIBRARY

perserikatan buruh Indonesia, kondisi-kondisi tertentu mesti diciptakan di muka. Pertama, pelatihan suatu jumlah besar tokoh serikat buruh mesti dilakukan, agar mempunyai suatu inti kuat di dalam gerakan serikat buruh yang tidak melihat pada partai-partai politik untuk bimbingan dan dukungan utama mereka, tapi yang mampu mengembangkan kekuatan dari barisan anggota itu sendiri. Kedua, sudah saatnya bahwa partai-partai politik dan para pemimpin politik berusaha memahami kedudukan dan tujuan sesungguhnya suatu gerakan serikat buruh. Mereka mesti memahami bahwa, sementara serikat-serikat buruh mengaitkan nilai-nilai tinggi pada cita-cita politik, partai-partai politik jangan melibatksan serikat-serikat buruh itu dalam masalah-masalah politik mereka sehari-hari. Mereka mesti yakin bahwa serikat-serikat buruh dapat menuyumbang pada realisasi tujuan-tujuan politik namun tetap bebas dari ikatan-ikatan dengan partai-partai politik. Akhirnya, jelas bahwa sesuatu pemecahan akhir hanya akan mungkin setelah pemecahan kesulitan-kesulitan politik negeri ini sendiri. Kesulitan-kesulitan ini memang sangat besar, menggunung dalam pemberontakan terbuka bulan Februari 1958 di Sumatra Tengah dan di Sulawesi Utara. Tetapi kini, di pertengahan tahun 1958, terdapat tanda-tanda bahwa situasinya sedang membaik dan bahwa stabilitas sedang mendekat. Lagi pula, pemerintahan sekarang dari Perdana Menteri Djuanda bertekad untuk melaksankan Rencana Lima Tahun Perkembangan ekonomi yang bermaksud meningkatkan produktivitas negeri ini dan meningkatkan pendapat nasional.

Sungguh memuaskan untuk mengetahui bahwa Rencana itu juga meliputi satu bab mengenai hubungan-hubungan perburuhan. Bab itu membahas masalah mengenai bagaimana menjamin suatu proses produksi yang lebih mulus dengan hubungan-hubungan buruh-pengusaha yang lebih sehat. Apakah sasaran-sasaran ini akan direalisasikan sudah tentu juga, dan terutama, bergantung pada sikap serikat-serikat buruh itu sendiri, dan suatu sikap yang menguntungan dari gerakan serikat buruh dapat dalam jangka panjangnya dikembangkan hanya jika gerakan itu mampu belajar

dari pelajaran-pelajaran masa lalu dan mengubah hubungan-hubungannya dengan partai-partai politik.